



LAPORAN PENELITIAN PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA JAYAPURA DAN SORONG



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-Nilai Budaya Irian Jaya
1996 / 1997**

Direktorat
budayaan

ISSN



LAPORAN PENELITIAN
PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
KOTA JAYAPURA DAN SORONG

Oleh :

Barkis Suraatmaja

Teddy K. E. Wanane

Fredrik Sokoy

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-Nilai Budaya Irian Jaya

1996 / 1997



Penyusun / Peneliti :

Barkis Suraatmaja
Teddy K. E. Wanane
Fredrik Sokoy

Penyunting : Lamech Ap.

ISSN

Hak cipta pada
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Irian Jaya Tahun Anggaran 1996/1997 melaksanakan kegiatan pencetakan naskah hasil penelitian. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program tahun sebelumnya.

Naskah hasil penelitian tersebut adalah :

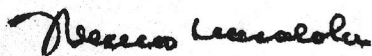
" Pembinaan Disiplin Di lingkungan Masyarakat Kota Jayapura dan Sorong "

Kegiatan pencetakan naskah hasil penelitian ini, bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian agar nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah diidentifikasi ini dapat menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. Saran dan kritik yang sifatnya membangun atas kekurangan laporan penelitian ini akan diterima dengan senang hati.

Jayapura, 17 September 1996

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,



Soewarto Handoko

NIP. 130208543

REPORT

On the 1st of January 1900, the first day of the new year, the weather was very cold and the wind was from the north-east. The sea was very rough and the waves were very high. The ship was very much shaken and the passengers were very uncomfortable. The captain was very angry and the crew were very tired.

The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired.

The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired.

The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired.

The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired. The ship was very much damaged and the passengers were very much distressed. The captain was very angry and the crew were very tired.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Metodologi	4
F. Kerangka Laporan	5
Bagian Pertama : PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA JAYAPURA.	
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Administratif Jayapura	7
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian : Kelurahan Numbai	13
C. Berbagai Permasalahan Kota Jayapura	17
BAB III DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN NUMBAI	
A. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga	19
B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Sosial	20
C. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan	22
D. Disiplin dalam Hubungan Ketetanggaan	23
BAB IV DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT - TEMPAT UMUM	
A. Disiplin di lingkungan Pasar/Pertokoan	26
B. Disiplin di lingkungan Terminal	28

C. Disiplin di Bioskop	31
D. Disiplin di Jalan Raya	32
BAB V UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA JAYAPURA	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	43
Bagian Kedua : PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA SORONG.	
BAB VII GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Sorong	49
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian : Kelurahan Remu Utara	76
C. Berbagai Permasalahan Kota Sorong	
BAB VIII DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN REMU UTARA	
A. Disiplin dalam Penanganan Limbah/Sampah Keluarga	91
B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Sosial	93
C. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan	96
D. Disiplin dalam Hubungan Ketetanggaan	100
BAB IX DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT - TEMPAT UMUM DI KELURAHAN REMU UTARA	
A. Disiplin di lingkungan Pertokoan	104
B. Disiplin di Jalan Raya	108
BAB X UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA SORONG	
A. Pembinaan oleh Pemerintah	111
B. Pembinaan oleh Tokoh Masyarakat	118
BAB XI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	120
B. Saran - Saran	122
DAFTAR KEPUSTAKAAN	124
PETA KOTA JAYAPURA	
PETA KOTA SORONG	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II. 1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	10
II. 2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan	11
II. 3 Perkembangan penduduk kota Jayapura	11
II. 4 Penduduk Kelurahan Numbai berdasarkan umur	15
II. 5 Penduduk Kelurahan Numbai berdasarkan pekerjaan	16
II. 6 Penduduk Kelurahan Numbai berdasarkan agama	16
II. 7 Sarana perekonomian di Kelurahan Numbai	17
IV. 1 Jumlah taksi dan penerimaan retribusi	29
VII. 1 Daftar jarak tempuh dalam satuan kilometer (Km) ke Pusat Pemerintahan dan antar Desa / Kelurahan (Keadaan sebelum tahun 1991)	52
VII. 2 Daftar jarak tempuh dalam satuan kilometer (Km) ke Pusat Pemerintahan (Keadaan sekarang)	53
VII. 3 Daftar jarak tempuh dalam satuan kilometer (Km) ke Pusat Perbelanjaan Pasar Sentral Sorong	54
VII. 4 Daftar jarak tempuh dalam satuan kilometer (Km) ke Pusat Perbelanjaan Pertokoan	54
VII. 5 Kondisi jalan di kota Sorong menurut jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan tahun 1991	56
VII. 6 Banyaknya air minum yang disalurkan menurut kategori pelayanan dan pelanggan tahun 1990	57

VII.	7	Perkembangan Perusahaan Air Minum (PAM) Kabupaten Sorong Tahun 1989/1990 - 1990/1991	58
VII.	8	Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sorong	64
VII.	9	Situasi Klimatologi kota Sorong Tahun 1991	66
VII.	10	Banyaknya penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kecamatan Sorong Kota tahun 1991 sampai Juli 1992	67
VII.	11	Golongan sosial menurut tingkat kemakmuran dan tingkat pendapatan sebagai sistem kategorisasi dalam masyarakat kota Sorong	69
VII.	12	Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 1991	82
VII.	13	Jumlah penduduk menurut dinamika penduduk tahun 1991	83
VIII.	1	Daftar jenis-jenis sampah keluarga	91
VIII.	2	Daftar cara penanganan limbah / sampah keluarga di Kelurahan Remu Utara	92
VIII.	3	Daftar jenis kegiatan responden	93
VIII.	4	Jenis keperluan ke Kantor Kelurahan	99

ABSTRAK

Upaya pembinaan disiplin telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam masyarakat dengan berbagai cara. Banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan masyarakat. Demikian juga bahwa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkat kedisiplinan itu (rendah atau tinggi) adalah juga luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kedisiplinan warga masyarakat khususnya masyarakat perkotaan.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (kualitatif) penelitian ini dilakukan pada dua kota yaitu Kota Jayapura (di Kabupaten Jayapura) dan Kota Sorong (di Kabupaten Sorong) di Irian Jaya. Di Kota Jayapura tim peneliti melakukan penelitian pada Kelurahan Numbai di Kecamatan Jayapura Selatan; sedangkan di Sorong penelitian dilakukan di Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong. Tim peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat di Kelurahan Numbai di Jayapura cukup baik pada beberapa bidang kegiatan terutama dalam kegiatan keagamaan, namun dalam hal penanganan limbah keluarga (sampah), kegiatan administrasi pemerintahan, kegiatan dilingkungan pasar dan pertokoan (perbelanjaan), lalu lintas jalan raya, dan menonton di Bioskop tim peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat rendah. Untuk masyarakat Kelurahan Remu Utara di Sorong tim peneliti menemukan bahwa ada semacam sikap acuh tak acuh dengan kepentingan umum yang menyebabkan tingkat kedisiplinan masyarakatnya menjadi rendah. Tingkat kedisiplinan yang rendah ini (baik di Jayapura maupun di Sorong) ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah penyediaan sarana umum yang tidak memadai pengaruh dari kebiasaan hidup yang kurang menunjang yang dibawa dari tempat asal, dan sistem pengendalian sosial yang lemah.

The first of these is the fact that the Arab world is a vast and diverse one, with many different cultures, languages, and religions. This diversity is reflected in the many different ways in which the Arab world has been studied and described. For example, some scholars have focused on the political and economic aspects of the Arab world, while others have focused on the cultural and social aspects. This diversity has made it difficult to develop a single, unified theory of the Arab world.

One of the main reasons for this diversity is the fact that the Arab world is a very large and complex one. It covers a vast area of land, from the Mediterranean coast in the west to the Indian Ocean in the east. It is home to a large and diverse population, with many different languages and cultures. This diversity has made it difficult to develop a single, unified theory of the Arab world. However, there are some common themes that run through the study of the Arab world. One of these is the importance of religion in Arab society. Another is the importance of family and community. A third is the importance of oil in the Arab world's economy. These themes have helped to shape the way in which the Arab world has been studied and described.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masyarakat kota dibedakan dari masyarakat desa berdasarkan ciri-ciri tertentu. Salah satu yang membedakan masyarakat kota dengan masyarakat desa adalah jenis pekerjaan. Sebagian besar warga masyarakat desa bekerja dalam bidang pertanian, termasuk juga peternakan dan perikanan. Sebagian besar warga masyarakat kota bekerja di luar bidang pertanian. Pekerjaan di luar bidang pertanian di kota sangat beraneka ragam. Pada garis besarnya keanekaragaman jenis pekerjaan di kota dapat dikategorikan ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tidak seperti pekerjaan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan, pekerjaan di kota tidak memerlukan bidang tanah yang luas. Dengan demikian maka penduduk dalam suatu wilayah administrasi di daerah perkotaan lebih padat dari pada di daerah pedesaan. Sejalan dengan kepadatan penduduknya serta keanekaragaman pekerjaannya, maka perbedaan kedudukan dalam masyarakat kota lebih besar karena individu yang dianggap tinggi lebih banyak macam dan jumlahnya. Perbedaan kedudukan ini menjadi dasar adanya pelapisan sosial dalam masyarakat. Individu-individu yang menempati suatu kedudukan cenderung lebih banyak bergaul antara mereka sendiri (Koentjaraningrat, 1977 : 174). Dengan demikian maka dalam masyarakat kota terbentuk kelompok-kelompok yang berdasarkan persamaan kedudukan. Oleh karena kota merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan, maka biasanya penduduk kota tidak hanya berasal dari desa-desa di sekitarnya tetapi juga dari daerah-daerah lain. Adanya penduduk yang berasal dari berbagai daerah ini telah membentuk pengelompokan yang berdasarkan daerah asal atau kelompok-kelompok etnik. Oleh karena manusia itu terikat oleh adat istiadat maka kelompok-kelompok etnik yang ada di kota itu cenderung masih berperilaku seperti di daerah asalnya. Perbedaan sistem nilai yang didukung oleh kelompok-kelompok etnik ini akan memberi peluang hubungan yang kurang serasi di antara mereka.

Derasnya arus urbanisasi juga merupakan salah satu masalah perkotaan. Akibat dari urbanisasi ini, timbulah pengangguran, naiknya kriminalitas, masalah perumahan, kenakalan atau kejahatan anak-anak dan persoalan rekreasi (Soerjono Soekanto, 1978 : 132). Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh urbanisasi merupakan masalah yang sukar dipecahkan.

Kehidupan di kota yang kompetitif mendorong orang untuk bertindak cepat sehingga faktor waktu menjadi penting untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu. Untuk memenuhi kebutuhan dalam suasana kehidupan yang kompetitif ini individu dapat mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kepadatan penduduk, terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya sarana, hubungan antar kelompok yang kurang serasi, kehidupan yang kompetitif serta peraturan-peraturan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan merupakan faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi ketertiban masyarakat kota.

Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat. Pembinaan disiplin warga masyarakat dianggap penting sekali sehingga dimasukkan ke dalam GBHN. Menurut GBHN pembinaan disiplin nasional bertujuan untuk memperbaiki kesetiakawanan nasional, menanamkan sikap tenggangrasa, hemat dan prasaja, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan mandiri. Demi amanat yang termaktub dalam GBHN itu maka perlu dilakukan penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota.

B. Masalah.

Banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan warga masyarakat kota. Demikian pula akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kedisiplinan itu sangat luas. Jadi masalah kedisiplinan warga masyarakat kota adalah masalah yang luas. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama untuk meneliti masalah kedisiplinan warga masyarakat kota, pokok-pokok masalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan.
2. Aturan dan kaidah sosial apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan.

C. Tujuan.

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Tingkat disiplin masyarakat kota.
2. Aturan dan kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat kota.
3. Upaya pembinaan disiplin dalam masyarakat kota.

Deskripsi tentang hal-hal tersebut di atas sangat penting untuk merumuskan kebijaksanaan yang akan ditempuh terhadap warga masyarakat kota. Sejalan dengan perkembangan kota maka masalah-masalah yang timbul akan semakin kompleks pula.

D. Ruang Lingkup.

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota dilaksanakan di dua lokasi, yaitu :

1. Di lingkungan pemukiman.
2. Di lingkungan tempat-tempat umum (pasar, pertokoan, terminal, tempat hiburan dan jalan raya).

Ruang lingkup penelitian di lingkungan pemukiman meliputi :

1. Disiplin dalam penanganan limbah keluarga, jenis-jenis limbah keluarga, cara penanganan limbah keluarga (dibakar, dikubur, dibuang ke tempat sampah umum, dibuang ke sungai).
2. Disiplin dalam partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, keamanan, kesehatan, kerja bakti, olah raga dan kedukaan.
3. Disiplin terhadap administrasi pemerintahan :
Melaporkan kelahiran, kematian, perkawinan, bepergian, kedatangan tamu lebih dari dua puluh empat jam, penghuni baru, pemilikan KTP, memperpanjang masa berlaku KTP, pindah alamat.
4. Disiplin dalam hubungan ketetanggaan :
Masalah-masalah yang biasanya timbul dalam hubungan ketetanggaan yaitu pertengkaran di antara anak-anak, penanganan limbah keluarga dan air.

Ruang lingkup penelitian di lingkungan tempat-tempat umum meliputi :

1. Disiplin di lingkungan pasar :
Penanganan sampah, pedagang, petugas pasar dan pembeli, tata tertib di pasar.
2. Disiplin di lingkungan pertokoan :
Penanganan sampah, pedagang kaki lima.
3. Disiplin di lingkungan terminal :
Tata tertib di terminal, disiplin di terminal.
4. Disiplin di tempat hiburan (bioskop).
5. Disiplin di jalan raya :

Penggunaan trotoar, parkir, pelanggaran lalu lintas, administrasi lalu lintas (SIM, STNK).

Dalam penelitian ini diungkapkan pula upaya pembinaan disiplin masyarakat kota yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

E. Metodologi.

Penelitian tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Oleh karena tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di beberapa daerah perkotaan di Indonesia, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Adapun yang dijadikan kasus dalam penelitian ini adalah kasus pembinaan disiplin warga Kota Jayapura dan Sorong.

Kota Administratif Jayapura terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Jayapura Selatan. Dari dua kecamatan ini selanjutnya dipilih Kecamatan Jayapura Selatan karena penduduknya lebih padat dan mobilitas dan aktivitas penduduk lebih tinggi. Kecamatan Jayapura Selatan terdiri dari 5 kelurahan dan 2 desa. Dari ketujuh wilayah administratif ini dipilih Kelurahan Numbai sebagai lokasi penelitian. Di lokasi penelitian ini terdapat lokasi pemukiman dan tempat-tempat umum (pasar, pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya), penduduknya padat dan mobilitas serta aktivitasnya cukup tinggi.

Kota Sorong adalah ibu kota Kabupaten Sorong. Kota Sorong terdiri dari lima kelurahan dan delapan desa. Dari kelima kelurahan dipilih Kelurahan Remu Utara. Penelitian tentang disiplin di lingkungan pemukiman dan daerah pertokoan dilakukan di Kelurahan Remu Utara.

Data dan informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Data sekunder diperoleh dari berbagai kantor Pemerintah yang berada di Kota Jayapura dan Sorong. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap sejumlah informan. Para informan terdiri dari para pejabat pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, polisi, petugas pasar, petugas terminal, petugas bioskop, Ketua RW, Ketua RT, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh agama. Wawancara juga dilakukan secara sambil lalu terhadap orang-orang yang berada di lapangan dimana peneliti melakukan pengamatan. Hasil dari pengamatan selain terdapat dalam uraian juga terekam dalam bentuk foto-foto.

Bagian Pertama

**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT KOTA JAYAPURA**

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
AND THE JOURNAL OF THE
ETHNOLOGICAL SOCIETY OF LONDON

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Administratif Jayapura

1. *Lokasi dan luas kota.*

Kota Jayapura terletak pada koordinat 140° 31 BT dan 20° 32 LS. Luas wilayah Kota Jayapura adalah 5.076,6 hektar.

2. *Batas administrasi kota.*

Batas Kota Jayapura di sebelah utara adalah Samudra Pasifik, di sebelah timur Teluk Yos Sudarso, di sebelah selatan Kecamatan Abepura, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sentani dan Depapre. Batas Kota Jayapura di sebelah timur adalah negara PNG.

3. *Jarak tempuh.*

Kota Jayapura terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Jayapura Selatan. Kecamatan Jayapura Utara terdiri dari tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Ria, Imbi, Angkasapura, Trikora, Mandala, Bhayangkara dan Gurabesi. Kecamatan Jayapura Selatan meliputi Kelurahan Numbai, Argapura, Ardipura, Entrop, Vim, Desa Tobati dan desa Kayu Pulau.

Pusat perekonomian : toko, pasar, bank, bengkel, hotel, bioskop, salon kecantikan, penjahit dan usaha bidang jasa lainnya, terletak di Desa Numbai; sedangkan pusat pemerintahan, yaitu Kantor Bupati, Walikota dan Gubernur terletak di Kelurahan Bhayangkara. Kelurahan Numbai berbatasan dengan Kelurahan Bhayangkara. Jarak tempuh dari kelurahan-kelurahan dan desa-desa lain ke pusat perekonomian dan pemerintahan adalah berkisar antara 10 sampai 45 menit. Sebagai contoh, jarak yang terjauh adalah dari Kelurahan Vim ke pusat perekonomian adalah sekitar 35 menit dan ke pusat pemerintahan sekitar 45 menit. Jarak tempuh ini diukur dengan kecepatan kendaraan bermotor.

Panjang jalan di Kota Jayapura adalah 64 kilometer, jalan sepanjang ini terdiri dari jalan negara 24 kilometer, jalan propinsi sepanjang 21 kilometer, dan jalan kabupaten sepanjang 19 kilometer. Kendaraan yang melalui jalan-jalan ini sejumlah 2.229 buah. Dari sejumlah itu 1.024 buah kendaraan adalah kendaraan umum.

4. *Lingkungan fisik.*

Sebagian wilayah Kota Jayapura terdiri dari bukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 50 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dengan kondisi alam seperti ini maka sebagian besar bangunan terletak di daerah yang datar dan sebagian kecil di daerah perbukitan. Daerah perbukitan yang dijadikan pemukiman adalah Kelurahan Angkasapura. Daerah ini terutama dihuni oleh para pejabat pemerintah. Demikian pula oleh karena Kota Jayapura semakin hari semakin dirasakan padat maka mulai bermunculan bangunan-bangunan bertingkat dan penimbunan rawa-rawa.

Kondisi jalan di Kota Jayapura 71% dalam keadaan baik, 10% dalam keadaan rusak ringan, 10% dalam keadaan rusak sedang dan 9% dalam keadaan rusak berat. Jalan-jalan di Kota Jayapura terdiri dari jalan aspal (44%), jalan kerikil (44%) dan jalan tanah (12%).

Kebutuhan akan listrik untuk Kota Jayapura dipenuhi oleh Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Yarmokh. PLTD ini terletak di dekat pelabuhan Jayapura. Sejalan dengan perkembangan kota permintaan akan listrik terus meningkat. Pada bulan November 1992 jumlah pelanggan adalah 27.042. Sementara ini terdapat 1.513 calon pelanggan. Pihak PLN Wilayah X Jayapura menghadapi berbagai masalah seperti :

- Adanya pelanggan yang menggunakan listrik melebihi kapasitas terpasang;
- Adanya warga masyarakat yang merusak lampu-lampu jalan;
- Adanya pelanggan yang menunjukkan kelalaian dalam pembayaran listrik.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura mengelola delapan sumber air yaitu dari Sungai Anafre, APO, Kloofkamp, Entrop, Kladili, Pos Tujuh dan Meku. Kedelapan sumber air ini dapat memenuhi kebutuhan warga kota akan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengklasifikasikan pelanggan ke dalam : sosial (untuk lingkungan yang sulit mendapat air), non-niaga (rumah tangga dan kantor-kantor), niaga (perusahaan seperti misalnya rumah makan) dan industri.

Untuk mengangkut sampah dari rumah tangga, perkantoran, pasar, tempat umum dan jalan, pemerintah administratif Jayapura memiliki 13 mobil pengangkut sampah dan 20 gerobak sampah.

Fasilitas umum yang akan diuraikan dalam laporan penelitian ini meliputi fasilitas kesehatan, keamanan, olah raga, pendidikan, keagamaan, transportasi, perekonomian.

Di Kota Jayapura terdapat 2 rumah sakit (umum dan ABRI) 3 PUSKESMAS, 4 BKIA, 5 Klinik dan 5 Apotek. Untuk menangani kesehatan di Kota Jayapura terdapat 44 orang dokter (gigi, umum dan ahli) serta 173 tenaga para medis. Dokter spesialis yang ada di Jayapura terbatas pada bidang spesialisasi anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, THT dan mata.

Di Kota Jayapura terdapat dua pos Polisi dengan personil berjumlah 453 orang. Dari sejumlah 53 pos SISKAMLING yang aktif hanya 23 saja.

Di samping sebuah stadion dan gedung olah raga, tempat-tempat olah raga tersebar di seluruh kota. Tempat-tempat olah raga itu adalah lapangan sepak bola, bola volly, bulu tangkis, basket dan tennis.

Dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terdapat di Kota Jayapura. Keseluruhan jenjang pendidikan itu adalah sebagai berikut TK 14 buah, SD 14 buah, SMTP 16 buah, SMTA 13 buah dan PT (swasta) 4 buah. Jumlah peserta didik seluruhnya adalah 25.333 orang yang diasuh oleh 945 orang tenaga pengajar.

Untuk melaksanakan ibadah agama di Kota Jayapura terdapat 49 gereja Protestan, 2 gereja Katolik, 30 mesjid dan 1 buah pura. Tempat-tempat ibadah ini tersebar di seluruh bagian kota.

Di samping kendaraan dinas dan pribadi, kemudahan warga kota untuk bepergian didukung oleh kendaraan umum sebanyak 1.024 taksi. Taksi sebagai kendaraan umum secara tetap melalui jalan-jalan tertentu, namun di samping itu warga kota dapat mencarternya untuk keperluan pribadi.

Fasilitas ekonomi di Kota Jayapura meliputi pasar, bank, toko, kios, warung, serta berbagai usaha bidang jasa. Di seluruh Kota Jayapura terdapat 5 buah pasar besar dan kecil, 7 buah bank pemerintah, 4 buah bank swasta, 621 buah toko, dan 66 buah kios dan warung.

5. *Lingkungan alam.*

Wilayah Kota Jayapura terdiri dari pesisir, dataran, lereng bukit, perbukitan dan rawa. Berdasarkan keadaan ini maka tidak seluruh wilayah dapat dihuni. Akhir-akhir ini ada usaha untuk menimbun rawa-rawa sehingga dapat digunakan untuk mendirikan bangunan. Berdasarkan keadaan

permukaan tanah ini pula terdapat jalan yang menaik atau menurun secara tajam.

Iklim di kota adalah iklim tropis dengan suhu udara antara 20° sampai 35° Celcius. Pada bulan Januari sampai dengan bulan April curah hujan rata-rata 350 mm, pada bulan Mei sampai dengan Oktober curah hujan rata-rata 200 mm, dan pada bulan November sampai dengan bulan Desember curah hujan rata-rata 300 mm. Dengan angka curah hujan tersebut di Kota Jayapura tidak ada perbedaan yang menyolok antara musim hujan dengan musim kemarau.

6. *Kependudukan.*

Penduduk Kota Jayapura berjumlah 101.170 orang yang terdiri dari 55.950 laki-laki dan 46.220 perempuan. Selanjutnya akan dikemukakan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan penduduk Kota Jayapura.

TABEL II. 1
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan		%
Buta huruf / tidak bersekolah	10.506	17
Sekolah Dasar	13.571	20
S M T P	18.552	28
S M T A	11.654	17
Akademi / PT	11.904	18
J u m l a h	66.187	100

Sumber : KANWIL DEPDIBUD Propinsi Irian Jaya

Penduduk kota Jayapura yang buta huruf ada sebanyak 17%, ke dalam angka ini tidak termasuk anak-anak yang belum masuk SD.

TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan		%
Nelayan	2.188	2
Pedagang	3.323	3
Petani	450	0,5
Pegawai Negeri	11.312	11
ABRI	4.161	4
Lain - Lain	79.736	79,5
J u m l a h	101.170	100

Sumber : Kantor KOTIF Jayapura

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa warga kota yang bekerja sebanyak 20,5%. Sumber data tidak memperinci pekerjaan lain-lain, misalnya pekerjaan dalam bidang jasa. Namun dari jumlah yang dicantumkan sesungguhnya jumlah yang besar itu terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang yang sudah lanjut usia dan para penganggur.

Perkembangan penduduk Kota Jayapura dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1991 dapat dilihat pada tabel ini.

TABEL II. 3
PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA JAYAPURA

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	1987	46.814	40.446	87.260
2.	1988	46.570	42.828	89.338
3.	1989	48.778	44.863	93.641
4.	1990	55.676	45.242	100.918
5.	1991	55.950	46.220	101.170

Sumber : Kantor KOTIF Jayapura

Dari tabel tertera di atas ternyata penduduk kota terus bertambah. Pertambahan penduduk yang menyolok adalah 1989 ke tahun 1990. Hal lain yang menarik adalah jumlah penduduk laki-laki secara tetap lebih banyak dari penduduk perempuan. Kemungkinan karena kebanyakan migran adalah laki-laki.

7. *Kehidupan ekonomi.*

Tingkat kemakmuran warga kota menurut anggapan mereka sendiri dapat digolongkan ke dalam beberapa kelas, yaitu kelas orang kaya sekali, kelas orang kaya, kelas orang yang bercukupan, kelas orang yang kekurangan, dan kelas orang yang kekurangan sekali.

Kelas orang yang kaya raya sekali ditandai dengan pemilikan perusahaan besar, memiliki rumah dan perlengkapan yang mewah, memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu buah, dan bertempat tinggal di daerah yang baik, berpenghasilan di atas tiga juta rupiah per bulan. Mereka terdiri dari pedagang Cina. Kelas orang kaya memiliki kekayaan di bawah kekayaan kelas orang kaya sekali, berpenghasilan sekitar 2 sampai 3 juta rupiah per bulan. Mereka terdiri dari para pengusaha Cina dan pribumi dan para pejabat tinggi pemerintah. Khusus para pejabat pemerintah dari kelas ini bertempat tinggal di daerah pemukiman yang terbaik yaitu di Angkasapura. Di bawah kelas orang kaya adalah kelas orang cukup. Tentu saja mereka memiliki kekayaan dan pendapatan di bawah kelas orang kaya. Mereka terdiri dari para pedagang, pengusaha, pegawai negeri. Sesungguhnya kelas orang cukup ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa sub kelas karena pendapatan mereka berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per bulan. Mereka menempati rumah gedung, pada umumnya memiliki kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Di bawah kelas orang cukup adalah kelas orang kurang yaitu mereka yang berpenghasilan antara Rp. 250.000,- per bulan. Mereka terdiri dari pengusaha kecil, tukang, pedagang kecil, karyawan perusahaan. Kelas yang paling bawah adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp. 250.000,- per bulan. Mereka hidup di pemukiman kumuh, tanpa penerangan listrik dan air minum dari ledeng. Mereka adalah buruh kasar.

8. *Kehidupan sosial budaya.*

Pada umumnya anggota rumah tangga di kota tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja tetapi juga dihuni oleh kerabat lain. Kerabat itu dapat dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Orang-orang yang menumpang dalam

suatu rumah tangga dengan berbagai alasan seperti misalnya untuk melanjutkan studi, mempunyai pekerjaan di kota, sedang mencari pekerjaan di kota, pasangan suami isteri yang belum mempunyai rumah sendiri sementara menumpang di rumah orang tua, atau orang tua yang telah lanjut usia diurus oleh anaknya yang telah berkeluarga. Hubungan antar anggota dalam suatu rumah tangga pada umumnya baik karena didasarkan atas hubungan kerabat dekat.

Hubungan antar warga kota di Jayapura pada dasarnya dilandasi oleh suatu kepentingan. Antar warga suatu pemukiman timbul hubungan melalui kegiatan olah raga, agama, keamanan melalui Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING), arisan dan jika terjadi musibah. Tingkat kerukunan antar warga pada umumnya baik. Ada kecenderungan orang bergaul dengan orang-orang yang lebih banyak persamaan dengan dirinya. Misalnya, orang lebih suka bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, yang sama pekerjaannya atau yang sama keadaan ekonominya. Kegiatan sosial dalam suatu pemukiman biasanya terbatas pada waktu-waktu tertentu seperti kerja bakti atau kegiatan dalam rangka perayaan 17 Agustus.

9. *Gambaran umum tentang disiplin terhadap aturan dan kaidah-kaidah sosial.*

Disiplin warga Kota Jayapura terhadap aturan dan kaidah sosial masih rendah. Kekurang disiplin ini dapat diamati dalam kehidupan masyarakat kota sehari-hari. Baik di daerah pemukiman ataupun di tempat-tempat umum dapat dilihat sampah bertebaran. Pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari, tidak terlihatnya budaya antri di terminal, tidak ditaatinya peraturan oleh penonton dan petugas bioskop, tidak dipatuhinya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya.

B. Gambaran Umum Kelurahan Numbai

1. *Lokasi dan luas Kelurahan Numbai.*

Kelurahan Numbai terletak di pusat Kota Jayapura dengan luas kurang lebih 128 hektar.

2. *Batas administrasi kelurahan.*

Batas Kelurahan Numbai adalah sebagai berikut :
di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bhayangkara;
di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gurabesi;
di sebelah selatan berbatasan dengan teluk Yos Sudarso;
di sebelah utara berbatasan dengan ujung pegunungan Cycloop.

3. *Pembagian wilayah administratif.*

Kelurahan Numbai dibagi ke dalam enam Rukun Wilayah (RW), yaitu RW I Gajah Putih, RW II Batu Putih, RW III Pasar Ampera, RW IV Setiapura, RW V Makodam, dan RW VI Batu Putih Bawah.

4. *Lingkungan fisik.*

Tata letak bangunan di Kelurahan Numbai pada garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam :

- a. bangunan-bangunan di sepanjang sungai (pasar dan perumahan);
- b. bangunan-bangunan di lereng-lereng bukit (perumahan semi permanen);
- c. bangunan-bangunan di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan sekitarnya.

Bangunan yang terletak di sepanjang sungai dan di lereng bukit dapat dikategorikan ke dalam semi permanen dan termasuk daerah kumuh. Seperti keadaan jalan di Kota Jayapura pada umumnya, jalan di Kelurahan Numbai sebagian besar dalam keadaan baik dan sebagian kecil dalam keadaan rusak. Jalan-jalan di sepanjang daerah aliran sungai dan lereng bukit adalah jalan yang sempit yang terbuat dari kerikil atau tanah saja.

Kebutuhan akan penerangan listrik di Kelurahan Numbai dapat dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di daerah pemukiman kumuh di lereng bukit tidak menggunakan penerangan listrik. Penduduk di situ menggunakan pelita minyak tanah. Seperti halnya kebutuhan akan listrik, kebutuhan akan air minum dipenuhi oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Sebagian penduduk masih menggunakan sumur. Sebagai bagian dari Kota Jayapura, Kelurahan Numbai pun ditunjang dengan sarana kebersihan berupa gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Tong-tong sampah dapat dilihat di depan toko-toko atau rumah-rumah penduduk.

Fasilitas umum yang terdapat di Kelurahan Numbai adalah Pos Yandu, poliklinik, tempat beribadah dan lapangan olah raga.

Jumlah kendaraan bermotor di Kelurahan Numbai adalah 287 buah. Jumlah ini terdiri dari truk 32 buah, taksi 42 buah, sepeda motor 87 buah dan kendaraan bermotor roda empat lainnya 43 buah.

5. *Lingkungan fisik.*

Wilayah Kelurahan Numbai terletak di kaki bukit. Kurang lebih 46% dari daerah ini terdiri dari perbukitan dan 54% dataran. Sebagian penduduk bermukim di dataran dan sebagian bermukim di lereng bukit. Di wilayah ini pula mengalir sebuah sungai (sungai Anafre) yang digunakan oleh penduduk mencuci dan mandi.

6. Kependudukan.

Pada tahun 1992 penduduk Kelurahan Numbai berjumlah 6.782 jiwa terdiri dari 1.091 kepala keluarga. Berikut ini akan dikemukakan penduduk berdasarkan kelompok umur, pekerjaan, pendidikan dan agama.

TABEL II. 4
PENDUDUK KELURAHAN NUMBAI BERDASARKAN UMUR

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	0 - 4	407	346	753
2.	5 - 9	230	211	441
3.	10 - 14	513	517	1.030
4.	15 - 19	302	225	527
5.	20 - 24	756	740	1.496
6.	25 - 29	305	253	558
7.	30 - 34	400	349	749
8.	35 - 39	212	208	420
9.	40 - 44	121	118	239
10.	45 - 49	110	101	211
11.	50 - 54	87	75	162
12.	55 - 59	58	51	109
13.	60 ke atas	47	40	87
J u m l a h		3.548	3.234	6.782

Sumber : Kantor Kelurahan Numbai, 1992

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berusia di bawah 15 tahun berjumlah 2.224 atau 33%. Mungkin angka ini memberikan indikasi masih tingginya angka kelahiran. Kelompok usia produktif yang jumlahnya besar adalah kelompok usia 20 - 24 tahun, jumlah mereka merupakan 22% dari jumlah penduduk Kelurahan Numbai.

TABEL II. 5
PENDUDUK KELURAHAN NUMBAI BERDASARKAN PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri	513	7,6
2.	Swasta	884	13,4
3.	Petani	25	0,4
4.	Buruh	529	7,8
5.	Pelajar	2.209	32,2
6.	Mahasiswa	78	1,1
7.	Lain-lain	2.544	37,5
J u m l a h		6.782	100

Sumber : Kantor KOTIF Jayapura

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sekitar sepertiga dari jumlah penduduk adalah mahasiswa dan pelajar, hampir sepertiga dari jumlah penduduk adalah pekerja berbagai bidang dan sekitar sepertiganya lagi adalah anak-anak, orang tua yang sudah tidak bekerja lagi dan para penganggur.

Agama-agama yang dianut oleh penduduk Kelurahan Numbai adalah Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Jumlah penganut dari masing-masing agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 6
PENDUDUK KELURAHAN NUMBAI BERDASARKAN AGAMA

No.	A g a m a	Jumlah	Persentase
1.	Islam	4.190	61,80
2.	Katolik	272	4,01
3.	Protestan	2.268	33,40
4.	Hindu	52	0,80
J u m l a h		6.782	100

Sumber : Kantor Kelurahan Numbai, 1992

Tabel di atas menunjukkan bahwa penganut agama Islam di Kelurahan Numbai adalah yang terbesar. Mereka adalah para pedagang di Pasar Ampera yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Pasar Ampera terletak

di RW III yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Penganut agama Islam lainnya tersebar di tempat-tempat lain.

7. Kehidupan ekonomi.

Pusat kegiatan ekonomi Kota Jayapura terletak di Kelurahan Numbai. Sarana perekonomian yang berupa pasar, kios atau toko dan warung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL II. 7
SARANA PEREKONOMIAN DI KELURAHAN NUMBAI

RW	Pasar	Toko / Kios	Warung	Koperasi
I	1	12	10	1
II				
III		236		
IV				
V	1	25	10	
VI				
	2	365	20	1

Sumber : Kantor Kelurahan Numbai, 1992

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana perekonomian yang berupa toko dan kios terpusat di RW III.

Seperti di wilayah lain di Kota Jayapura, warga masyarakat dapat dikategorikan ke dalam kelas orang yang kaya sekali, kaya, cukup, kurang dan kurang sekali. Pembagian ini berdasarkan anggapan yang ada dalam masyarakat sendiri.

C. Berbagai Permasalahan Kota

Permasalahan yang terdapat di Kota Jayapura meliputi masalah kependudukan, perumahan kumuh, kriminal, kesempatan kerja, Wanita Tuna Susila (WTS), kenakalan remaja.

Masalah kependudukan yang cukup menonjol di Kota Jayapura adalah urbanisasi. Dengan faktor pendorong dan penarik, penduduk desa-desa di sekitar kota membanjiri Jayapura. Sebagian urbanisasi ini menimbulkan masalah berupa

timbulnya perumahan kumuh yang tidak sehat. Ini jelas dapat menjadi sumber berjangkitnya penyakit. Rumah-rumah yang dibangun di lereng-lereng bukit apabila tidak terkendali pada akhirnya akan menimbulkan erosi dan tanah longsor. Tempat-tempat di Kota Jayapura dimana terdapat perumahan kumuh adalah di Kloofkamp, pantai Hamadi, Dok IX. Sedangkan rumah-rumah yang dibangun di lereng-lereng bukit menyebar di berbagai bukit di Jayapura.

Masalah lain yang juga merupakan masalah di Kota Jayapura adalah masalah kriminal. Data yang diperoleh dari POLRES (Kepolisian Resort) 1701 Jayapura pada tahun 1992 menunjukkan bahwa semua jenis kejahatan cenderung meningkat. Jenis-jenis kejahatan yang meningkat itu adalah pencurian berat, pencurian biasa, pencurian ringan, pemabukan dan perkosaan.

Jumlah pencari kerja yang tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Jayapura adalah sebanyak 5.008. Para pencari kerja ini dari semua jenjang pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah pencari kerja pada tahun 1992 yang tidak terdaftar tentu tidak dapat diketahui.

Masalah Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Jayapura merupakan masalah yang sulit di atasi. Menurut Dinas Sosial Jayapura, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya WTS meliputi rendahnya pendidikan, lemahnya ekonomi, adanya konflik dalam keluarga dan ketidakpuasan dalam kehidupan seks. Lokasi prostitusi di Kota Jayapura antara lain di Tangga Seribu, Hamadi Tanjung, Pasar Ampera dan di sekitar terminal.

BAB III

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN NUMBAI

A. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga

Penelitian yang dilakukan terhadap 42 rumah tangga di Kelurahan Numbai menunjukkan jenis-jenis limbah keluarga yaitu sisa makanan, pembungkus (kertas atau daun), kantong plastik, kaleng, beling, botol, kaca, benda plastik, benda logam, cairan kimia, kotoran ternak, daun, rumput, tekstil, karton, karet, kulit.

Untuk mengatasi limbah keluarga ini penduduk menempuh beberapa cara yaitu dibakar, dikubur, dibuang ke tempat sampah di muka rumah, dibuang ke tempat penampungan sampah umum, dan dibuang ke sungai.

Di samping di atasi oleh keluarga masing-masing, warga masyarakat juga membayar petugas dari seksi kebersihan Kantor Walikota. Dengan gerobak atau truk sampah itu diangkut untuk dimusnahkan. Warga kota yang membuang sampahnya ke tempat sampah di depan rumah hanya terdapat pada daerah perumahan yang teratur. Penduduk yang tinggal dekat sungai cenderung membuang sampah ke sungai terutama mereka yang tidak memiliki pekarangan yang cukup luas.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat orang membuang sampah sembarangan. Tiga orang informan pelaku memberikan keterangan sebagai berikut :

Informan pertama mengatakan bahwa tidak cukup tersedia sarana pembuangan sampah menyebabkan orang membuang sampah di sembarang tempat.

Informan kedua mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah umum di daerah pemukiman selalu penuh karena tidak diangkut secara teratur. Di samping itu orang-orang yang sepantasnya memberikan contoh yang baik justru berlaku sama saja.

Informan ketiga mengatakan bahwa telah tersedia dana untuk menangani sampah tetapi para petugas tidak melaksanakannya dengan baik.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1979 telah mengatur tentang pembuangan sampah. Dalam Peraturan Daerah itu ditegaskan bahwa tidak boleh membuang segala jenis sampah (termasuk mobil rongsokkan dan puntung rokok) di jalan umum, di tempat umum, di gedung atau kantor dan di pekarangan. Peraturan ini bertujuan agar pembuangan sampah tidak menimbulkan kerugian, gangguan pada

orang atau barang, mengganggu kebersihan dan keindahan. Selanjutnya peraturan daerah ini juga mengatur tentang keharusan bagi kantor, toko, warung makan, bioskop, gedung pertemuan menyediakan tempat sampah yang dapat dengan mudah dilihat dan didatangi oleh orang yang memerlukannya.

Sebagian warga masyarakat mematuhi peraturan ini sedangkan sebagian warga masyarakat tidak mematuhi. Adapun alasan warga masyarakat mematuhi peraturan ini adalah :

Pertama, alasan kesehatan; dengan lingkungan yang sehat maka akan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. **Kedua**, alasan keindahan; lingkungan yang bersih akan nampak indah. Sedangkan warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan ini memberikan alasan : pertama, tidak ada sarana untuk membuang sampah karena tidak punya pekarangan untuk membakar sampah; kedua, orang lain juga membuang sampah sembarangan.

B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Sosial

Kegiatan sosial di Kelurahan Numbai meliputi kegiatan keagamaan, keamanan, kesehatan, kerja bakti, olah raga dan kedukaan.

Di samping kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti gereja dan mesjid, ada pula kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah-rumah berupa pengajian atau kebaktian rumah tangga. Ada pula kegiatan berupa Sekolah Minggu untuk anak-anak, dan latihan paduan suara gereja oleh para remaja. Mereka mencari dana, antara lain melalui kegiatan berupa bazar yang dilaksanakan di halaman gereja. Partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan sosial ini pada umumnya dilakukan dengan sukarela. Tingkat partisipasi, dalam kegiatan keagamaan pada umumnya tinggi, karena mereka beranggapan kegiatan ini merupakan suatu kewajiban.

Pada awal digalakkannya Sistem Keamanan Lingkungan, diberbagai tempat didirikan pos-pos keamanan lingkungan. Warga masyarakat turut aktif dalam menjaga lingkungannya sendiri. Namun lama kelamaan, semangat menjaga lingkungan sendiri mulai mengendor. Warga masyarakat yang tidak aktif lagi memberikan alasan bahwa kegiatan itu dapat mengganggu pekerjaan karena setelah semalam suntuk tidak tidur esok harinya tidak dapat bekerja. Di samping dianggap dapat mengganggu pekerjaan, dikhawatirkan pula penyakit malarianya kambuh. Ada pula warga masyarakat yang sebenarnya ingin aktif, tetapi karena kawan-kawan seregunya mulai tidak aktif lagi maka mereka pun pada akhirnya

tidak aktif pula. Hanya sebagian kecil warga masyarakat yang tetap aktif dalam turut serta menjaga keamanan lingkungannya. Ada beberapa alasan keikutsertaan dalam keamanan lingkungan. **Pertama**, mereka beranggapan bahwa menjaga keamanan lingkungan adalah kewajiban warga negara; **kedua**, takut ditegur atau harus membayar semacam denda; **ketiga**, senang begadang dan dapat memperluas pergaulan. Pada saat ini pos keamanan yang aktif hanya sekitar sepertiga saja. Adapun kewajiban jaga malam ini mulai jam 11 malam sampai jam 5 pagi, diatur secara bergiliran sekitar 10 sampai 14 hari sekali.

Aktivitas sosial dalam bidang kesehatan adalah aktivitas warga masyarakat dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Warga masyarakat yang datang ke Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) adalah dari lapisan bawah, sedangkan warga masyarakat dari lapisan menengah ke atas lebih suka pergi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) atau ke dokter praktek. Mereka yang ikut dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) adalah dengan alasan untuk kesehatan ibu dan anak. Sedangkan mereka yang tidak ikut dalam kegiatan di POSYANDU karena dapat mengatasi masalah kesehatan dengan pergi ke PUSKESMAS atau dokter praktek. Tingkat partisipasi warga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan POSYANDU adalah tinggi karena disadari benar manfaatnya bagi yang dilayani sedangkan bagi yang melayani aktivitasnya dianggap perbuatan amal.

Kerja bakti hanya dilakukan kalau ada prakarsa dari Ketua RT, Ketua RW atau instruksi dari kelurahan. Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan pemukiman diikuti oleh warga masyarakat. Hambatan dalam menggerakkan kerja bakti adalah kesibukan kerja warga masyarakat yang tidak sama. Dalam suatu lingkungan pemukiman terdapat pegawai negeri, pegawai perusahaan, pedagang, sopir dan sebagainya yang jam kerjanya tidak sama.

Jika diselenggarakan pada hari Minggu, hanya sebagian warga masyarakat yang libur sedangkan sebagian lagi yaitu pegawai toko, pemilik kios, sopir tetap bekerja. Bagi yang tidak bekerja hari Minggu digunakan untuk pergi ke gereja, rekreasi, mengunjungi kerabat atau kenalan atau istirahat saja di rumah.

Partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan olah raga terutama diikuti oleh para remaja. Partisipasi remaja dalam kegiatan olah raga cukup tinggi karena di samping dianggap sebagai rekreasi juga melalui olah raga dapat memperluas pergaulan. Jenis olah raga yang banyak diminati dalam suatu lingkungan pemukiman adalah bola volly. Bola volly banyak diminati karena tidak memerlukan tempat yang luas, dapat diikuti oleh pria dan wanita serta biayanya murah.

Apabila ada anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka warga masyarakat di sekitar rumah duka akan memberikan bantuan secara spontan dan sukarela. Bantuan yang diberikan dapat berupa benda atau tenaga. Bantuan itu dapat berupa uang, makanan, atau barang yang dipinjamkan. Untuk acara kebaktian atau malam penghiburan bagi orang Kristen misalnya, orang membantu mengatur kursi, memasang tenda dan sebagainya. Seringkali peti jenazah dibuat di rumah duka oleh kerabat atau tetangga. Orang juga ikut sibuk membuat karangan bunga dari kertas.

C. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan

Disiplin terhadap administrasi pemerintahan meliputi :

1. melaporkan dan mengurus surat kelahiran
2. melaporkan kematian
3. melaporkan perkawinan
4. memiliki surat jalan jika akan bepergian
5. melaporkan jika ada tamu lebih dari 24 jam
6. melaporkan adanya penghuni baru
7. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. memperpanjang masa berlakunya KTP
9. melaporkan kepindahan

Untuk peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian penduduk melaporkannya kepada Ketua RT, Ketua RW, pejabat Kantor Kelurahan dan pejabat Kantor Kecamatan. Surat jalan hanya diperlukan jika bepergian dengan kapal laut. Karena mereka mengetahui tanpa surat jalan tidak dapat pergi dengan kapal laut, penduduk memperhatikan hal ini. Penduduk mentaati ketentuan ini karena khawatir dicurigai sebagai pelarian atau mendapat kesukaran dalam perjalanan. Pada umumnya warga masyarakat tidak melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW jika di rumahnya ada tamu lebih dari 24 jam. Mereka beranggapan bahwa tamu yang menginap adalah suatu hal yang biasa dan tidak perlu dilaporkan. Ketentuan harus melaporkan tamu dianggap hal yang kurang menyenangkan karena memberi kesan dicurigai. Ketentuan itu memberi kesan seolah-olah warga masyarakat berhubungan dengan orang yang tidak baik. Mereka berkomentar, jika tamu tidak membuat masalah mengapa harus lapor ?

Di Kelurahan Numbai, penduduk yang berusia di atas lima belas tahun harus mempunyai KTP. Kebijakan ini berdasarkan pertimbangan bahwa mereka sering melakukan aktivitas perjalanan ke luar daerah. Penduduk yang berusia lima belas tahun ke atas adalah 4.559 orang, tetapi hanya 50% saja yang

memiliki KTP. Adapun alasan tidak memiliki KTP adalah :

- a. Memiliki kartu identitas yang sejenis dengan KTP yaitu kartu pelajar, kartu mahasiswa, kartu pegawai dan SIM;
- b. Melemahnya fungsi kontrol dari Ketua RW;
- c. Sebagian penduduk menganggap bertempat tinggal di Kelurahan Numbai hanya sementara saja;
- d. Tidak ada sanksi yang tegas bagi warga masyarakat yang tidak memiliki KTP;
- e. Kurang koordinasi antara aparat Kantor Kelurahan dengan Ketua RW dan RT dalam pendayaan penduduk.

Menurut ketentuan yang berlaku, masa berlakunya KTP adalah dua tahun. Agar mudah diingat, masa berlakunya jatuh pada hari ulang tahun pemilik KTP itu. Banyak penduduk yang tidak mematuhi ketentuan ini dengan alasan lupa, dan sibuk. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini karena KTP lama ternyata masih dapat digunakan.

Penduduk yang pindah ke Kelurahan Numbai atau yang pindah ke daerah lain jarang yang mengurus surat pindah. Surat pindah akan diurus jika ternyata ada kepentingan yang terhambat.

Warga masyarakat datang ke Kantor Kelurahan untuk mengurus surat jalan (jika akan bepergian dengan kapal laut), melapor penghuni baru, melapor perkawinan dan kematian, memperbaru KTP, serta masalah lain yang berhubungan dengan Kantor Kelurahan.

D. Hubungan Ketetanggaan

Masalah-masalah yang terdapat dalam hubungan antar tetangga adalah masalah-masalah :

- pertengkaran di antara anak-anak
- penanganan limbah keluarga
- air

Salah satu masalah yang dapat mengganggu hubungan ketetanggaan adalah masalah pertengkaran di antara anak-anak. Pertengkaran anak-anak pada umumnya timbul jika ada anak mengganggu anak lain ("*bikin gara*"), anak yang cenderung ingin menguasai anak lain, atau anak yang ingin menang sendiri. Orang tua berusaha menasehati anak-anaknya agar dapat bermain dengan baik, sebab jika tidak demikian, anak-anak itu tidak mempunyai teman bermain.

Kadang-kadang pertengkaran di antara anak-anak melibatkan orang tua mereka. Namun kebanyakan orang tua berusaha menahan diri. Jika pertengkaran itu tidak dapat di atasi, barulah diselesaikan oleh Ketua RT.

Masalah lain yang juga dapat mengganggu hubungan ketetanggaan adalah masalah penanganan limbah keluarga. Penanganan limbah keluarga yang kurang baik akan mengganggu tetangga. Gangguan itu dapat berupa pemandangan yang kurang sedap, bau yang tidak enak dan sebagainya. Orang juga harus memperhatikan tetangganya bila akan membakar sampah, jangan sampai asapnya mengenai pakaian yang sedang dijemur oleh tetangga.

Masalah yang paling serius yang dapat mengganggu hubungan ketetanggaan adalah masalah air. Menurut Badan Pengelola Air Minum, hanya 57% penduduk yang dapat dilayani air minum. Sebagai akibat terbatasnya kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) memenuhi kebutuhan masyarakat maka air dialirkan secara bergiliran. Hubungan ketetanggaan akan terganggu jika ada warga yang menyedot air ledeng dengan penyedot listrik. Ada pula warga masyarakat yang membuka sambungan pipa agar dapat menyumbat sehingga air ke rumahnya mengalir.

Pengelompokkan warga masyarakat di Kelurahan Numbai adalah berdasarkan persamaan-persamaan yang ada pada kelompok yang terbentuk itu. Persamaan-persamaan itu meliputi persamaan asal daerah, pekerjaan dan agama. Orang-orang yang mempunyai kesamaan tersebut cenderung untuk mengelompok. Orang-orang yang berasal dari suatu daerah cenderung untuk membentuk kelompok kedaerahan. Dengan mengelompok itu mereka dapat mempertahankan identitas kelompok dengan berbicara bahasa daerahnya, dapat menyelenggarakan upacara adat (misalnya upacara perkawinan) dapat mengetahui keadaan di daerahnya berdasarkan informasi dari orang yang baru datang atau baru kembali ke kampung halamannya. Contoh pengelompokkan berdasarkan asal daerah ini adalah warga masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sekitar 95% penduduk RW III Pasar Ampara berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka tidak hanya berasal dari daerah yang sama, tetapi juga menempati wilayah pemukiman yang sama, mereka juga beragama yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama yaitu sebagai pedagang. Pengelompokkan yang berdasarkan pekerjaan yang sama, wilayah pemukiman yang sama, adalah warga RW V Makodam. Mayoritas penduduk RW V adalah anggota ABRI dan rumah sakit tentara. Walaupun anggota ABRI itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, tetapi karena pekerjaan dan tempat tinggal yang sama menyebabkan kecenderungan untuk membentuk suatu kelompok. Interaksi di luar pekerjaan lebih banyak

dilakukan di antara mereka. Kelompok lain yang berdasarkan asal daerah yang sama dan pekerjaan yang sama serta tinggal menetap di wilayah yang sama adalah orang-orang Cina. Mereka secara fisik dapat dibedakan pula dari penduduk lainnya. Walaupun jumlahnya sedikit mereka menguasai perdagangan di Kota Jayapura. Sebagian dari mereka bertempat tinggal di tempat usahanya yaitu di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Percetakan. Baik melalui pengamatan maupun informasi dari Kantor Kelurahan Numbai, penduduk pribumi Irian di kelurahan ini sedikit. Mereka bekerja sebagai pegawai negeri, ABRI, karyawan perusahaan, petani dan pedagang hasil bumi di pasar. Mereka terdiri dari berbagai suku bangsa.

Stereotipe yang muncul di Kelurahan Numbai adalah dalam hubungan dengan kelompok-kelompok etnik. Orang Irian mempunyai stereotipe tentang orang Jawa sebagai orang yang suka bekerja keras, tabah dalam usaha, ulet, orang yang miskin di Jawa dan mencari makan di Irian, orang Jawa juga dianggap tidak jujur. Orang Irian mempunyai stereotipe tentang orang Bugis-Makassar sebagai orang yang kreatif, pandai menggunakan kesempatan, ulet, tidak jujur. Orang Irian menganggap orang Cina sebagai manusia yang hidupnya hanya cari duit saja, tidak turut serta membangun Irian, tidak mau tahu keadaan orang Irian. Hanya orang Cina yang aktif dalam kegiatan gereja yang mempunyai kepedulian terhadap orang Irian. Orang-orang pendatang mempunyai stereotipe tentang orang Irian hampir seragam, yaitu pemabuk, pemalas, ingin segera mendapat hasil tanpa kerja keras, tidak tabah dalam usaha, jujur, tegas, solidaritas diantara mereka cukup tinggi.

BAB IV

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN NUMBAI

A. Disiplin di lingkungan Pasar / Pertokoan

Pasar Ampera terletak memanjang di pinggir sungai Anafre. Apabila kita memasuki pasar dari arah Jalan Ahmad Yani, setelah melewati jembatan, deretan sebelah kiri adalah pedagang barang kelontong dan sebelah kanan adalah pedagang bahan makanan. Di deretan barang kelontong terdapat pedagang barang pecah belah, alat rumah tangga, pakaian jadi, sepatu dan kain. Sedangkan di deretan pedagang bahan makanan terdapat pedagang sayur-mayur, ikan, buah-buahan, daging, dan bumbu. Para pedagang barang kelontong juga tinggal menetap di pasar ini. Sekitar 95% pedagang di pasar Ampera adalah orang Bugis-Makassar. Sebagian pedagang sayur-mayur adalah orang Irian.

Oleh karena pasar Ampera juga merupakan tempat tinggal, maka jenis sampah yang dibuang adalah sampah rumah tangga dan sampah pasar. Sampah itu dibuang ke tempat sampah umum, kemudian diangkut oleh petugas untuk dibuang. Tetapi karena frekuensi pengangkutan sampah itu kurang, maka sering kali terdapat tumpukan sampah yang bau busuk dan menjijikan. Keadaan ini mengakibatkan sebagian orang segan untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah umum dan lebih baik membuangnya ke sungai saja.

Pasar Ampera terletak di daerah aliran sungai Anafre di kaki deretan perbukitan. Keadaan ini mengakibatkan daerah yang datar sangat sempit. Dari tahun ke tahun tampaknya jumlah pedagang bertambah banyak sedangkan lokasi untuk berjualan tetap. Akibatnya pasar ini makin terasa sempit dan bangunan untuk berjualan dan sekaligus sebagai tempat tinggal makin padat. Akhirnya sebuah lapangan basket dijadikan tempat berjualan juga. Para pedagang yang menetap di pasar ini tentu tidak mempunyai halaman untuk membakar sampah, sehingga jika tidak dibuang ke tempat sampah umum, pilihan lain adalah dibuang ke sungai. Akibatnya sungai menjadi kotor dan dangkal. Bila hujan besar sungai ini berpeluang untuk banjir.

Hubungan antara petugas pasar dengan para pedagang berjalan dengan baik karena masing-masing menyadari bahwa sama-sama mencari nafkah di pasar. Kesukaran yang dialami oleh petugas pasar hanya mengatur para pedagang yang jumlahnya semakin banyak. Akhirnya para pedagang ini sudah berjualan di luar daerah pasar, yaitu di pinggir jalan menuju pasar. Petugas pasar tidak mengalami kesukaran dalam menarik retribusi dari para pedagang.

Pedagang di pasar Ampera dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pedagang tetap dan pedagang tidak tetap. Pedagang tetap adalah pedagang yang setiap hari berjualan di pasar. Pedagang tetap ada yang bertempat tinggal di pasar dan ada pula yang bertempat tinggal di luar pasar. Pedagang yang bertempat tinggal di pasar adalah pedagang barang-barang kelontong. Pedagang bahan makanan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu pedagang yang menempati bangunan semi permanen, pedagang yang berjualan dengan menggunakan tenda dan pedagang yang menaruh barangnya di tanah dengan alas karung. Pedagang yang menaruh barangnya di atas tanah adalah pedagang yang tidak tetap. Mereka hanya datang di pasar kalau akan menjual barangnya. Mereka adalah petani yang menjual hasil pertaniannya langsung kepada konsumen.

Para pembeli di pasar Ampera dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu pembeli tetap dan pembeli tidak tetap. Pembeli tetap adalah ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari berbelanja bahan makanan. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar pasar. Mereka telah mengenal para pedagang tetap di pasar itu. Pembeli tidak tetap adalah pembeli yang sewaktu-waktu saja berbelanja di pasar ini. Para pembeli ini ada yang datang ke pasar hanya untuk berbelanja bahan makanan, ada yang berbelanja barang kelontong. Tentu saja ada pula yang datang ke pasar hanya untuk melihat-lihat saja atau membandingkan harga-harga barang di sini dengan di toko-toko Cina.

Para pedagang tetap berusaha agar dagangannya laku terjual dengan memberikan pelayanan yang baik dan berusaha agar dapat langganan sebanyak mungkin. Menurut mereka para pembeli ibu-ibu rumah tangga banyak tawar-menawar dan suka pilih-pilih barang. Para pembeli yang cenderung lekas membayar harga yang disebutkan pedagang adalah bapak-bapak yang tampannya pegawai kantor. Para pedagang biasanya menaikkan harga bila calon pembelinya adalah bapak-bapak yang tampaknya seperti "bos".

Tata tertib yang berlaku di pasar meliputi :

- keharusan membayar retribusi
- keharusan membuang sampah pada tempatnya
- keharusan menjual barang di tempat yang telah ditentukan (dikelompokkan berdasarkan barang yang di jual dan tidak menghalangi penjual lain)
- tidak mengganggu ketertiban umum (misalnya mabuk).

Pelanggar tata tertib itu biasanya ditegur oleh petugas pasar atau oleh sesama pedagang. Sedangkan yang mengganggu ketertiban umum seperti mabuk, akan ditangkap oleh Polisi.

Di daerah pertokoan di Kelurahan Numbai - yaitu di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Matahari terdapat toko-toko (termasuk dua supermarket) serta usaha-usaha bidang jasa. Usaha-usaha bidang jasa di daerah pertokoan ini meliputi foto studio, foto copy, penjahit, rumah makan, hotel, bank, tukang cukur, dokter, laboratorium klinik, notaris dan salon kecantikan. Sedangkan di depan toko-toko itu berjajar pula para pedagang kaki lima seperti tukang emas, pedagang arloji, kaca mata, sepatu, pakaian, rokok, tukang obat serta pedagang buah-buahan. Sedangkan para penjual bahan bacaan (koran, majalah, buku dan kalender) yang semula berjualan di depan toko kini di tempatkan di sebuah gang dan di tempat yang khusus untuk menjual bahan bacaan. Para pedagang kaki lima itu ada yang berjualan sejak pagi tetapi ada pula yang berjualan sore dan malam hari saja.

Untuk memperindah kota, di sepanjang jalan, di depan toko-toko terdapat pot-pot bunga besar. Namun bunga-bunga itu tidak terpelihara dan pot itu juga dipenuhi sampah-sampah. Di samping pot bunga ada pula tong-tong sampah. Namun di samping orang membuang sampah ke tong sampah, juga dibuang di sembarang tempat. Di sepanjang trotoar terdapat parit yang tertutup. Ada bagian dari parit itu yang memang terbuka karena rusak dan ada pula ditutup dengan besi yang berlubang-lubang. Dari bagian parit yang terbuka itu dapat terlihat bahwa parit itu juga penuh dengan sampah, yang walaupun airnya tetap mengalir tetapi tentu tidak selancar kalau parit itu bebas sampah. Dengan semakin bertambahnya pedagang kaki lima jelas trotoar tempat pejalan kaki akan menjadi lebih sempit. Sekarang di sepanjang trotoar itu dapat juga dilihat para penjual undian Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

B. Disiplin di lingkungan Terminal

Terminal taksi terletak di Kelurahan Numbai sebelah timur di pinggir sungai Anafre. Luas terminal ini kurang lebih 2.054 m². Di dalam terminal ini terdapat beberapa bangunan seperti Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), tempat tunggu penumpang, rumah makan, WC dan kios. Di dalam terminal ini juga terdapat pedagang kaki lima yaitu pedagang buah-buahan, sirih pinang, ikan asar (asap), sayuran dan pisang goreng. Sebagian pedagang kaki lima ini mulai berjualan sore sampai malam hari. Rumah makan dan kios buka dari pagi sampai malam hari.

Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) di terminal ini berlantai dua. Di lantai dua terdapat pengeras suara untuk petugas menyampaikan pengumuman kepada orang-orang yang berada di terminal, juga

petunjuk atau perintah kepada para sopir dalam usaha menertibkan arus kendaraan. Di sudut terminal terdapat WC dan kamar mandi umum. Pengguna fasilitas umum ini dipunguti biaya Rp. 100,- untuk hajat kecil dan Rp. 200,- untuk mandi atau hajat besar. Bangku-bangku di tempat tunggu selalu penuh dengan orang yang duduk-duduk dan orang yang tidur. Karena tempat duduk ini pada siang hari juga dipakai untuk tidur, maka sebagian orang terpaksa menunggu keberangkatannya dengan berdiri saja. Sebagian sopir dan kenek taksi menunggu giliran mengangkut penumpang dengan duduk-duduk sambil mengobrol di bawah tenda plastik tempat orang berjualan kue dan kopi.

Ada enam jurusan yang dilayani taksi dari terminal, yaitu jurusan kota, Bhayangkara, Angkasa, Tanjung Ria, Hamadi dan Abepura. Taksi yang melayani jurusan yang keluar kota hanya satu jurusan yaitu jurusan Abepura. Jarak terpendek yang ditempuh taksi di Kota Jayapura adalah jurusan kota. Taksi Kota hanya melayani penumpang yang jaraknya tidak jauh dari terminal, yaitu ke Kloofkamp, APO dan kembali ke terminal. Taksi kota ini melalui jalan-jalan di daerah pertokoan.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura menunjukkan bahwa jumlah taksi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 menunjukkan kenaikan. Sejalan dengan penambahan taksi itu bertambah pula pendapatan pemerintah daerah melalui retribusi. Di bawah ini dicantumkan tabel yang menunjukkan perkembangan itu.

TABEL IV. 1
JUMLAH TAKSI DAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Nomor	Tahun	Jumlah Taksi	Jumlah Penerimaan Retribusi
1.	1985	217	Rp. 19.530.000,-
2.	1986	283	Rp. 25.457.000,-
3.	1987	288	Rp. 26.820.000,-
4.	1988	316	Rp. 28.440.000,-
5.	1989	434	Rp. 39.060.000,-
6.	1990	462	Rp. 31.500.000,-
7.	1991	530	Rp. 38.730.000,-
8.	1992	597	Rp. 40.650.000,-

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura

Untuk ketertiban di terminal maka telah diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Semua taksi harus menempati tempat-tempat sesuai dengan jurusannya.
2. Taksi yang datang ke terminal lebih dulu mendapat kesempatan untuk mengangkut penumpang lebih dulu. Jadi untuk mengangkut penumpang taksi-taksi itu harus antri.
3. Taksi yang mendapat kesempatan untuk mengangkut penumpang, tetapi supirnya tidak ada di tempat akan diganti oleh taksi yang antri di belakangnya.
4. Taksi yang dicarter dapat langsung mengangkut penumpang tanpa harus mengikuti antrian.
5. Taksi-taksi harus melalui jurusan yang telah ditentukan (nomor jurusan tertulis pada kaca depan taksi itu).
6. Jumlah penumpang tergantung besarnya taksi. Taksi yang paling besar maksimal mengangkut 13 penumpang, yang sedang mengangkut 8 penumpang, sedangkan taksi yang tempat duduk di belakang sopir saling berhadapan mengangkut 10 orang penumpang. Jumlah penumpang tersebut seluruhnya ditambah dengan satu orang sopir dan seorang kenek.
7. Barang yang di tempatkan di tempat duduk penumpang dihitung berdasarkan tempat yang dipakai oleh barang itu. Jika mengambil tempat untuk dua orang, maka harus dibayar untuk dua orang.
8. Anak yang dipangku tidak dikenai ongkos taksi.
9. Khusus taksi jurusan ke Abepura terdiri dari dua jalur, yaitu jalur yang menuju ke pasar Abepura dan jalur yang menuju ke Padang Bulan.

Berdasarkan pengamatan, banyaknya penumpang di terminal tidak selalu sama. Pada hari-hari kerja, jumlah penumpang yang paling banyak adalah sekitar jam 7 pagi dan sekitar jam 1 siang. Pada jam-jam itu banyak anak sekolah yang menggunakan taksi. Sekitar jam 7 pagi banyak orang yang bepergian untuk bekerja. Jumlah penumpang akan membanyak pada tanggal-tanggal muda dan menjelang hari raya (Natal, Tahun Baru dan Lebaran). Pada hari libur sekolah, jumlah penumpang taksi yang terlihat di terminal juga berkurang. Banyaknya taksi di terminal juga tidak tetap. Pada hari Natal dan Lebaran banyak taksi yang digunakan oleh pemiliknya sendiri. Pada saat ada kapal penumpang yang akan masuk di pelabuhan Jayapura atau akan berangkat, banyak taksi yang dicarter oleh calon penumpang kapal laut itu.

Tingkat disiplin di terminal Jayapura nampaknya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan sebagai berikut :

- Sampah tampak dimana-mana. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya tong sampah untuk umum tetapi juga karena tidak adanya kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya.
- Sebagian taksi dicuci di terminal sehingga halaman terminal becek. Apa lagi karena aspal sudah rusak sebagian tempat di terminal berlumpur.
- Tempat duduk calon penumpang dipakai tidur sehingga calon penumpang tidak dapat menggunakannya.
- Belum adanya budaya antri. Calon penumpang berebutan untuk masuk lebih dahulu ke dalam taksi.

Keadaan tersebut di atas nampaknya sudah dianggap hal yang biasa saja. Nampaknya tidak ada pihak-pihak yang berusaha mengatasi hal ini. Sedangkan pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana dikemukakan di atas sanksinya hanya berupa teguran saja.

C. Disiplin di Bioskop

Di Kelurahan Imbi ada dua buah gedung bioskop yaitu *Imbi Teater* di Jalan Irian dan *Jayapura Teater* di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kapasitas bioskop ini masing-masing menampung 300 tempat duduk. Film yang dipertunjukkan di kedua bioskop ini adalah film Indonesia, Barat, Mandarin dan India. Harga karcis rata-rata Rp. 2.500,-. Mayoritas penonton adalah orang-orang yang berumur antara 15 sampai 30 tahun (dilihat dari penampilan fisiknya). Rata-rata jumlah kursi yang terisi adalah sepertiganya (kurang lebih seratus). Pada tanggal-tanggal muda dan hari Sabtu penonton biasanya bertambah banyak. Demikian juga jika ada film yang dianggap baik; penonton akan bertambah banyak sampai sekitar dua pertiga dari jumlah tempat duduk.

Penonton memperoleh karcis dengan langsung membeli di loket. Tidak ada kebiasaan untuk antri. Siapa saja yang berhasil lebih dulu berada di depan loket itulah yang lebih dulu menyodorkan uangnya. Oleh karena jumlah penonton tidak pernah membengkak maka tidak ada calo. Pembeli karcis hanya berdesak-desak sebentar di depan loket.

Peraturan-peraturan di bioskop meliputi :

1. Umur penonton. Ada film untuk semua umur, 13 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas.

2. Setiap penonton harus memiliki karcis.
3. Pada waktu masuk ruang pertunjukkan setiap penonton harus memegang karcisnya sendiri (tidak dipegang oleh orang lain).
4. Penonton dilarang merokok dalam ruangan bioskop.
5. Penonton dilarang membuang sampah sembarangan.
6. Penonton harus menduduki kursi sesuai dengan nomor yang tertulis pada karcis.

Keadaan disiplin di bioskop adalah sebagai berikut :

- a. Pembatasan umur tidak dipatuhi, baik oleh penonton maupun oleh petugas.
- b. Masih ada penonton yang merokok dalam ruang bioskop.
- c. Di dalam gedung bioskop, penonton masih ada yang membuang sampah sembarangan.
- d. Ada juga penonton yang menduduki kursi tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada karcisnya.

Kecuali untuk pembatasan umur, pelanggaran terhadap peraturan tersebut hanya berupa teguran oleh petugas bioskop saja.

D. Disiplin di Jalan Raya

Trotoar di daerah pertokoan telah dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk mencari nafkah. Dengan demikian maka trotoar itu untuk pejalan kaki menjadi sempit, sehingga para pejalan kaki tidak dapat berjalan cepat atau santai. Walaupun telah diusahakan untuk membebaskan trotoar dari pedagang kaki lima, namun usaha itu belum berhasil. Bahkan berdasarkan pengamatan selaku warga Jayapura, nampaknya pedagang kaki lima ini kian hari kian banyak. Hal ini dapat diketahui karena tempat-tempat yang semula tidak digunakan oleh pedagang kaki lima kini telah di tempati mereka. Di samping pedagang kaki lima yang hanya menempati bidang trotoar yang sempit sekitar satu meter persegi ada pula pedagang kaki lima yang menempati bidang trotoar cukup luas yaitu sekitar tiga meter persegi. Para pedagang kaki lima yang banyak memakan tempat adalah para pedagang sepatu, pakaian dan bahan bacaan.

Di daerah pertokoan parkir kendaraan telah teratur. Ada petugas yang mengatur parkir sesuai dengan tempat parkir yang telah ditentukan. Untuk kemudahan dan kerapian, di tempat parkir telah dibuat garis-garis pada aspal dan kendaraan yang diparkir itu harus searah dengan garis-garis itu. Jalan-jalan di daerah pertokoan dilalui kendaraan hanya dari satu arah. Tempat parkir adalah di sebelah kiri jalan. Tempat parkir yang teratur hanya ada di Jalan Jenderal

Ahmad Yani dan Jalan Irian saja. Di daerah lain, yaitu Jalan Percetakan tempat parkirnya tidak teratur karena di bagian-bagian tertentu di jalan itu tidak ada batas yang tegas antara trotoar dan jalan. Oleh karena ketinggian trotoar sama dengan jalan mobil, maka kendaraan yang diparkir seringkali berada di trotoar. Keadaan ini jelas mengganggu pejalan kaki. Kadang-kadang pejalan kaki harus berjalan di jalan mobil di belakang kendaraan yang diparkir. Bagi pejalan kaki di sini ada perasaan kurang aman karena kendaraan yang lewat umumnya dalam kecepatan yang agak tinggi. Pengaturan jalan satu arah mengakibatkan kecenderungan para pengemudi untuk mempercepat kendaraannya.

Mengenai tingkat disiplin di jalan raya dapat digambarkan dengan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 1991 jumlah pelanggaran adalah 4.799 yang menghasilkan denda sebanyak Rp. 17.501.700,-. Pada tahun 1992 sampai bulan November, terjadi penurunan pelanggaran yang tajam, yaitu 1.811 orang dan menghasilkan denda sebanyak Rp. 8.191.330,-. Pelanggaran peraturan lalu lintas itu termasuk pelanggaran administrasi seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan ijin trayek. Pada tahun 1992 sampai November 1992 pelanggaran administrasi yang tercatat adalah : pelanggaran SIM 191, pelanggaran STNK 95 dan pelanggaran ijin trayek 35 orang. Pada tahun 1992 sampai bulan November telah terjadi 32 kali kecelakaan lalu lintas, 14 orang luka berat dan 24 orang luka ringan. Kerugian yang diderita kecelakaan ini adalah sebesar Rp. 35.280.000,-.

BAB V

UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota dilakukan oleh para petugas pemerintah dan tokoh masyarakat. Para petugas pemerintah yang turut serta membina disiplin itu adalah para petugas dari Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Walikota, Dinas Sosial, DLLAJR, Kepolisian dan Departemen Penerangan. Tokoh masyarakat yang turut serta membina disiplin adalah para tokoh wanita, pemuda dan agama. Tokoh-tokoh wanita melakukan pembinaan disiplin melalui organisasi kewanitaan seperti Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan POSYANDU. Tokoh-tokoh pemuda melakukan pembinaan disiplin melalui organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna. Tokoh-tokoh agama melakukan pembinaan disiplin melalui kegiatan keagamaan seperti kebaktian, pengajian dan khotbah sembahyang-Jumat.

Adapun sasaran pembinaan dapat bersifat umum dan khusus. Sasaran yang bersifat umum adalah keseluruhan warga masyarakat dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, pekerjaan dan kelompok etnik. Sedangkan yang bersifat khusus adalah sasaran pembinaan dari kelompok khusus seperti kaum wanita, remaja dan pemuda.

Ada berbagai cara yang dilakukan untuk melaksanakan pembinaan disiplin. Cara-cara pembinaan disiplin yang dilakukan terhadap warga masyarakat Kota Jayapura adalah :

- a. melalui tatap muka
- b. melalui tulisan
- c. melalui radio
- d. melalui pengeras suara yang dibawa mobil keliling kota
- e. melalui acara panggung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Pembinaan disiplin dengan cara tatap muka dilakukan oleh para petugas pemerintah dan tokoh masyarakat langsung bertatap muka dengan warga masyarakat. Pembinaan dengan cara ini dapat dilakukan di tempat pemukiman, di Kantor Kelurahan dan di tempat-tempat ibadah. Pembinaan dengan cara ini biasanya merupakan kerjasama para petugas pemerintah dan tokoh masyarakat. Kebaikan dari cara tatap muka ini adalah materi pembinaan akan lebih mudah dipahami oleh warga masyarakat karena para hadirin diberi kesempatan untuk bertanya. Dalam kesempatan ini pula warga masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau usul sehubungan dengan materi yang disampaikan. Pembinaan disiplin dengan cara ini nampaknya lebih efektif dari pada melalui cara-cara lain. Kendala dalam mengadakan

pembinaan disiplin dengan cara ini adalah kesibukan kerja warga masyarakat yang sangat bervariasi. Waktu pembinaan dengan cara ini biasanya dilakukan pada sore hari. Hanya sebagian kecil warga masyarakat yang dapat menghadirinya. Warga masyarakat yang bekerja sampai sore hari seperti misalnya karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu tidak dapat menghadiri acara ini. Di samping itu sebagian warga masyarakat pada sore hari masih bekerja seperti misalnya karyawan toko, para pedagang, sopir dan kenek taksi dan pengusaha bidang jasa (seperti penjahit, tukang cukur, karyawan hotel, karyawan laboratorium klinik dan sebagainya). Acara pembinaan disiplin tidak dapat dilakukan pada hari Minggu karena pada hari itu sebagian besar warga masyarakat pergi ke gereja, kemudian berkunjung pada kerabat atau kenalan atau pergi berekreasi. Sebagian warga masyarakat tetap tinggal di rumah untuk istirahat, nonton televisi atau melakukan pekerjaan rumah tangga.

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota juga dilakukan melalui tulisan. Pembinaan disiplin dengan cara ini ada dua macam, yaitu yang menggunakan spanduk yang terbuat dari kain dan ada yang menggunakan papan. Spanduk dan papan ini dipasang di tempat-tempat yang strategis mudah dilihat orang. Pembinaan dengan cara ini hanya dapat menyampaikan pesan-pesan melalui kalimat-kalimat yang singkat saja.

Radio Republik Indonesia (RRI) Studio Jayapura turut serta dalam pembinaan disiplin warga kota dengan dua cara, yaitu melalui acara yang disebut *Warung Pinang* dan pesan-pesan singkat yang disisipkan menjelang warta berita jam tujuh pagi. Acara *Warung Pinang* berupa obrolan yang dibawakan secara jenaka dengan bahasa Indonesia khas Irian. Acara ini diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu pagi.

Ada pula pembinaan disiplin yang menggunakan pengeras suara yang dibawa mobil keliling kota. Dengan cara ini pesan-pesan dapat didengar oleh warga masyarakat yang ada di jalan, di tempat kerja dan di rumah yang dilalui oleh mobil itu. Pesan-pesan itu dibaca berulang-ulang atau berupa rekaman.

Sebelum pemutaran film, biasanya dimulai dengan mempromosikan film yang akan diputar beberapa hari kemudian dan juga disampaikan pesan tertulis yang berisi pembinaan disiplin. Pesan-pesan yang disampaikan berupa kalimat-kalimat padat dan singkat saja.

Hampir setiap bulan di Taman Imbi diselenggarakan panggung KAMTIBMAS. Taman Imbi terletak di daerah pertokoan seluas kurang lebih 2.400 meter persegi. Di taman ini terdapat patung Yos Sudarso yang terbuat dari logam setinggi tujuh meter. Panggung KAMTIBMAS biasanya diselenggarakan pada bulan muda hari

Sabtu. Pada waktu itu banyak warga kota yang berbelanja di pusat pertokoan atau hanya berjalan-jalan saja. Banyak orang yang hilir mudik sehingga di trotoar tampak berdesak-desak. Pada panggung KAMTIBMAS itu ditampilkan pagelaran musik pop. Acara musik ini diselingi dengan lawak yang juga menyampaikan pesan-pesan kedisiplinan warga kota. Acara hiburan gratis ini banyak menarik para pengunjung terutama kaum muda.

Frekuensi pembinaan disiplin pada masyarakat kota dapat dikategorikan ke dalam pembinaan yang tetap dan pembinaan yang sewaktu-waktu saja. Pembinaan yang relatif tetap adalah pembinaan melalui radio, tulisan, panggung KAMTIBMAS dan tempat-tempat ibadah. Sedangkan yang tidak tetap adalah pembinaan tatap muka di pemukiman, kantor pemerintah, terminal, pasar, bioskop dan di jalan umum (melalui pengeras suara yang dibawa oleh mobil). Kadang-kadang ada pula kegiatan yang mengarah ke pembinaan disiplin yang dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT). Hari Ulang Tahun ini dapat berupa perayaan hari-hari nasional atau hari ulang tahun instansi tertentu. Pada Hari Ulang Tahun (HUT) itu disamping acara pokok berupa upacara biasanya ada serangkaian kegiatan yang menyertainya. Kegiatan-kegiatan itu biasanya berupa olah raga, memberikan sumbangan (donor darah, sumbangan untuk yatim piatu dan panti jompo) dan kerja bakti. Kerja bakti biasanya berupa kerja membersihkan lingkungan pemukiman, kantor atau tempat-tempat umum. Ada atau tidak adanya kegiatan kerja bakti pada suatu Hari Ulang Tahun (HUT) tentu tergantung dari kebijaksanaan panitianya. Dengan demikian pembinaan disiplin dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) dimasukkan ke dalam kegiatan yang sewaktu-waktu saja.

Jangkauan sasaran pembinaan disiplin tentu bervariasi. Sarana pembinaan adalah warga kota yang beraneka berdasarkan kelompok etnik, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, umur dan lokasi pemukiman. Berdasarkan keaneka masyarakat kota tersebut, maka jangkauan sasaran pembinaan yang paling luas adalah melalui radio dan tulisan. Pembinaan disiplin dengan cara-cara lain lebih terbatas. Pembinaan disiplin melalui cara tatap muka di lingkungan pemukiman, tempat ibadah, kantor pemerintah, pasar dan terminal lebih terbatas. Dikatakan lebih terbatas karena hanya sekelompok orang tertentu yang berkesempatan mendapat pembinaan pada saat itu. Sebagai contoh misalnya kegiatan pembinaan di POSYANDU terbatas untuk ibu-ibu yang mengikuti kegiatan itu. Demikian pula pembinaan di tempat ibadah hanya terbatas pada orang yang mengikuti ibadah; sedangkan pembinaan di Kantor Kelurahan terbatas pada orang yang mau datang ke Kantor Kelurahan. Pembinaan yang dilakukan petugas di pasar dan terminal melalui pengeras suara terbatas pada orang-orang yang pada saat itu berada di pasar dan terminal. Pembinaan disiplin

kepada para pemuda terutama melalui Karang Taruna, KNPI, panggung KAMTIBMAS dan bioskop. Pembinaan melalui pengeras suara yang dibawa oleh mobil tentu terbatas pada daerah yang dilalui oleh mobil itu.

Materi pembinaan disiplin dalam garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. materi tentang kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. materi pembinaan tentang ketaatan terhadap peraturan;
- c. materi tentang hubungan sosial.

Materi pembinaan disiplin tentang kebersihan biasanya dihubungkan dengan keimanan, kesehatan dan bencana. Diungkapkan bahwa hidup yang bersih merupakan sebagian dari iman atau dengan kata lain orang yang beriman hidupnya akan bersih. Orang yang hidupnya bersih akan mendapat manfaat di dunia berupa kesehatan dan kenyamanan hidup. Sebagai bagian dari iman, hidup yang bersih akan mendapat pahala di akhirat. Diungkapkan pula bahwa tidak ada agama yang menganjurkan hidup kotor. Pembinaan disiplin dalam penanganan sampah juga dihubungkan dengan kesehatan. Dijelaskan bahwa lingkungan yang penuh dengan sampah merupakan lingkungan yang tidak sehat. Sampah adalah salah satu sumber penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari sampah adalah penyakit malaria dan penyakit perut. Sampah yang berupa kaleng atau botol yang kehujanan akan merupakan tempat berkembangnya nyamuk malaria. Tumpukan sampah yang tidak terkena sinar matahari secara langsung juga merupakan tempat nyamuk. Menurut catatan Rumah Sakit Umum Jayapura, angka kematian yang tertinggi di Kota Jayapura adalah disebabkan penyakit malaria. Dalam kesempatan berobat di rumah sakit atau di PUSKESMAS atau di dokter praktek kadang-kadang dijelaskan kepada pasien agar tidak menganggap enteng penyakit malaria. Akibat dari penyakit malaria di samping menurunkan produktivitas kerja juga dapat menimbulkan kematian. Sedangkan anak-anak yang terlalu sering mendapatkan penyakit malaria akan mengakibatkan kebodohan yang bersifat tetap. Sampah juga dianggap sebagai sumber dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui lalat. Di samping sebagai sumber penyakit penanganan sampah yang tidak baik dapat menjadi sumber bencana banjir karena orang membuang sampah ke sungai dan ke parit. Pada waktu hujan besar air di sungai dan di parit yang penuh dengan sampah itu meluap. Akhirnya penanganan sampah yang tidak baik akan mengganggu kenyamanan dan sampah yang berserakan akan mengganggu keindahan. Slogan yang diajukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat Kota Jayapura dalam penanganan sampah adalah: *Jadikanlah Jayapura kota BERIMAN (Bersih, Indah, Nyaman).*

Slogan ini terpampang di tempat-tempat yang strategis termasuk tertulis pada tirai para pedagang makanan di pinggir jalan, seperti misalnya para pedagang makanan

(nasi, bakso, sirop, tahu lontong) di depan kantor Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).

Materi pembinaan disiplin terhadap peraturan biasanya dihubungkan dengan :

- kewajiban warga negara untuk mentaati peraturan;
- kerugian yang akan diderita warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan.

Diungkapkan bahwa setiap warga negara wajib untuk mematuhi semua peraturan. Peraturan itu dibuat demi untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran aktivitas warga masyarakat itu sendiri. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP. Warga masyarakat wajib melaporkan tamu yang berada disuatu rumah lebih dari dua puluh empat jam. Warga masyarakat bepergian dengan kapal laut wajib mempunyai surat keterangan jalan. Peraturan Pemerintah (Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 2 tahun 1979 Bab III Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15) secara jelas memperinci peraturan tentang pembuangan sampah. Peraturan itu menegaskan larangan membuang semua jenis sampah di jalan umum, di tempat-tempat umum, di kantor-kantor, di gedung pertemuan umum dan di pekarangan, kecuali di tempat yang disediakan untuk itu. Setiap kantor, toko, warung, gedung bioskop, gedung pertemuan umum harus menyediakan tempat untuk membuang sampah di tempat yang mudah terlihat dan mudah didatangi oleh orang-orang yang memerlukannya. Warga masyarakat yang datang untuk menjadi penduduk disuatu pemukiman harus membawa surat pindah dan memiliki KTP di tempat itu. Warga masyarakat yang keluar pindah harus mengurus surat pindah. Untuk mengurus surat-surat tertentu harus melalui RT, RW, pejabat Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan. Penonton bioskop harus mematuhi peraturan tentang batas umur dan peraturan tata tertib penonton. Pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar dan menyeberang di tempat penyeberangan. Pengemudi harus membawa SIM, STNK dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pembinaan disiplin lalu lintas diungkapkan melalui spanduk dengan tulisan :

- Jadikan Irian Jaya sebagai propinsi tertib lalu lintas;
- Budayakan tertib berlalu lintas.

Bagian yang biasanya diungkapkan dalam pembinaan disiplin warga masyarakat kota adalah kerugian yang akan diderita oleh warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Kerugian ini akan diderita baik oleh warga masyarakat yang melanggar maupun warga masyarakat lainnya yang tidak ikut serta melanggar peraturan. Para pembina masyarakat itu biasanya mengungkapkan kerugian ini dengan disertai contoh kongkrit. Sebagai contoh, warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tentang kewajiban memiliki KTP akan mengalami kerugian berupa, hambatan dalam

mengurus surat-surat penting seperti ijin usaha, sertifikat tanah dan sebagainya. Juga akan mengalami hambatan untuk mendapatkan pekerjaan yang harus melalui lamaran. Apabila mengalami kecelakaan di jalan, pihak keluarga korban sulit dihubungi dan dapat menghambat bantuan dari keluarga.

Warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan bioskop akan mengalami kerugian sendiri. Jika yang dilanggar adalah peraturan tentang batas umur, maka yang akan dirugikan adalah si pelanggar dan masyarakat. Kerugian itu berupa kenakalan remaja. Sedangkan pelanggaran di gedung bioskop akan merugikan penonton karena akan mengganggu kenyamanan penonton.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas akan merugikan si pelanggar sendiri dan bahkan dapat pula merugikan pemakai jalan lainnya. Kerugian itu dapat berupa kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat merugikan orang-orang yang tidak berdosa. Akibat dari kecelakaan lalu lintas ini dapat berupa pengeluaran biaya untuk perawatan dan pengobatan, cacat seumur hidup, gangguan psikis, meninggal dunia dan kerugian material. Pihak kepolisian juga mengingatkan para pemakai jalan bahwa keluarga mereka menanti di rumah dengan harapan bahwa anggota keluarganya akan selamat selama perjalanan. Peraturan yang berhubungan dengan administrasi kendaraan bermotor ditekankan pula pada pajak kendaraan bermotor. Ditekankan bahwa pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan dan sebagainya.

Materi pembinaan disiplin dalam suatu pemukiman ditekankan pada kerukunan antar warga masyarakat. Ditekankan bahwa warga masyarakat harus membina hubungan baik dengan tetangganya. Harus berperilaku yang tidak merugikan orang lain. Demikian pula warga masyarakat harus turut serta dalam kegiatan bersama untuk kepentingan bersama. Kegiatan bersama itu seperti misalnya kerja bakti dalam membersihkan lingkungan pemukiman, kegiatan dalam mengisi acara perayaan hari kemerdekaan (membuat gapura, pertandingan olah raga, hadir dalam upacara dan ikut serta dalam permainan rakyat) dan berpartisipasi dalam kegiatan POSYANDU. Dalam pembinaan ini diungkapkan tentang kerugian orang yang tidak memelihara kerukunan dengan tetangganya. Ia mungkin akan dikucilkan, mungkin akan digosipkan dan mungkin pula tidak akan ditolong bila menghadapi kesukaran. Diungkapkan pula bila terjadi musibah, maka yang pertama-tama akan menolong adalah tetangga sendiri bukan kerabat yang tinggal jauh. Diungkapkan pula tentang kerugian yang akan diderita masyarakat jika tidak turut serta dalam kegiatan bersama untuk kepentingan bersama, contohnya keikutsertaan dalam menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat akan merasa tenang, tentram dan aman bila keamanan terjaga baik. Sebaliknya jika keadaan keamanan lingkungan tidak baik, maka warga

masyarakat akan merasa tidak aman, bahkan ada warga masyarakat yang menderita kerugian akibat keadaan yang tidak aman itu. Ditekankan pula bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

Pembinaan disiplin terhadap peraturan penanganan sampah, administrasi pemerintah, peraturan lalu lintas dan keamanan lingkungan dilakukan oleh para petugas pemerintah. Para tokoh agama lebih menitik beratkan pada kerukunan antar warga masyarakat. Tokoh pemuda lebih menitik beratkan disiplin dalam berorganisasi, sedang wanita lebih menitik beratkan pada masalah kerukunan suami isteri, kesehatan dan pendidikan anak.

Hasil dari upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota, khususnya di daerah penelitian, dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan masih kurang berhasil sehingga tingkat disiplin masyarakat kota masih rendah. Mengenai kedisiplinan masyarakat kota dapat dikenali sejumlah faktor yang mempengaruhinya.

Tingkat disiplin dalam penanganan sampah di daerah pemukiman masih rendah, terutama di daerah pemukiman kumuh dan di sekitar sungai Anafre. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor :

- a. pekarangan yang sempit dan bahkan ada rumah tanpa pekarangan sehingga mempersulit penanganan sampah yang baik;
- b. tempat pembuangan sampah kurang tersebar, sehingga dirasakan oleh sebagian penduduk terlalu jauh ke tempat pembuangan sampah umum;
- c. sampah yang bertumpuk di tempat pembuangan sampah jarang diangkut oleh petugas, sehingga menimbulkan perasaan enggan untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah umum.

Salah satu akibat dari keadaan tersebut di atas adalah adanya sebagian warga masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Anafre.

Tingkat disiplin warga masyarakat dalam kegiatan keagamaan, peristiwa terjadinya musibah, kegiatan POSYANDU dan olah raga cukup tinggi; sedangkan dalam kegiatan SISKAMLING dan kerja bakti masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya disiplin dalam kegiatan SISKAMLING adalah :

- a. kesibukan warga kota dalam mencari nafkah, sehingga kegiatan ini dianggap dapat mengganggu usahanya;
- b. sebagian warga masyarakat menganggap bahwa dirinya tidak pantas mengikuti kegiatan ini karena status sosialnya terlalu tinggi;
- c. kegiatan ini dapat diwakilkan kepada orang lain atau dengan memberi imbalan materi kepada orang yang bersedia turut serta dalam kegiatan ini.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya disiplin dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan adalah :

- a. kesibukan warga kota dalam mencari nafkah, dimana waktu kegiatan kerja bakti bersamaan dengan waktu untuk mencari nafkah.

Dalam bidang administrasi pemerintahan, tingkat disiplin warga masyarakat masih rendah dalam hal melaporkan jika ada tamu lebih dari 24 jam dan pemilikan serta pergantian KTP. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya disiplin dalam melaporkan adanya tamu lebih dari 24 jam adalah :

- a. peraturan itu seolah-olah memberi kesan bahwa warga yang didatangi tamu itu patut dicurigai; sehingga timbul keengganan untuk melaporkan kedatangan tamunya;
- b. warga masyarakat beranggapan bahwa mereka akan melaporkan kepada yang berwajib jika tamunya menimbulkan masalah;
- c. bagi warga masyarakat kota yang sibuk, peraturan itu dianggap terlalu merepotkan.

Tingkat disiplin dalam hal pemilikan dan pergantian KTP masih rendah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. adanya kartu identitas lain yang fungsinya sama dengan KTP, sehingga pemilikan KTP dianggap kurang perlu;
- b. unsur kelupaan, sehingga KTP tidak diganti pada waktunya.

Disiplin hubungan ketetanggaan cukup baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung hubungan baik ini adalah adanya kesadaran bahwa bila ditimpa musibah, maka tetanggalah yang pertama-tama akan memberikan pertolongan. Sedangkan faktor yang terutama dapat mengganggu hubungan ketetanggaan adalah masalah air minum. Masalah ini relatif mudah diatasi jika kebutuhan air warga masyarakat dapat dipenuhi dengan baik dan lancar.

Disiplin dalam penanganan sampah di pasar, daerah pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya adalah rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disiplin ini adalah :

- a. kurangnya tempat pembuangan sampah umum yang mudah dilihat dan mudah didatangi;
- b. tempat sampah umum yang ada tidak terawat dan sampahnya tidak secara teratur diangkut sehingga tempat sampah itu kurang berfungsi karena sampah tetap tertumpuk di tempatnya;

- c. kedua hal tersebut lebih mendorong orang untuk membuang sampah secara sembarangan karena enggan mendatangi tempat sampah yang menjijikan.

Peraturan pembatasan umur di bioskop kurang dipatuhi oleh petugas. Kekurang-disiplinan ini disebabkan karena :

- a. mempertahankan pendapatan bioskop yang telah mendapat saingan dari acara televisi;
- b. langkanya film anak-anak, sedangkan anak-anak juga membutuhkan hiburan di bioskop sehingga terpaksa petugas melonggarkan peraturan pembatasan umur.

Halaman terminal yang seharusnya digunakan untuk mengangkut dan menurunkan penumpang seringkali juga digunakan untuk tempat mencuci mobil. Hal ini disebabkan karena para supir merasa enggan untuk pergi ke tempat mencuci mobil yang terletak sekitar dua puluh kilo meter dari Kota Jayapura, yaitu di Jembatan Dua (Kecamatan Sentani).

Sampai saat ini masalah pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar belum dapat diatasi. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan masalah ini adalah :

- a. tidak ada tempat yang dapat dianggap strategis untuk pedagang kaki lima;
- b. sebagai akibat dari urbanisasi dan migrasi penduduk ada kecenderungan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima.

Disiplin warga kota di jalan raya juga masih rendah yang ditunjukkan dengan jumlah pelanggaran peraturan lalu lintas, pelanggaran peraturan administrasi lalu lintas (SIM, STNK, ijin trayek) serta kecelakaan lalu lintas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya disiplin ini adalah :

- a. suasana hidup di perkotaan yang kompetitif cenderung mendorong orang untuk bertindak cepat; tindakan ini tercermin dalam perilaku berkendara yang mengabaikan peraturan lalu lintas;
- b. adanya kepatuhan semu yaitu hanya patuh pada peraturan bila ada Polisi saja.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya pembinaan disiplin telah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai cara baik melalui tatap muka, tulisan, radio, pengeras suara, slide maupun dengan acara panggung KAMTIBMAS. Adapun daerah yang dijadikan sasaran pembinaan disiplin itu adalah di daerah pemukiman dan di lingkungan tempat-tempat umum seperti di lingkungan pasar, pertokoan, terminal, bioskop dan di jalan raya. Pembinaan disiplin ini meliputi disiplin dalam penanganan limbah keluarga (sampah), partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, hubungan ketetanggaan, serta disiplin di lingkungan pasar, pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya. Materi pembinaan disiplin pada dasarnya meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, kepatuhan terhadap peraturan dan hubungan sosial yang baik antar warga masyarakat sehingga partisipasi dalam kegiatan sosial cukup baik.

Dari data yang telah dikemukakan ternyata bahwa tingkat disiplin warga masyarakat cukup baik dalam partisipasi kegiatan keagamaan, POSYANDU, olah raga, peristiwa terjadinya musibah dan hubungan ketetanggaan. Sebaliknya tingkat disiplin dalam penanganan limbah keluarga (sampah), administrasi pemerintahan, disiplin di lingkungan pasar, pertokoan, terminal, bioskop dan jalan raya adalah rendah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat disiplin itu adalah sebagai berikut :

- a. Sarana yang berupa bak sampah dan tong sampah jumlahnya masih kurang dan juga kurang tersebar secara merata;
- b. Pemerintah belum mampu mengangkut sampah secara teratur sehingga di tong dan bak sampah selalu terlihat menumpuk;
- c. Heterogenitas dalam pekerjaan dan pelapisan sosial merupakan kendala dalam partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial;
- d. Adanya peraturan yang dianggap warga masyarakat sebagai sesuatu yang hanya merepotkan warga masyarakat saja;
- e. Kartu Tanda Penduduk yang dapat digantikan fungsinya dengan kartu identitas lain;
- f. Kebutuhan akan hiburan di bioskop tidak diimbangi dengan penyediaan film anak-anak yang memadai;

- g. Tidak disediakannya tempat khusus untuk pedagang kaki lima sehingga mereka menempati trotoar untuk tempat mencari nafkahnya;
- h. Derasnya arus urbanisasi yang menimbulkan perumahan kumuh dengan segala masalahnya;
- i. Kehidupan kota yang kompetitif cenderung mendorong individu untuk bertindak yang mengabaikan kepentingan umum.

S A R A N

Untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat di lingkungan pemukiman dan di tempat-tempat umum diajukan saran-saran sebagai berikut :

Penanganan sampah

- a. Tempat-tempat pembuangan sampah umum (bak dan tong) diperbanyak jumlahnya dengan penyebaran yang merata di seluruh wilayah kota baik di lingkungan pemukiman maupun di tempat-tempat umum, sehingga dengan demikian maka warga kota akan mudah membuang sampahnya di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- b. Sampah yang telah dibuang warga kota pada tempat-tempat yang telah ditentukan agar diangkut setiap hari oleh petugas untuk dibuang (dibakar) di tempat pembuangan terakhir, sehingga dengan demikian warga kota tidak akan merasa enggan untuk mendatangi tempat pembuangan sampah umum.
- c. Agar peraturan pemerintah tentang pembuangan sampah dilaksanakan dengan menghukum siapa saja yang melanggar peraturan itu, karena selama peraturan itu tidak dilaksanakan, maka selama itu pula disiplin penanganan sampah tidak dapat ditingkatkan.
- d. Para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat perlu memperlihatkan contoh yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dengan demikian proses peningkatan disiplin terhadap penanganan sampah akan berjalan dengan cepat. Sebagai contoh misalnya saja tidak merokok di tempat yang tidak tersedia asbak atau tempat sampah.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial

- a. Para pejabat pemerintah agar tidak memandang masyarakat kota seperti masyarakat desa. Masyarakat kota berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat desa relatif homogen, mayoritas pendidikan formal yang rendah, lebih mudah dikumpulkan untuk melakukan kegiatan bersama. Masyarakat kota mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan masyarakat desa, sehingga tidak mudah

dikumpulkan untuk melakukan kegiatan bersama. Berdasarkan karakteristik masyarakat kota, maka untuk kegiatan sosial yang berupa menjaga keamanan lingkungan dan kerja bakti membersihkan lingkungan dapat diajukan dua alternatif. Pertama, untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan (tuna karya) dengan diberi imbalan upah yang diperoleh dari iuran warga masyarakat. Dengan cara ini orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan diberi pekerjaan dan dirasakan tidak mengganggu orang yang sibuk mencari nafkah. Kedua, untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan pemukiman ditangani oleh warga masyarakat. Jika ditangani oleh warga masyarakat, maka pembinaannya harus dilakukan terus menerus agar pada akhirnya dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang baik. Perlu diatur kriteria orang-orang yang wajib mengikuti kegiatan ini. Kriteria ini dirumuskan berdasarkan musyawarah.

Kewajiban melaporkan kedatangan tamu

Sebaiknya kewajiban ini dihapuskan dan lebih baik dengan cara mengintensifkan penjagaan keamanan lingkungan.

Kartu Tanda Penduduk

Selama ada kartu identitas lain-seperti kartu mahasiswa, SIM, yang dapat menggantikan fungsi KTP, maka selama itu pula sulit mendisiplin warga masyarakat untuk memiliki KTP. Dengan demikian maka agar warga masyarakat mentaati kewajiban memiliki KTP dan kartu mahasiswa. Untuk menunjang peraturan wajib memiliki KTP, semua instansi pemerintah harus mempunyai kebijaksanaan yang sama. Misalnya mahasiswa yang ingin berobat di PUSKESMAS, ia harus menunjukkan kartu mahasiswa dan KTP agar dapat dilayani sebagai warga negara yang statusnya mahasiswa. Demikian pula jika ia berurusan dengan instansi lain.

Pembatasan umur bagi penonton bioskop

Agar peraturan pembatasan umur bagi penonton bioskop dapat lebih mudah dilaksanakan, maka film untuk anak-anak perlu mendapat perhatian. Perlu ada keseimbangan frekuensi pemutaran film untuk semua umur, 13 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas baik film nasional maupun film impor. Pada masa libur anak-anak sekolah, pemutaran film untuk semua umur dan 13 tahun ke atas frekuensinya diperbesar.

Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar perlu ditertibkan. Hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan perlu dilindungi. Caranya adalah dengan penataan kota yang lebih baik, kepada mereka perlu diberikan tempat khusus yang strategis di daerah pertokoan. Dengan diberikannya tempat khusus kepada mereka, maka tidak akan ada alasan untuk berjualan di luar tempat yang telah ditentukan.

Perumahan kumuh

Perumahan kumuh yang kurang sehat, kurang nyaman, serta kurang sedap dipandang mata perlu penertiban. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. perlu dibangun pemukiman rumah sangat sederhana dengan sanitasi yang baik yang dilengkapi dengan fasilitas hidup berupa listrik dan air bersih;
- b. peraturan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu dilaksanakan secara bijaksana, sehingga berangsur-angsur semua bangunan di kota didirikan berdasarkan IMB yang mempertimbangkan keamanan, keindahan dan kesehatan.

Pedagang pribumi

Untuk para pedagang pribumi, seperti para pedagang non-hasil bumi di pasar Ampara, perlu diberi tempat yang baik dan strategis. Mereka perlu dipandang sebagai aset nasional dalam bidang perekonomian, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berkembang. Salah satu cara untuk turut serta mengembangkan mereka adalah dengan membangun pusat perbelanjaan.

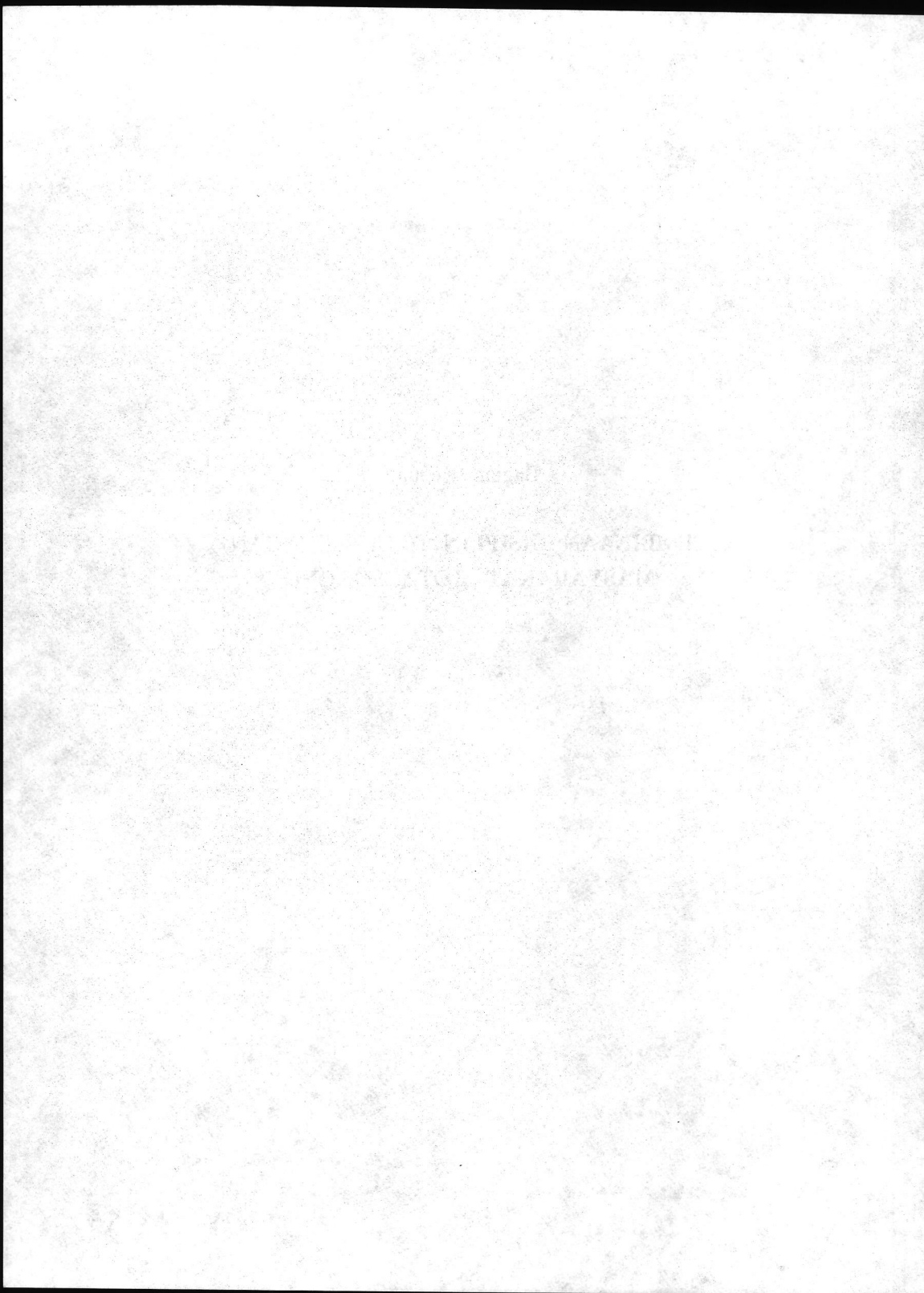
Pembinaan disiplin pada umumnya

Untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat kota pada umumnya, disarankan agar :

- a. menanamkan disiplin murni pada generasi baru dalam keluarga karena pengaruh pendidikan orang tua cukup berpengaruh terhadap perilaku anak dikemudian hari;
- b. oleh karena pada umumnya orang Indonesia berorientasi vertikal, maka para pembesar dan tokoh masyarakat perlu memberi teladan hidup yang berdisiplin;
- c. menciptakan perangsang yang tepat yang mendorong warga masyarakat untuk berdisiplin serta memberi hukuman kepada para pelanggar disiplin;
- d. pembinaan disiplin dilaksanakan secara terus menerus sehingga diharapkan pada akhirnya disiplin murni menjadi bagian dari hidupnya yang tumbuh dari kesadaran perlunya mematuhi peraturan dan bukan karena takut akan pengawasan.

Bagian Kedua

**PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT KOTA SORONG**



BAB VII

GAMBARAN UMUM KOTA SORONG

1. Lokasi.

Kota Sorong merupakan ibu kota Kabupaten Sorong, letaknya di sebelah barat dari Propinsi Irian Jaya tepat pada posisi $00^{\circ} 53'$ LS dan $131^{\circ} 16'$ BT garis miridian.

Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Sorong, ialah terletak antara :

di bagian barat : tempat paling barat adalah pada posisi $01^{\circ} 00'$ LS dan $130^{\circ} 00'$ BT, berbatasan dengan Pulau Halmahera Maluku,

di bagian timur : tempat paling timur adalah pada posisi $01^{\circ} 00'$ LS dan $133^{\circ} 00'$ BT, berbatasan dengan Kabupaten Manokwari,

di bagian utara : tempat paling utara adalah pada posisi $02^{\circ} 00'$ LS dan $132^{\circ} 00'$ BT, berbatasan dengan di Samudra Pasifik, di bagian barat : tempat paling selatan adalah pada posisi $02^{\circ} 30'$ LS dan $131^{\circ} 00'$ BT, berbatasan dengan bagian selatan pulau-pulau Pisang Kabupaten Fak-fak.

Pada posisi strategisnya, Sorong merupakan kota pelabuhan terbesar di Irian Jaya, dan pada posisi itu juga kota tersebut merupakan pintu utama masuk keluarnya berbagai kapal laut dari mancanegara.

2. Pembagian Wilayah Administrasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pemekaran/pembentukan kecamatan, maka Kota Sorong yang merupakan ibu kota Kabupaten Sorong terbentuk menjadi satu wilayah kecamatan tersendiri, dengan diberi nama Kecamatan Sorong dan ibu kota kecamatannya adalah juga Sorong.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka wilayah Kecamatan Sorong Kota itu dibagi wilayah administrasinya menjadi 5 (lima) kelurahan dan 8 (delapan) desa administratif. Adapun nama-nama kelurahan dan desa administratif itu sebagai berikut :

Kelurahan

1. Rufei
2. Kampung Baru

Desa

1. Tanjung Kasuari
2. Malanu

3. Klademak
4. Remu Utara
5. Remu Selatan

3. Klasaman
4. Aimas
5. Malawili
6. Malaweale
7. Klamalu
8. Mariyai

Selanjutnya untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi persyaratan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 - 210 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut di atas, maka wilayah administrasi Kecamatan Sorong Kota dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Perwakilan Kecamatan, yaitu (1) Perwakilan Kecamatan Sorong Barat di Kampung Baru, (2) Perwakilan Kecamatan Sorong Timur di Aimas, dan (3) Perwakilan Kecamatan Aimas di Malaweale. Masing-masing Perwakilan Kecamatan itu membawahi sejumlah kelurahan dan desa administratif, sebagai berikut :

	Kelurahan	Desa
Perwakilan Kecamatan Sorong Barat	Rufei Kampung Baru Klademak	Tanjung Kasuari
Perwakilan Kecamatan Sorong Timur	Remu Utara Remu Selatan	Malanu Klasaman
Perwakilan Kecamatan Aimas		Aimas Malawili Malaweale Klamalu Mariyai

Di tingkat kelurahan dan desa administratif tersebut, wilayah kecamatan itu terbagi lagi atas sejumlah Rukun Wilayah (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

3. Batas Administrasi Desa.

Penentuan batas kelurahan ditandai dengan pembuatan pilar atau tembok. Perinciannya, Kelurahan Rufei berbatasan di sebelah timur Kelurahan Kampung Baru, di sebelah utara dengan Tanjung Kasuari, dan di sebelah barat dengan Desa Tanjung Kasuari, dan di sebelah barat dengan pantai laut Pasifik. Kelurahan Kampung Baru berbatasan di sebelah utara dengan Kelurahan Rufei, di sebelah

timur dengan Kelurahan Klademak, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sorong Doom Kecamatan Salawati, dan di sebelah barat dengan pantai laut Pasifik. Kelurahan Klademak berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Kampung Baru, di bagian sebelah timur dengan Kelurahan Remu Utara, di bagian barat dengan pantai laut Selat Sele, di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan dan pantai Selat Sele. Kelurahan Remu Utara berbatasan dengan di sebelah utara dengan Kelurahan Klademak, di bagian barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Klademak, dan di bagian timur berbatasan dengan Desa Kalanu dan Klasaman, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan. Kelurahan Remu Selatan berbatasan dengan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Aimas, di bagian sebelah barat dengan Kelurahan Klademak, di sebelah utara dengan Kelurahan Remu Utara, dan di bagian selatan berbatasan dengan pantai Selat Sele dan Desa Malawili.

Sedangkan di tingkat desa, penentuan batas desa administratif tidak mempunyai suatu tanda yang tegas seperti kelurahan. Prinsipnya didasarkan pada batas alam seperti kali/sungai, bukit, dan satuan pemukiman transmigrasi, seperti SP I, II, III, dan seterusnya.

Demikian secara keseluruhan yang termasuk ke dalam Kota Sorong, adalah di sebelah utara berbatasan di Desa Tanjung Kasuari, di sebelah timur di Desa Klasaman dan Desa Malanu, ke arah selatan di Desa Klamalu, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sorong Doom Kecamatan Salawati.

4. Jarak tempuh ke Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian.

4.1. *Jarak tempuh ke pusat pemerintahan*

Jarak tempuh ke pusat pemerintahan dimaksudkan ialah Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong. Menurut keadaan sebelum tahun 1991, Kantor Bupati tersebut berlokasi di Remu Utara yang terletak pada posisi $00^{\circ} 53'36''$ LS dan $131^{\circ} 17''$ BT. Jarak tempuh dari berbagai desa dan kelurahan di lingkungan Kota Sorong bervariasi, sebagai berikut:

TABEL VII. 1

**DAFTAR JARAK TEMPUH DALAM SATUAN KILOMETER (KM)
KE PUSAT PEMERINTAHAN DAN ANTAR DESA / KELURAHAN,
(KEADAAN SEBELUM TAHUN 1991)**

Kantor Bupati Sorong.

0.5	Kelurahan Remu Utara												
1	1.5	Kelurahan Remu Selatan											
1.5	1	2	Kelurahan Klademak										
7	6.5	7.5	6	Kelurahan Kampung Baru									
8	7.5	8.5	7	1	Kelurahan Rufeï								
14	13.5	15	13	7	5	Desa Tanjung Kasuari							
7	7.5	8	8.5	13	14	19	Desa Malanu						
8	8.5	9	10	14	15	21	7	Desa Klasaman					
17	17.5	18	18.5	24	25	31	15	8	Desa Aimas				
19	19.5	19.5	20.5	26	27	33	15	6	3	Desa Malawili			
20	20.5	20.5	21.5	27	28	34	16	8	4	3	Desa Malaweïe		
21	21.5	21.5	22.5	28	29	35	14	7	5	6	4	Desa Klamalu	
23	23.5	23.5	24.5	30	31	37	21	16	8	6	7	6	Desa Mariyai

Sedang menurut keadaan setelah Kantor Bupati Sorong pindah lokasi yang baru di Desa Klamalu pada Kilometer 24 pada tahun 1991, maka jarak tempuh dari berbagai desa / kelurahan di lingkungan Kota Sorong disebut dalam tabel 1 ke Kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan mengalami perubahan dalam satuan panjang (KM). Jarak itu bervariasi sebagai berikut (lihat tabel 2) di bawah ini.

TABEL VII. 2
DAFTAR JARAK TEMPUH DALAM SATUAN
KILOMETER (KM) KE PUSAT PEMERINTAHAN
(KEADAAN SEKARANG)

No.	Desa / Kelurahan	Jarak tempuh ke Kantor Bupati Sorong dalam KM
1.	Tanjung Kasuari	30
2.	Malanu	15
3.	Klasaman	12
4.	Aimas	9
5.	Malawili	12
6.	Malaweke	17
7.	Klamalu	3
8.	Mariyai	9
9.	Rufei	24
10.	Kampung Baru	23
11.	Klademak	18
12.	Remu Utara	17
13.	Remu Selatan	16,5

Jarak tempuh ke pusat pemerintahan (Kantor Bupati Sorong) dari berbagai desa dan kelurahan di lingkungan Kota Sorong terutama yang berada di jantung kota adalah sangat jauh, dan memang terjadi kesenjangan antar masyarakat dengan pemerintah karena adanya kesulitan angkutan umum (taxi/bus). Untuk mencapai lokasi pusat pemerintahan, maka ditempuh dengan kendaraan beroda dua yang bersifat ojek pulang pergi Rp. 15.000,-. Sebaliknya jika menggunakan angkutan umum taxi adalah tentunya bersifat charter. Ongkos pulang pergi Rp. 30.000,-, tetapi bila sekali untuk pergi saja Rp. 15.000,-. Untuk angkutan pegawai di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati disiapkan 7 (tujuh) buah bus mini milik Pemerintah Daerah Tingkat II Sorong. Situasi ini menyebabkan disiplin waktu kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati mengendor (kurang mematuhi peraturan waktu kerja), bahkan seringkali terlambat dalam tugas karena bus pegawai terlambat.

TABEL VII. 3

**DAFTAR JARAK TEMPUH DALAM SATUAN
KILOMETER (KM) KE PUSAT PEMBELANJAAN
PASAR SENTRAL SORONG**

No.	Desa / Kelurahan	Jarak tempuh dalam KM ke Pusat Pembelanjaan Pasar Sentral Sorong
1.	Tanjung Kasuari	15
2.	Malanu	8
3.	Klasaman	9
4.	Aimas	16
5.	Malawili	19,5
6.	Malaweke	20,5
7.	Klamalu	21,5
8.	Mariyai	23,5
9.	Rufei	8,5
10.	Kampung Baru	7,5
11.	Klademak	2
12.	Remu Utara	1
13.	Remu Selatan	0,4

TABEL VII. 4

**DAFTAR JARAK TEMPUH DALAM SATUAN
KILOMETER (KM) KE PUSAT PEMBELANJAAN PERTOKOAN**

No.	Desa / Kelurahan	Jarak tempuh dalam KM ke Pusat Pembelanjaan Pertokoan
1.	Tanjung Kasuari	13,5
2.	Malanu	7,5
3.	Klasaman	8,5
4.	Aimas	17,5
5.	Malawili	19,5
6.	Malaweke	20,5
7.	Klamalu	21,5
8.	Mariyai	23,5
9.	Rufei	7,5
10.	Kampung Baru	6,5
11.	Klademak	1
12.	Remu Utara	0,5
13.	Remu Selatan	1,5

Lokasi pusat pembelanjaan pertokoan terletak di Kelurahan Remu Utara.

5. Lingkungan Fisik.

5.1. Pola Pemukiman

Pola pemukiman terletak memanjang dari arah utara ke timur tenggara menyusur pantai laut Selat Sele ke daratan. Lingkungan wilayah pemukiman terbagi ke dalam kelurahan dan desa-desa seperti nama-nama tersebut di atas. Kondisinya secara berkelompok-kelompok dalam satuan-satuan pemukiman sepanjang jalan utama Kota Sorong-Klamono. Satuan-satuan pemukiman yang menjadi pusat Kota Sorong baik sebagai pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pusat lalu lintas jalan raya maupun pusat konsentrasi penduduk adalah terbagi ke dalam wilayah-wilayah kelurahan, yaitu : (1) Kelurahan Rufei, (2) Kelurahan Kampung Baru, (3) Kelurahan Klademak, (4) Kelurahan Remu Utara, dan (5) Kelurahan Remu Selatan. Panjang 9.000 meter (9 Km) dan lebarnya rata-rata 1.500 - 2.000 meter.

Tata letak bangunan baik bangunan pertokoan, perkantoran, maupun bangunan tempat tinggal yang ada di kota itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu :

- a. Bangunan perkantoran, pertokoan, maupun tempat tinggal yang terletak di pusat pertokoan tata letaknya teratur, yaitu saling berhadapan dengan dibatasi jalan-jalan raya selebar $\pm$ 6 meter atau sebaliknya bertolak belakang dan bagian depannya menghadap jalan raya, mempunyai pekarangan rumah yang cukup luas, dan pada umumnya dibangun atas rencana pemerintah.
- b. Lingkungan pemukiman baru yang berbentuk bangunan tempat tinggal yang letaknya di pinggir jalan raya dan dibangun atas keinginan penduduk itu (tanpa rencana pemerintah dan tanpa ijin membangun dari pemerintah) maupun yang dibangun sepanjang Sungai Remu tata letaknya tidak beraturan. Kondisinya tidak mempunyai pekarangan, jalan utama berbentuk gang-gang kecil (lebar 1,5 meter), ada rumah-rumah yang bagian depannya berhadapan dengan belakang rumah orang lain yang menjadi tetangga, ada rumah-rumah yang bagian depannya berhadapan dengan bagian samping rumah orang lain yang menjadi tetangganya, dan berdempet-dempet antara satu rumah dengan rumah yang lain. Bangunan yang terletak di sepanjang jalur sungai berbentuk rumah panggung yang letaknya tidak teratur. Pemilik rumah-rumah di

lingkungan ini secara dominan adalah etnis Bugis-Makassar dan beberapa kelompok penduduk pribumi Irian.

Rumah-rumah tempat tinggal di sepanjang tepi Sungai Remu di Kelurahan Remu Selatan berupa rumah-rumah kumuh, dan kondisi lingkungannya tidak sehat. Demikian pula di lingkungan Kelurahan Rufeï, letak bangunannya tidak teratur dan juga tidak sehat.

Jalan raya utama Rufeï-Remu yang panjangnya 9 Km beraspal dan kondisinya baik, tetapi kurang lebar ($\pm$ 6 meter) dan belum mempunyai trotoar. Kecuali itu jalan raya di lingkungan Kelurahan Remu Selatan sebagai lokasi pusat pembelanjaan Pasar Sentral Sorong dan terminal angkutan Taxi dan Bus (angkutan umum) kondisinya berlubang-lubang, berdebu diwaktu panas, dan menampung air dan berlumpur diwaktu hujan. Apabila diukur dari banyaknya lalu lintas kendaraan, pusat keramaian, pusat pembelanjaan, dan kepadatan penduduk Kota Sorong, seluruhnya berpusat di jalan raya yang panjangnya 9 Km dan lebarnya 6 meter itu.

Kondisi jalan raya yang ada di kota itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok menurut jenis permukaan, kondisi dan kelas jalan sebagai berikut dibawah ini.

TABEL VII. 5

**KONDISI JALAN DI KOTA SORONG MENURUT
JENIS PERMUKAAN, KONDISI DAN KELAS JALAN
TAHUN 1991**

No.	U r a i a n	1991 (KM)	Presentase
I.	Jenis Permukaan :		
	a. Diaspal	105,730	14,87
	b. Kerikil	113,760	16,00
	c. Tanah	53,325	7,50
	d. Tidak diperinci	438,185	61,63
	J u m l a h	711,00	100,00

II.	Kondisi Jalan :		
	a. Baik	51,300	7,22
	b. Sedang	54,430	7,65
	c. Rusak	65,430	9,20
	d. Rusak Berat	305,210	42,93
	e. Tidak diperinci	234,630	33,00
	J u m l a h	711,00	100,00
III.	Kelas Jalan :		
	a. Kelas II A	12,600	1,77
	b. Kelas II B	42,300	5,95
	c. Kelas II C	50,830	7,15
	d. Kelas III A	114,760	16,28
	e. Kelas IV A	-	-
	f. Kelas V	-	68,85
	g. Kelas tidak diperinci	489,510	-
	J u m l a h	711,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dati II Sorong

TABEL VII. 6

**BANYAKNYA AIR MINUM YANG DISALURKAN MENURUT
KATEGORI PELAYANAN DAN PELANGGAN TAHUN 1990**

No.	Kategori Pelayanan	Pelanggan	Banyaknya Air Minum yang disalurkan (M ³)
1.	Rumah Tempat Tinggal	3.917	759.620
2.	Hotel Losmen	9	75.316
3.	Rumah Sakit dan Badan-Badan Sosial	33	11.316
4.	Tempat Peribadatan	-	-
5.	U m u m	28	12.350
6.	Perusahaan - Perusahaan	246	13.580
7.	Instansi Pemerintah	97	71.390
8.	Kepentingan Lain	1	33.950
	J u m l a h Tahun 1989	4.331 4.033	978.216 884.555

Sumber : Badan Pengelola Air Minum (PAM) Sorong

TABEL VII. 7
PERKEMBANGAN PERUSAHAAN AIR MINUM (PAM)
KABUPATEN SORONG TAHUN 1989/1990 - 1990/1991

No.	Rincian	1989 / 1990	1990 / 1991
1.	Banyak Perusahaan Air Minum	1	1
2.	Kapasitas Produksi (dalam liter/detik)	80,0	80,0
3.	Banyaknya Pelanggan	4.033	3.331
4.	Air Minum yang disalurkan (M ³)	884.555	987.216
5.	Banyaknya Pegawai PAM	63	93
6.	Pengeluaran untuk Pekerja/Pegawai - (ribuan rupiah)	100.730	139.378

*Sumber : Badan Pengelola Air Minum (PAM) Kabupaten
 Daerah Tingkat II Sorong*

Dari data yang disajikan pada tabel VII. 6 di atas dapat diperoleh gambaran mengenai berbagai kategori pelanggan, Perusahaan Air Minum (PAM) Dinas maupun rumah tangga di Kota Sorong.

Sarana kebersihan lingkungan sesuai dengan rencana pemerintah yang terungkap dalam Program 5 K (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kekeluargaan), disiapkan fasilitas berupa bak sampah 23 buah, gerobak sampah sebanyak 3 (tiga) buah, dan mobil angkutan sampah (truk sampah) sebanyak 4 (empat) buah. Bak sampah ditempatkan di berbagai tempat-tempat umum di seluruh kelurahan, gerobak sampah 2 buah ditempatkan di Pasar Sentral Sorong di Remu Selatan, dan 1 (satu) buah lainnya ditempatkan di Pasar Rufe. Sedangkan 4 buah truk sampah, 3 beroperasi baik dan 1 (satu) buah lainnya dalam keadaan rusak.

5.2. Fasilitas Umum

5.2.1. Keamanan.

Dari data yang diperoleh dari tiga orang pejabat daerah diperoleh gambaran sebagai berikut :

Informan pertama

"Berbicara tentang keamanan, dari segi politik keadaannya 90%

aman di daerah ini. Sedangkan dari segi sosial, keadaannya tidak aman. Karena hampir setiap saat terjadi pencurian barang, pengroyokan dan penganiayaan, perzinahan, dan perkosaan. Pihak keamanan baik Polisi maupun Hansip kewalahan."

Informan kedua

"Perkara pencurian, penganiayaan, dan pengroyokan di Kota Sorong ini tinggi sekali. Dalam tahun 1991 ada 27 perkara kasus pencurian yang disidangkan di Pengadilan, penganiayaan 35 buah perkara, dan pengroyokan 12 buah perkara, dan sebagainya."

"Belum termasuk yang ringan dan biasa yang diselesaikan di Polisi secara langsung. Saya mengalami sendiri 9 kali pencurian di rumah. Saya berteriak-teriak ada pencuri, tidak ada tetangga terdekat yang keluar datang membantu. Dibandingkan dengan kebiasaan di Jawa, di Surabaya tempat yang pernah saya tugas kalau orang di sekitarnya mendengar teriakan maling-maling, orang-orang sekitarnya lari keluar secara spontan membantu memburu dan menangkapnya. Maling itu dipukul babak belur lalu diserahkan ke pihak keamanan. Di sini tidak seperti itu. Tidak ada orang tetangga yang spontan keluar untuk membantu."

Informan ketiga

"Kasus penganiayaan, pengroyokan, pencurian, perkosaan, perzinahan dan sebagainya, wah, banyak sekali. Check saja data di Kepolisian dan Pengadilan. Atau coba masuk di Lembaga Pemasyarakatan Sorong Doom dan lihat sendiri. Bukan sedikit orang yang masuk penjara di sana. Banyak sekali karena kejahatan."

Di daerah Toko Johan di Klademak III dan di sekitar Bioskop Surya di Kampung Baru itu daerah rawan. Jangan coba-coba jalan sendiri atau lewat daerah itu tengah malam. Saya mengalami sendiri, ketika dihadang sekelompok anak-anak muda untuk minta uang. Ketika itu saya kasih Rp. 10.000,- dan akhirnya saya lolos dan aman."

Demikian, maka dari segi sosial keadaannya tidak aman dalam kehidupan dan ketertiban umum. Tingkat kejahatan atau kriminalitas cukup tinggi.

Sarana keamanan yang ada di kota itu, selain dari ABRI, jumlah anggota HANSIP 430 orang, pos SISKAMLING 13 buah, pos Polisi ada 2 buah, dan sejumlah anggota-anggota Satuan Tugas Pengamanan (SATPAM) di berbagai Kantor Bank dan tempat-tempat penting lainnya. Kegiatan SISKAMLING di berbagai pos di tingkat RW-RW dan RT pada awal terbentuknya berjalan lancar, tetapi sekarang dalam dua tahun terakhir ini keadaannya sudah kurang lancar (semangat mengendor). Koordinasi dalam kegiatan keamanan keliling ini kurang terpadu dengan baik, sehingga para anggota di tingkat RT/RW kurang mematuhi peraturan kegiatan tersebut.

5.2.2. Fasilitas Kesehatan.

Usaha kesehatan yang berhasil baik akan memberikan kepercayaan dan kesadaran pada penduduk kota yang padat mengatasi lingkungannya dan memperbaiki derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan gerak pembangunan. Sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah Kota Sorong adalah sebagai berikut :

- Rumah Sakit Umum Pemerintah 1 (satu) buah dengan kapasitas tempat tidur 155 buah, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 3 buah, PUSKESMAS Pembantu 17 buah, Balai Pengobatan 5 buah, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 15 buah, Apotek 8 buah, Toko Obat 11 buah, Klinik Keluarga Berencana 10 buah.
- Dokter Umum 12 orang, Dokter Spesialis 5 orang, Dokter Gigi 4 orang, Perawat Umum 226 orang, Perawat Gigi 5 orang, Perawat Bidang 47 orang, SKM dan lain-lainnya 2 orang.

Keadaan di atas itu tidak tetap, tetapi akan terus berkembang sesuai dengan meningkatnya pembangunan dan lajunya pertambahan penduduk di Kabupaten Sorong pada umumnya, dan khususnya di daerah Kota Sorong yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Kesehatan lingkungan secara umum seperti yang diamati di lingkungan pemukiman-pemukiman penduduk di daerah Kota Sorong, pada umumnya belum baik teristimewa di daerah-daerah pinggiran kota dan daerah pasar pusat pembelanjaan dan

penjualan. Sumber-sumber air minum yang dipakai oleh penduduk sebagai pelanggan keadaannya baru mencapai 30%. Air ini dipompa langsung dari sungai dan dikonsumsi, sehingga tidak melalui proses penyaringan atau dan penjernihan (Chloronisasi).

Air-air sumur dalam Kota Sorong dan sekitarnya yang diperoleh dari saluran primer dan dipakai oleh sebagian besar penduduk kota sebagai air minum (60%) juga tidak melalui proses penjernihan (Chloronisasi). Air sungai, digunakan oleh kebanyakan penduduk yang dilalui sungai besar (Sungai Remu), dan sungai-sungai kecil, mencakup penduduk 38%. Air hujan, digunakan oleh penduduk yang tinggal di luar kota, yaitu daerah pemukiman transmigrasi, $\pm$ 30% dari penduduk. Namun dari keseluruhannya, air minum belum memenuhi persyaratan kesehatan.

Jamban keluarga kebanyakan digunakan di rumah-rumah tinggal yang terletak di pusat Kota Sorong, $\pm$ 38% dari penduduk. Penduduk yang bertempat tinggal yang dilalui sungai, di tepi pantai laut, dan rawa-rawa menggunakan jamban cemplung, $\pm$ 43% dari penduduk. Selebihnya dari penduduk yang bertempat tinggal di luar atau dipinggiran kota membuang hajat di hutan-hutan/semak-semak, dan di pantai pasir. Penduduk yang berjualan di Pasar Sentral Sorong, menggunakan jamban sewaan yang terletak di pinggir pasar. Pasar ini diupayakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sorong, yang ditangani petugas yang ditugaskan mengawasi Kebersihan Lingkungan Pasar.

5.2.3. Fasilitas Olah Raga.

Sarana olah raga berbentuk fisik yang ada berupa : Gedung Olah Raga (GOR) 1 buah, lapangan bola kaki 16 buah, lapangan volley 53 buah, lapangan bulu tangkis 12 buah, lapangan tennis 6 buah dan lapangan Hocky 1 buah. Sebagian besar ($\pm$ 70%) dari sarana olah raga itu diupayakan secara swadaya dari warga masyarakat kota itu sendiri. Kecuali itu, sarana olah raga berwujud lapangan tennis umumnya digunakan hanya terbatas di lingkungan masyarakat lapisan atas. Sarana olah raga dan lokasi

letaknya di berbagai pemukiman, diperinci pada tabel monografi Kecamatan Sorong.

5.2.4. Fasilitas Keagamaan.

Fasilitas keagamaan berupa mesjid untuk umat Islam 28 buah; gereja untuk umat Katholik 7 buah; gereja untuk umat Kristen Protestan 40 buah; vihara untuk umat Budha 1 buah; langgar 35 buah; Pondok Pesantren 2 buah. Lokasi sarana ibadah terdapat pada setiap satuan pemukiman (terlihat pada tabel monografi Kecamatan Sorong).

Fasilitas Pendidikan.

Fasilitas umum berupa sarana pendidikan untuk Kota Sorong dan sekitarnya sebagai berikut :

1. Sarana Pendidikan

- Taman Kanak-Kanak (TK) 17 buah
- Sekolah Dasar (SD) 46 buah
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama 15 buah
- Sekolah Menengah Tingkat Atas 19 buah
- Perguruan Tinggi (PT) 4 buah

2. Sarana Gedung Sekolah

- Taman Kanak-Kanak (TK), sarana gedung sekolah umumnya bersifat pinjaman dari bagian sarana ibadah (30%), dan bekas-bekas kantor (60%).
- Sekolah Dasar (SD), apabila dibandingkan dengan ratio murid yang masuk setiap tahun terus meningkat, maka keadaan sarana gedung yang tersedia daya tampungnya sangat terbatas untuk kelas-kelas paralel (ganda). Akibatnya, sebagian kelas masuk pagi pukul 07.30 dan sebagian lainnya masuk pada siang hari pukul 13.00.
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), sarana gedung sekolah yang tersedia untuk sekolah-sekolah berstatus subsidi pemerintah dinyatakan "*cukup*". Sedangkan bagi sekolah-sekolah berstatus non-subsidi (swasta penuh) belum memiliki sarana gedung tersendiri, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya menggunakan gedung pinjaman dari

Sekolah Dasar terdekat yang keadaan ruangnya kosong pada siang sampai sore hari.

- Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), keadaan sarana gedung sekolah seperti pada SMTP, dimana sekolah-sekolah yang berstatus subsidi dan negeri umumnya memiliki gedung dan fasilitasnya tersendiri, sedangkan non-subsidi atau swasta penuh belum memiliki gedung dan fasilitas tersendiri. Sarana gedung dan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya, pada umumnya bersifat pinjaman melalui Pemerintah Daerah.
- Perguruan Tinggi (PT) yang ada, sama sekali belum memiliki gedung dan fasilitas kuliah tersendiri. Fasilitas kuliahnya dari SMTA dari Yayasan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan. Perguruan Tinggi yang ada di Kota Sorong itu, berstatus swasta.

3. Tenaga Pengajar

Jumlah tenaga pengajar di sekolah-sekolah menengah masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah yang berstatus swasta sebagian besar (75%) menggunakan tenaga-tenaga pengajar tidak tetap, sehingga kurang menunjang bagi usaha-usaha pendisiplinan siswa. Ada siswa yang terlambat pada jam masuk kelas, ada yang sering kali absen, terjadi kenakalan di dalam dan di luar kelas. Dikatakan bahwa keadaan ini sering terbawa ke lingkungan masyarakat (hasil wawancara dua orang guru sebagai marginalman).

5.2.5. Transportasi.

Transportasi dimaksudkan adalah terutama transportasi lalu lintas jalan raya, karena gejala yang berkaitan dengan pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota sangat menonjol. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berwajib mengawasi dan mengontrol arus lalu lintas jalan raya di Kota Sorong (Polres dan Kantor LLAJR) bahwa kendaraan bermotor maupun manusia pejalan kaki adalah sangat padat. Unit kendaraan yang terdaftar 6.928 buah, dengan perincian kendaraan bermotor yang diuji 5.153 buah dan yang belum diuji

1.775 buah. Mobil penumpang umum (taxi) berjumlah 835 buah. Taxi jalur A dan B yang berwarna kuning beroperasi dalam kota (pusat Kota Sorong), dan yang bukan berwarna kuning beroperasi ke pinggiran Kota Sorong.

Jumlah unit kendaraan tersebut tidak stabil, karena keadaannya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Keadaan itu terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SORONG

No.	Jenis Kendaraan	1988	1989	1990
1.	Oto Bis	13	14	20
2.	Mobil Penumpang (Taxi)	773	811	835
3.	Mobil Gerobak	464	563	576
4.	Sepeda Motor	3.219	3.357	3.642
J u m l a h		4.469	4.745	5.073

Sumber : Kantor Perhubungan LLAJR dan SAMSAT Kabupaten Sorong

Perkembangan kendaraan bermotor berbanding dengan kondisi jalan raya yang panjangnya 9 Km dengan kondisinya yang tetap di pusat perkotaan, dinyatakan keadaannya sangat padat. Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor terus bertambah dari tahun ke tahun sesuai tingkat perkembangan penduduk kota dan pembangunan yang terus berkembang pesat di berbagai sektor, terutama sektor industri yang berkembang pesat di Kota Sorong ini.

5.2.6. Fasilitas Ekonomi.

Sarana perekonomian yang ada di Kota Sorong menurut data pada Kantor Kecamatan Kota Sorong tahun 1991 terdiri dari : pasar resmi 4 (empat) buah, dan pasar tidak resmi 2 (dua) buah, koperasi serba usaha 5 (lima) buah, dan koperasi pasar 3 (tiga) buah, toko 106 buah, warung/kios 561 buah, kaki lima 122 buah, jasa pariwisata (sarana sosial) terdiri dari rumah makan 34 buah, bar/diskotik 3 (tiga) buah, toko souvenir 2 (dua) buah, bioskop 6 (enam) buah, travel biro 3 (tiga) buah, tempat bilyard 6 (enam) buah, panti pijit 2 (dua) buah, coffe house 19 buah,

hotel 6 (enam) buah, dan losmen/penginapan 10 buah, industri besar (pabrik triplek) 1 (satu) buah, industri sedang 6 (enam) buah, dan industri kecil 213 buah.

Kategori industri sedang menurut klasifikasinya, adalah industri kimia yang berbentuk oksigen, alat listrik dan logam yang berbentuk galangan/dek kapal, bengkel mobil, bahan bangunan dan umum yang berbentuk percetakan, foto prosesing dan penggergajian kayu/pengolahan kayu. Sedangkan kategori industri kecil menurut klasifikasinya adalah berbentuk pengolahan bahan pangan, sandang dan kulit, bahan bangunan, kerajinan umum, dan lain-lain aneka industri kecil.

6. Lingkungan Alam.

Wilayah Kota Sorong, berbentuk *Karidor Linier* yang hanya dapat mengembang secara memanjang menyusur dataran pantai laut Sele dari arah utara ke selatan, terhubung terbatas oleh keadaan medan di bagian sebelah timur ke arah tenggara keadaan topografinya terdiri dari rangkaian bukit-bukit tinggi berfraksi pasir yang bergelombang-gelombang.

Berdasarkan peta klasifikasi tanah di Irian Jaya yang dibuat oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor dan tulisan Brookfield, cs (1971) tanah dan lokasi Sorong itu termasuk jenis *Allevium* dan gambut atau *podzolik*. Selama musim hujan, umumnya tergenang air sehingga cenderung bersifat basah sekali. Pengeringannya kurang sempurna, terdapat di rawa-rawa aluvial dan dataran pasang surut. Tanah rawa berwarna hitam dan tanah dataran rendah berwarna kuning, sehingga fraksi liat lebih dominan. Areal bergelombang yang membentuk rangkaian bukit-bukit itu $\pm 60\%$ dengan kemiringan $\pm 10^\circ$. Ketinggian di atas permukaan laut 100 meter. Klimatologi.

Curah hujan : di dalam data curah hujan dinyatakan bahwa Irian Jaya pada umumnya termasuk iklim tropis yang banyak hujan. Khususnya untuk Kota Sorong tercatat curah hujan rata-rata sangat tinggi. Perbandingannya dengan kota-kota lain di Irian Jaya sebagai berikut :

- Sorong	2.850 mm/tahun
- Manokwari	2.391 mm/tahun
- Jayapura	2.523 mm/tahun
- Merauke	2.000 mm/tahun

Rata-rata suhu udara 28,4°C, suhu udara maksimum 31,4°C, suhu udara minimum 25,4°C, sedangkan kecepatan angin 3,3 sc, rata-rata jam penyinaran matahari 163/bulan dan kelembaban udara rata-rata 72,8% / bulan.

Situasi klimatologi Kota Sorong tersebut di atas dirinci dalam tabel sebagai berikut dibawah ini.

TABEL VII. 9
SITUASI KLIMATOLOGI KOTA SORONG
TAHUN 1991

B U L A N	CURAH HUJAN	RATA - RATA SUHU UDARA (0 C)			KECEPATAN ANGIN / Sc	JAM PENYINARAN MATAHARI	KELEMBABAN UDARA (%)
		S. UDARA	S. UDARA MAX.	S. UDARA MIN.			
Januari	441	27,9	30,8	25,4	2,8	160	82
Februari	235	28,5	31,8	25,7	2,8	160	77
Maret	158	28,6	31,9	25,8	2,8	142	81
April	315	28,7	31,4	25,8	2,1	148	72
M e i	330	28,7	31,5	25,8	2,8	177	82
J u n i	315	28,1	30,6	25,4	5,7	173	82
J u l i	218	28,1	30,7	25,0	4,7	174	85
Agustus	168	27,4	30,8	25,0	4,7	156	83
September	83	28,0	32,1	25,0	4,7	156	83
Oktober	130	28,0	32,3	24,9	2,7	161	80
November	168	28,3	31,6	25,5	2,1	200	77
Desember	240	29,3	31,7	25,9	3,2	154	79

Sumber : Kantor Stasiun Meteorologi & Geofisika Sorong (Jefman)

Walaupun demikian situasi klimatologi tersebut di atas sering terjadi perubahan yang cukup tajam sehingga sulit diramalkan. Misalnya musim penghujan tahun-tahun 1986 - 1990 dan rata-rata jam penyinaran matahari/bulan maupun keadaan cuaca lainnya terjadi penyimpangan yang cukup tajam di mana seharusnya curah hujan/hari hujan serta jam penyinaran matahari/bulan masih cukup tinggi, tetapi kenyataannya terjadi kekurangan (data Stasiun Meteorologi Jefman Sorong, 1990). Dengan demikian keadaan ini sering berpengaruh terhadap pembinaan disiplin lalu lintas jalan raya dan pencemaran lingkungan kebersihan kota. Jalan berlumpur pada musim penghujan, dan berdebu pada musim kemarau (panas). Selokan-selokan dan parit-parit tersumbat oleh berbagai limbah keluarga dan limbah dari pusat-pusat pembelanjaan. Disiplin pengemudi mengendor, sehingga terjadi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas jalan raya.

7. Kependudukan.

Penduduk yang bertempat tinggal di daerah Kota Sorong, adalah 98.556 orang, yaitu 43,41 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sorong 199.085 (56,59). Pertumbuhan penduduk pada tahun 1971 - 1980 sebesar 2,60 % dan pertumbuhan penduduk 1981 - 1990 menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 3,97 %. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di daerah kota sebesar 114,0 dan di daerah pedesaan sebesar 108,5.

Kepadatan penduduk Kota Sorong sebesar 71 orang per Km². Rincian banyaknya jumlah penduduk Kota Sorong menurut umur dan jenis kelamin sebagai berikut dibawah ini.

TABEL VII. 10
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT UMUR DAN
JENIS KELAMIN DI KECAMATAN SORONG KOTA
TAHUN 1991 SAMPAI JULI 1992

U m u r	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	6.758	6.599	13.357
5	1.397	1.341	2.738
6	1.294	1.266	2.560
7	1.504	1.348	2.852
8	1.462	1.394	2.856
9	1.329	1.220	2.549
10	1.441	1.341	2.782
11	1.136	1.059	2.195
12	1.185	1.151	2.336
13	1.084	999	2.083
14	955	923	1.878
15	1.059	1.061	2.120
16	1.023	893	1.916
17	1.204	1.143	2.347
18	1.286	1.169	2.445
19	1.114	992	2.106
20 - 24	5.171	5.130	10.301
25 - 29	5.516	5.292	10.808
30 - 34	4.501	4.123	8.624
35 - 39	4.115	3.229	7.344
40 - 44	2.621	1.736	4.357
45 - 49	1.634	1.216	2.850
50 - 54	1.111	888	1.999
55 - 59	628	504	1.132
60 - 64	503	358	861
65 +	543	459	1.002
J u m l a h	51.574	46.854	98.428

Keterangan : Belum termasuk Penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang berjumlah 128 orang.

Sumber : Kantor Kecamatan Sorong dan Kantor Statistik Kabupaten Sorong 1991 sampai Juli 1992

8. Kehidupan Ekonomi.

Dilihat dari sistem mata pencaharian hidup warga Kota Sorong ini menunjukkan adanya bermacam-macam lapangan kerja yang dilakukan penduduk. Sebuah laporan tahun 1990/1991 mengenai perkembangan dan pembangunan kotamenunjukkan bahwa lapangan kerja di daerah ini sangat bervariasi, seperti berikut : karyawan swasta (28%), usaha-usaha yang bergerak dalam perdagangan (26%), pegawai negeri dan ABRI (25%), tenaga jasa/buruh (6%), petani (5%), penggali pasir dan batu (3%), nelayan (2%), pekerja tidak tetap (2%) dan penganggur (2%).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara umum di 5 kelurahan dan 1 desa menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak dan terbesar adalah usaha-usaha yang bergerak dalam perdagangan dan perusahaan, kemudian tenaga jasa/buruh, pegawai negeri dan ABRI, pegawai perusahaan swasta, supir, penggali pasir dan batu, petani dan nelayan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran dan tingkat pendapatan warga penduduk kota itu dilakukan melalui pendekatan yang berdasarkan sistem sosial, yaitu sistem pelapisan sosial. Penggolongan ini bersumber pada sistem sosial yang telah dikategorikan oleh warga masyarakat setempat, sehingga mereka saling membedakan dirinya antara warga masyarakat ke dalam golongan yang dikategorisasikan oleh mereka sendiri. Untuk melihat tingkat kehidupan dilakukan pendekatan secara subyektif dan obyektif. Subyektif dimaksudkan adalah pendekatan dengan menggunakan pengetahuan dari individu atau seseorang yang sedang diteliti, terutama mengenai kedudukan sosial yang ada dalam masyarakat dimana orang itu diam. Sedangkan pendekatan obyektif adalah pendekatan dimana si peneliti menggunakan pengetahuannya untuk melihat hal-hal yang obyektif/kongkrit dalam masyarakat yang ditelitinya (N.M. Johnson : 1960 ; 501 - 3).

Melalui pendekatan subyektif tersebut keadaannya menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran dan tingkat pendapatan dari sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat kota digolongkan ke dalam lima tingkatan sosial (lapisan sosial), yaitu : 1). golongan sosial yang sangat kaya, 2). golongan sosial yang kaya, 3). golongan sosial yang berkecukupan, 4). golongan sosial yang kekurangan, dan 5). golongan sosial lemah (sangat kurang). Perbedaan-perbedaan ini ditentukan oleh faktor ekonomi dan status sosial yang merupakan kriteria bagi warga masyarakat di sini dalam pengkategorian tingkat kemakmuran dan tingkat pendapatan sosial.

TABEL VII. 11

**GOLONGAN SOSIAL MENURUT TINGKAT KEMAKMURAN
DAN TINGKAT PENDAPATAN SEBAGAI SISTEM KATEGORISASI
DALAM MASYARAKAT KOTA SORONG (N = 100)**

No.	Golongan Sosial	Total
1.	Sangat Kaya	16
2.	Kaya	20
3.	Cukup	30
4.	Kurang	25
5.	Lemah/Sangat Lemah	9

*Sumber : Data ini merupakan hasil pengamatan dan penelitian terhadap
100 orang di lima Kelurahan dan 1 Desa di Wilayah Kota Sorong*

Penggolongan ke dalam lima golongan sosial ini berdasarkan pada sistem kategorisasi yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat kota itu oleh masyarakat setempat. Perbedaan itu sendiri bersumber pada aspek ekonomi dan sosial, kemudian diamati lebih kongkrit secara obyektif melalui kondisi rumah, lingkungan pemukiman, harta milik (kendaraan, meja-kursi yang mahal di atas Rp. 500.000,-, perabot rumah tangga, dan kekayaannya), dan status sosialnya untuk mengukur tingkat pendapatan dan tingkat kemakmuran dari 100 orang dengan pengukuran pada aspek yang telah digolongkan oleh masyarakat itu sendiri.

Golongan sosial yang pertama, yang tergolong sangat kaya adalah mereka yang tergolong tingkat pendapatan dan kemakmuran yang sangat tinggi. Mereka itu adalah kaum pedagang dan pengusaha besar yang lama berdiam di daerah itu $\pm$ 10 - 20 tahun. Mereka itu pada umumnya adalah pendatang dari luar Irian Jaya, yaitu orang Tionghoa dan orang Bugis-Makassar. Lokasi tempat tinggal adalah di pusat kota, yaitu di Kelurahan Kampung Baru, Klademak, Remu Utara, dan Remu Selatan. Mereka itu adalah sebagai pemilik toko-toko besar, pemilik hotel-hotel, pemilik PT dan CV yang besar, para dieler kendaraan bermotor dan pengusaha bengkel-bengkel, dan lain usaha-usaha yang bergerak dalam perdagangan Export dan Import.

Golongan sosial kedua, yang tergolong kaya adalah mereka yang tergolong tingkat pendapatan dan kemakmuran yang baik dan tinggi. Mereka itu adalah pengusaha dan pedagang yang sedang berkembang baik dan berdiam di daerah

itu antara 5 - 10 tahun. Mereka itu adalah pendatang dari luar Irian Jaya, yaitu orang Tionghoa, Bugis-Makassar, orang Minangkabau. Kecuali itu, termasuk pula dalam kategori itu kedua adalah para pejabat (pimpinan) Dinas/Jawatan Sipil dan ABRI, dokter, pejabat legislatif (DPRD), dan pimpinan perusahaan negara (Pertamina, PLN).

Kondisi rumah dan lingkungan pemukiman baik dan teratur, lokasi tempat tinggal adalah di pusat pertokoan, yaitu di Kelurahan Rufei, Kampung Baru, Klademak, Remu Utara. Selain kondisi rumah dan lingkungan pemukiman, juga diukur dari harta milik (pemilik mobil, perabot rumah tangga, televisi berwarna yang besar, lemari es, kursi-meja ligna, kursi sofa, dan lemari yang mahal di atas Rp. 500.000,-).

Golongan sosial ketiga, yang tergolong cukupan adalah mereka yang tergolong tingkat pendapatan cukup baik. Mereka itu adalah pedagang dan pengusaha yang bergerak di dalam berbagai sektor aneka industri kecil, seperti pengolah pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum, rumah makan, coffe house (sejenis bar/restaurant), dan reparasi bahan logam. Mereka umumnya adalah pendatang dari luar Irian Jaya, yaitu orang Bugis-Makassar, Jawa, Sulawesi Utara, Medan, Minangkabau dan sebagian orang Tionghoa. Lokasi tempat tinggal mereka umumnya di pinggiran jalan raya. Kondisi rumah dan lingkungan kurang bahkan tidak teratur, yaitu berdempet-dempet, pemilihan tempat-tempat usaha umumnya berukuran $\pm 3 \times 4$ meter sampai 10×7 meter dan rumah tempat tinggal sedang-sedang (6×7 m² sampai 7×8 m²). Harta pemilihan (sepeda motor, kursi-meja tamu, lemari berharga di bawah Rp. 500.000,-, perabot rumah tangga harga murahan, televisi warna ukuran rata-rata 14 inci, ada kulkas). Kecuali itu, termasuk pula Pegawai Negeri Sipil dan ABRI yang sudah lama bertugas 10 - 20 tahun, pegawai swasta (pegawai Bank, PLN, Pertamina). Keadaan ini diukur pula dari kondisi rumah dan lingkungan pemukiman yang cukup baik, ada lampu listrik, pemasangan pipa air minum PAM, televisi, kulkas, kursi-meja tamu cukup baik dan sebagainya.

Golongan keempat, yang tergolong kekurangan, adalah mereka tergolong tingkat pendapatan yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian dan biaya pendidikan anak dan pengobatan. Sedangkan untuk kebutuhan membangun rumah tinggal yang baik, membeli televisi, meja-kursi dan perlengkapan rumah tangga lainnya mengalami kekurangan biaya. Untuk memenuhi kebutuhan ini mereka harus terpaksa berutang kepada orang lain. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah pegawai negeri golongan I dan II yang baru bekerja, pekerja buruh/jasa, karyawan perusahaan golongan bawah sebagai pesuruh, tukang babad dan kerja lain yang sejenisnya.

Indikatornya dapat diukur dari kondisi rumah tempat tinggal dan lingkungan pemukiman yang tidak teratur dan kurang memenuhi faktor kesehatan, perlengkapan rumah tangga yang minimal sekali, menggunakan pelita sebagai alat penerangan, belum memiliki rumah tersendiri dan menggunakan air sumur sebagai tempat mandi, cuci dan minum. Penghasilannya kurang dari Rp. 100.000,- sebulan untuk golongan I, dan golongan II Rp. 150.000,- sebulan. Penghasilan itu berbanding jumlah keluarga yang ditanggung (isteri, anak-anak, mertua, ipar dan kerabat terdekat lainnya) maka tingkat pendapatannya kurang. Mayoritas kategori golongan keempat ini adalah pribumi Irian.

Golongan kelima, yang tergolong lemah (miskin) adalah mereka yang tingkat pendapatan rendah sekali. Mereka itu adalah para petani, nelayan, penggali pasir dan batu dan pekerja tidak tetap. Indikator itu diukur dari kondisi rumah yang berbentuk gubuk, beratap rumbia, ber dinding papan, menggunakan pelita sebagai alat penerangan, dan perlengkapan rumah tangga yang sangat sederhana. Lingkungan pemukiman tidak teratur dan tidak sehat (lingkungan kotor). Mayoritas penduduk adalah penduduk pribumi Irian, orang Buton, orang Kei Timor dan orang-orang yang baru datang ($\pm$ 1 - 5 tahun) dan yang ingin mengadu nasib di kota.

Penggolongan menurut kategorisasi tingkat kemakmuran dan tingkat pendapatan dari aspek ekonomi dan sosial oleh masyarakat setempat tersebut di atas, adalah pengetahuan masyarakat setempat, kemudian diamati secara kongkrit menurut kondisi obyektif-nya.

9. Kehidupan Sosial dan Budaya.

9.1. *Tipe Rumah Tangga*

Rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil dalam masyarakat. Kesatuan sosial ini biasanya dapat terdiri dari satu keluarga inti saja, yaitu ayah, ibu dan anak-anak yang belum berkeluarga, dan dapat ditambah lagi dengan anggota kerabat yang lain terutama yang mengurus kegiatan ekonomi rumah tangga.

Tipe rumah tangga di kota itu tidak seluruhnya terdiri dari satu keluarga inti saja, tetapi lebih dari satu keluarga. Di sana ada terdapat beberapa keluarga-keluarga yang sudah berbentuk keluarga inti terutama keluarga muda yang masih menumpang secara bersama dalam satu rumah dengan orang tuanya, dengan pamannya, atau dengan iparnya. Dikatakan mereka belum mampu untuk mengurus rumah tangga tempat tinggal

sendiri, tetapi masih makan dari satu dapur orang tuanya, pamannya, atau iparnya, karena mereka ini tetap dihitung sebagai satu rumah tangga. Jadi jumlah anggota rumah tangga di kota itu memperlihatkan bahwa kedudukan kekerabatan tidak hanya terdiri dari suami-isteri, dan anak-anak, akan tetapi sanak keluarga dari pihak suami-isteri yang berada dalam satu rumah tangga. Besarnya rumah tangga itu akan diuraikan lebih lanjut di lingkungan pemukiman yang dijadikan daerah penelitian.

Melihat latar belakang dari penduduk kota itu, diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu penduduk pribumi Irian dan penduduk pendatang dari luar Irian Jaya (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Bali, Maluku dan orang Cina). Kedua kategori penduduk kota itu, menurut tempat asalnya $\pm$ 64% adalah berasal dari daerah pedesaan, baik daerah pedesaan di luar Irian Jaya maupun di dalam Irian sendiri. Mereka yang dijumpai dalam pengumpulan data mempunyai sistem pengetahuan sosial dan budaya yang sesuai dengan daerah asalnya, dan itu dapat digunakan sebagai suatu strategi adaptasi di dalam mempertahankan hidup di Kota Sorong.

Kaum pendatang dari luar Irian dihadapkan pada suatu keadaan bahwa lapangan kerja yang tersedia dan dilakukan menurut keahlian/ketrampilannya memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya atau dibandingkan dengan penduduk pribumi Irian. Situasi keberuntungan dari kelompok pendatang dari luar Irian ini seringkali sebagai suatu latar belakang yang cenderung menimbulkan desintegrasi antar penduduk pribumi Irian dengan penduduk pendatang luar Irian karena perasaan iri dan cemburu. Bahkan seringkali sebagai latar belakang pemikiran yang cenderung menimbulkan stereotip dari penduduk Irian terhadap penduduk pendatang dari luar Irian sebagai *"orang hanya datang cari makan, cari keuntungan sendiri, tidak membangun orang Irian"*. Demikian sebaliknya para pendatang dari luar Irian berprasangka pada penduduk Irian *"orang malas, bodoh, pemabuk"*.

Golongan masyarakat yang bergerak dalam usaha dagang, jasa dan barang, memberikan banyak lapangan kerja kepada penduduk-penduduk pribumi Irian termasuk pula kaum pendatang dari luar Irian yang tergolong sebagai migran.

Golongan sosial (masyarakat) yang sangat kaya dan kaya tidak banyak terjaring dalam berbagai kegiatan dan organisasi sosial yang ada

di wilayah tempat tinggalnya. Mereka jarang sekali berkumpul bersama dengan lapisan golongan masyarakat kategori III, IV dan V (cukupan, kekurangan dan lemah). Mereka umumnya hanya membantu memberi sumbangan apabila diminta melalui edaran, dengan tujuan bersifat mendorong rencana dan kegiatan sosial yang dilakukan. Berkurangnya partisipasi secara aktif dari lapisan masyarakat ini disebabkan karena kesibukan-kesibukan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan maupun kegiatan keluar daerah.

Golongan sosial ketiga, keempat dan kelima hubungan sosial mereka sangat komunikatif antara sesama tetangga, sesama warga Rukun Tetangga (RT) dan sesama Rukun Wilayah (RW). Mereka saling berkumpul bersama, saling hormat-menghormati satu dengan yang lain, ada kesulitan dalam lingkungan tetangga RT dan RW terjadi saling tolong-menolong. Sebagian dari mereka yang tidak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial bukan hanya disebabkan oleh kesibukan-kesibukan mencari nafkah, tetapi ketidaktahuan mereka tentang organisasi dan tujuan dari kegiatan secara bersama, dan kehidupan yang terbatas tidak memungkinkan lagi mereka dalam memberikan partisipasi mereka, baik kerja bakti, membayar iuran, maupun sumbangan yang diwajibkan bagi seluruh warga setempat.

Perasaan iri, takut, kecurigaan, dan putus asa, maupun kekecewaan yang terjadi adalah sebagai akibat dari kehidupan mereka yang sangat terbatas (kekurangan dan kelemahannya).

10. Gambaran Umum tentang Disiplin terhadap Aturan-Aturan dan Kaidah-Kaidah Sosial.

- 10.1. Program 5 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kekeluargaan) yang dicanangkan Pemerintah Daerah Tingkat II Sorong untuk warga penduduk Kabupaten Sorong, khususnya warga penduduk Kota Sorong belum dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari oleh warga penduduk kota.

Hal ini dapat diketahui dari berbagai studi kasus yang akan dideskripsikan pada bagian selanjutnya tentang permasalahan kota. Namun di sini sebagai gambaran umum, misalnya : pembuangan sampah yang tidak beraturan di berbagai tempat (parit/selokan, sungai, di pinggir jalan, di tempat-tempat umum) secara sembarangan yang mencemarkan lingkungan hidup, upaya pembersihan yang tidak dilakukan secara

bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sorong di tempat-tempat pasar, atau di luar pasar (dalam kota) bersama aparat Kecamatan Sorong.

- 10.2. Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya oleh para pengemudi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang mengakibatkan terjadi berbagai peristiwa ketabrakan di jalan raya adalah contoh dari berkurangnya disiplin warga kota.

Sebagaimana dikatakan oleh pihak pengawas dan pengontrol lalu lintas jalan raya baik dari pihak SATLANTAS Kepolisian Resort Sorong maupun Kantor Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Sorong, bahwa tingkat disiplin warga masyarakat kota ini, baik para pengemudi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, baru sekitar 50 persen.

- 10.3. Ketaatan terhadap Peraturan Administrasi Pemerintah, belum mencapai tingkat disiplin yang diharapkan. Sebagai gambaran umum, bahwa ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan jam kerja dan jam pulang bekerja berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 13/Instr-GIJ/1990 tanggal 23 November 1980 yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 7.30 - 14.30; hari Jumat : pukul 07.30 - 11.00 dan hari Sabtu : pukul 07.30 - 13.00 belum dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab oleh semua Aparat Pegawai Negeri Sipil di berbagai Dinas/ Jawatan Otonom Vertikal di Kota Sorong. Dari hasil perolehan data yang dinilai dan dijelaskan oleh 8 orang atasan langsung yang diwawancarai sebagai informan tentang ketaatan jam kerja dan jam pulang kerja dari pegawai yang menjadi stafnya sebagai berikut : 2 (dua) orang atasan mengatakan pegawainya dapat mentaati peraturan jam kerja dengan sepenuhnya (25%); 4 (empat) orang atasan menyatakan pegawainya tidak sepenuhnya mentaati peraturan jam kerja (50%); dan 2 (dua) orang atasan menyatakan pegawainya belum dapat mentaati peraturan jam kerja (25%). Kesimpulannya, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan jam kerja dan jam pulang kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab (75%) oleh Aparat Pegawai Negeri Sipil diberbagai Dinas/Jawatan di Kota Sorong.

- 10.4. Ketaatan, ketekunan, dan sikap menghargai waktu baik waktu untuk berkumpul, waktu untuk rapat, waktu kerja, waktu janji, dan sebagainya

di kalangan warga penduduk Kota Sorong dikatakan masih sangat kurang disiplin (50%).

10.5. Sebagai contoh terakhir dari beberapa gambaran umum tentang disiplin terhadap aturan-aturan dan kaidah-kaidah umum sosial di Kota Sorong, ialah sikap sopan santun dan sikap hormat terhadap satu warga dengan warga yang lain dalam lingkungan tempat tinggal maupun di tempat-tempat umum (di terminal, di dalam taxi, di pusat-pusat pembelanjaan) belum 100% menunjukkan sikap sopan santun dan sikap hormat terhadap sesama manusia. Seperti, misalnya :

10.5.1. Orang yang merokok di dalam taxi, yang asapnya mengganggu sesama penumpang yang tidak merokok; ada penumpang yang mencoret-coret dan menulis nama di jock-jock kursi mobil taxi; daya tampung penumpang yang hanya terbatas pada 9 orang saja, sopir menambah penumpang sehingga melebihi 10 sampai dengan 11 orang.

10.5.2. Di dalam Bioskop, tertulis "*dilarang merokok*", ternyata ada penonton yang merokok; tertulis "*duduk menurut tanda dan nomor kursi sesuai tanda dan nomor karcis*", ternyata ada penonton yang duduk di sembarang kursi yang bukan tanda nomor kursi duduknya; ada penonton yang duduk mengangkat kaki di atas kursi yang lain dan ada yang di atas kursinya sendiri; berteriak-teriak di dalam ruang bioskop yang mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang menonton film tersebut; dan lain-lain sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan tata aturan umum (kaidah-kaidah sosial).

Berdasarkan data yang dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan sebagai gambaran umum bahwa ketaatan, kepatuhan, ketekunan, dan sikap hormat yang nampak sesuai tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku umum sebagai pedoman untuk menata kehidupan yang baik, aman, bersih, tertib, indah dan bersifat kekeluargaan di dalam kehidupan masyarakat, terutama warga penduduk kota yang padat dan heteroginitas itu belum dapat dilakukan dengan baik dan penuh disiplin (baru sekitar 50%).

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

1. Lokasi.

Lokasi daerah penelitian sebagai sampel dilakukan di Kelurahan Remu Utara, yang secara astronomis terletak pada posisi 00° LS dan $131^{\circ}17'$. Luas wilayah Kelurahan Remu Utara 40.000 meter persegi (40 Km^2), dengan batas-batas sebagai berikut :

- di bagian sebelah barat dibatasi oleh Kelurahan Klademak.
- di bagian sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Ahmad Yani (Jalan raya utama Sorong).
- di bagian sebelah timur dibatasi oleh Desa Klasaman.
- di bagian sebelah utara dibatasi oleh Desa Malanu.

Penentuan batas Kelurahan ini ditandai dengan Pilar atau tembok.

2. Pembagian Administratif.

Kelurahan Remu Utara, secara administratif terbagi atas 11 Rukun Wilayah (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT). Nama-nama dari Rukun Wilayah tersebut sebagai berikut :

- (1) RW Lingkungan Pemukiman HBM Atas, terdiri atas 2 RT,
- (2) RW Lingkungan Pemukiman HBM Tengah, terdiri atas 3 RT,
- (3) RW Lingkungan Pemukiman HBM Bawah, terdiri atas 5 RT,
- (4) RW Lingkungan Pemukiman Jl. Pramuka, terdiri atas 2 RT,
- (5) RW Lingkungan Kompleks Polisi, terdiri atas 2 RT,
- (6) RW Lingkungan SD INPRES 46, terdiri atas 3 RT,
- (7) RW Lingkungan Pemukiman Malanu, terdiri atas 6 RT,
- (8) RW Lingkungan Pemukiman KM 7 Gunung, terbagi 5 RT,
- (9) RW Lingkungan Pemukiman Jl. Basuki Rahmat, terbagi 5 RT,
- (10) RW Lingkungan Pemukiman KM. 9/KPR-BPD, terbagi 4 RT,
- (11) RW Lingkungan Pemukiman Asrama Pensiunan Polisi terdiri atas 4 RT.

Di tingkat Kecamatan Sorong, Kelurahan Remu Utara itu termasuk Wilayah Perwakilan Kecamatan Sorong Timur.

3. Jarak Tempuh ke Pusat Pemerintahan.

- Sebelum tahun 1991, Kantor Pusat Pemerintahan baik Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong maupun Kantor Wilayah Kecamatan Sorong berlokasi di Kelurahan Remu Utara, jarak tempuhnya $\pm 0,5 \text{ Km}$. Namun demikian, pada tahun 1991 lokasi dan jarak tempuh itu berubah. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong yang baru berlokasi di desa

Klamalu, dan Kantor Wilayah Kecamatan Sorong yang baru berlokasi di Kelurahan Remu Selatan. Dengan demikian, jarak tempuh dari Kelurahan Remu Utara ke kantor pusat pemerintahan tersebut di atas juga berubah. Ke Kantor Bupati yang baru jarak tempuhnya, adalah 20 Km, dan ke Kantor Kecamatan 2 Kilometer.

- Ke Pasar Sentral Remu Sorong, jarak tempuhnya 1,3 Km,
- Ke Kompleks Pertokoan jarak tempuhnya 0,5 Km.

Jarak tempuh ke kantor pusat pemerintahan, terutama ke Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong yang jarak jauhnya 20 Km dari Kantor Kelurahan Remu Utara, apabila dikaitkan dengan hubungan angkutan umum (taxi dan bus), kondisinya sebagai berikut :

- Jarak amat jauh, dan berada di luar jalur operasi kendaraan umum (taxi dan bus).
- Hubungan ke Kantor Bupati itu hanya dapat ditempuh dengan kendaraan di atas, bus dinas, atau dan kendaraan pribadi.
- Ongkos taxi pergi-pulang (PP) Rp. 30.000,-, dan ongkos angkutan sepeda motor (sewaan) pergi-pulang (PP) antara Rp. 10.000,- - Rp. 15.000,-. Kondisi ini dianggap mahal bagi penduduk di kelurahan yang dapat berurusan ke Kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan.

4. Lingkungan Fisik.

4.1. *Pola Pemukiman*

Kelurahan Remu Utara yang merupakan lokasi penelitian ini adalah pemukiman yang termasuk daerah pusat perkotaan di Sorong, kantor-kantor Dinas/Jawatan di lingkungan Sekretariat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong berada di lokasi pemukiman Remu Utara. Kecuali itu, juga merupakan lokasi pemukiman Kepolisian Resort Sorong dan Komando Batalyon Infantri (YONIF) 752 Sorong.

Tata letak bangunan baik perkantoran dan rumah-rumah tempat tinggal pada umumnya (75%) baik dan kondisinya teratur. Lingkungan pemukiman yang kurang teratur (25%) itu terdapat di lingkungan pemukiman RW V (Malanu), RW Km 7, RW Km 9, serta beberapa RT di lingkungan daerah pemukiman HBM terutama di sepanjang pinggir sungai Remu.

Dikatakan kurang baik dan tidak teratur, karena kondisinya sangat berdesak-desakan, sirkulasi udara kurang baik untuk kesehatan, jalan

utamanya berbentuk gang (lebar 1 - 2 meter), ada rumah yang bagian depan berhadapan dengan bagian belakang rumah orang lain, atau dan bagian depan berhadapan dengan bagian samping dari rumah orang lain.

Rumah-rumah permanen (kantor, pertokoan, rumah sakit, dan rumah-rumah tempat tinggal, kompleks sekolah, rumah-rumah ibadah) berjumlah 2.760 buah; rumah-rumah berbentuk semi permanen (rumah-rumah tinggal) berjumlah 1.518 buah; dan rumah-rumah yang berbentuk non-semi permanen (gubuk, dan lain-lain sejenis) berjumlah 120 buah.

Kondisi jalan di kelurahan ini termasuk jalan-jalan utama yang berada di jalan raya 9 Km seperti telah di sebutkan di bagian gambaran umum kota. Permukaan jalan diaspal dan kondisinya baik (75%), permukaan jalan sudah diaspal tetapi sedang dalam kondisi rusak (10%) dan tidak diperinci (jalan tanah, jalan kerikil/pasir, dan setapak, serta yang belum diaspal) kondisinya rusak (15%).

Pelayanan penerangan dari jawatan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Sorong baik kepada para pelanggan di rumah-rumah tinggal, pertokoan, kantor-kantor, kompleks sekolah, Rumah Sakit, Asrama Batalyon 752 dan Kepolisian Sektor Sorong, maupun di jalan-jalan umum, keadaannya baik (80%).

Sarana air minum, cuci dan mandi diklasifikasikan ke dalam dua kategori pelayanan, yaitu pelayanan lewat saluran primer dan lewat saluran sekunder. Saluran primer adalah yang menggunakan air sumber dan air sungai, sedangkan saluran sekunder adalah melalui Perusahaan Air Minum (PAM). Pelayanan air minum saluran sekunder membangunnya terutama pada rumah-rumah pegawai, ABRI, kantor, rumah-rumah ibadah, kompleks pertokoan, perusahaan-perusahaan, rumah sakit, dan kompleks sekolah. Sedangkan masyarakat umum yang bermukim di sepanjang pinggir Sungai Remu menggunakan air sungai untuk mandi dan cuci. Sedangkan mereka yang bermukim di daerah Malanu, Km 7 dan Km 9, serta Asrama pensiunan (Aspel) Polisi menggunakan saluran primer yang berbentuk sumur untuk mandi, cuci dan minum. Kategori pemakai air sumur ini cukup banyak (55%).

Sarana kebersihan umum berupa gerobak, mobil sampah, dan bak-bak sampah tidak ada. Keadaannya di sini masih sangat minim. Mobil sampah diharapkan dari Kantor Kecamatan. Sampah-sampah dikumpulkan di depan rumah masing-masing dalam bak yang dibuat

sendiri sambil menunggu angkutan dari Kantor Kecamatan. Seringkali sampah ini tidak diangkut atau diangkat petugas kecamatan sehingga tinggal membusuk di tempatnya, akhirnya lama-kelamaan membentuk bukit sampah.

4.2. *Fasilitas Umum*

4.2.1. Keamanan.

Sarana keamanan di Kelurahan Remu Utara terdiri dari atas: (1) Pos Polisi dua buah; (2) Pos Tentara 1 buah; (3) POS SISKAMLING 15 buah; (4) jumlah anggota HANSIP terlatih militer 12 orang; (5) jumlah anggota SATPAM 11 orang; (6) jumlah Peronda Kampung 22 kelompok.

Kegiatan SISKAMLING sejak awal terbentuknya berjalan sangat lancar, namun setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 1992 keadaannya tidak berjalan lancar. Koordinasi kurang terpadu dengan baik, sehingga disiplin anggota mengendor. Tingkat keamanan di daerah Kelurahan Remu Utara, cukup rawan, karena tingkat penganiayaan dan pengeroyokan cukup tinggi. Daerah rawan adalah terutama di daerah sekitar Halte Bus Malanu dan Asrama Pensiunan Polisi.

4.2.2. Fasilitas Kesehatan.

Sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di kelurahan itu, adalah: (1) Rumah Sakit Bersalin (berstatus swasta) 1 (satu) buah; (2) Poliklinik/Balai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2 (dua) buah; (3) PUSKESMAS Pembantu 2 (dua) buah; (4) Apotik 1 (satu) buah; (5) Toko Obat Berijin 1 (satu) buah, dan (6) sejumlah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

4.2.3. Fasilitas Olah Raga.

Sarana Olah Raga berbentuk fisik yang ada di Kelurahan Remu Utara berupa : (1) lapangan sepak bola 3 buah; (2) lapangan basket 2 buah; (3) lapangan volley 8 buah; (4) lapangan bulu tangkis 2 buah; (5) lapangan tennis meja 5 buah; (6) lapangan tennis 2 buah; (7) kolam renang Spor Hall (GOR) 1 buah; (8) rumah bilyard 2 buah.

Sarana olah raga berwujud lapangan tennis umumnya digunakan hanya terbatas di lingkungan masyarakat lapisan atas seperti para pejabat kepala-kepala Dinas Sipil dan ABRI.

4.2.4. Fasilitas Keagamaan dan Pendidikan.

Fasilitas keagamaan terdiri atas : (1) mesjid 2 buah; (2) gereja Katholik 1 buah; (3) gereja Protestan 10 buah; (4) langgar 6 buah; (5) Pondok Pesantren 1 buah.

Fasilitas pendidikan terdiri atas :

- (1) Sekolah Taman Kanak-kanak (STK) 6 buah;
- (2) Sekolah Dasar (SD) 9 buah;
- (3) Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) 2 buah;
- (4) Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) 4 buah;
- (5) Perguruan Tinggi (PT) 3 buah.

Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah, swasta bersubsidi, dan swasta penuh. Sarana gedung sekolah untuk TK umumnya bersifat pinjaman dari sebagian sarana ibadah dan bekas-bekas kantor.

Gedung Sekolah Dasar (SD) apabila dibandingkan dengan ratio murid yang masuk yang setiap tahun meningkat, maka keadaan fasilitas sekolah yang ada (ruang kelas, bangku, meja) masih terbatas. Akibatnya terbentuk kelas paralel. Sebagai akibat dari fasilitas gedung sekolah yang terbatas, maka kelas-kelas yang berbentuk kelas ganda (paralel) masuk secara bergiliran. Misalnya kelas II A masuk pagi pukul 07.30 - 13.00, dan kelas II B masuk siang pukul 13.30 - sampai sore hari.

Sekolah-sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) kondisinya sama dengan uraian pada gambaran umum kota tentang fasilitas pendidikan, yaitu keadaan sangat terbatas, baik daya tampung, fasilitas meja dan bangku, maupun tenaga pengajarnya.

Demikian, maka keadaannya bersifat pinjaman sarana gedung dan fasilitasnya. Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas yang ada di Kelurahan Remu Utara ini umumnya berstatus swasta (80%). Sarana gedung sekolah untuk Perguruan Tinggi Swasta itu, umumnya masih bersifat meminjam dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang ada di lingkungan penyelenggara pendidikan tersebut.

4.2.5. Sarana Transportasi.

Kelurahan Remu Utara adalah pusat kota dan pusat pemerintahan Sorong, sehingga arus transportasi lalu lintas jalan raya dapat dikatakan cukup padat, baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Selain sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan, juga merupakan pusat keramaian pada siang dan malam hari. Menurut monografi kelurahan jumlah alat transportasi yang dimiliki oleh warga penduduk Remu Utara, terdiri atas : (1) sepeda 35 buah; (2) sepeda motor 214 buah; (3) taxi 41 buah; (4) mobil dinas 32 buah; (5) mobil pribadi 41 buah; (6) mobil gerobak (truk) 22 buah.

Jumlah unit kendaraan bermotor keadaannya selalu tidak stabil. Dalam arti keadaannya selalu bertambah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan kemajuan dan tingkat pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

4.2.6. Sarana Ekonomi.

Sarana perekonomian yang terdapat di Kelurahan Remu Utara menurut catatan di Kantor Kelurahan Remu Utara (monografi kelurahan, 1991) terdiri atas :

- (1) Toko 31 buah;
- (2) Warung/kios berijin usaha 142 buah;
- (3) Warung/kios tidak resmi (tidak berijin usaha) 16 buah;
- (4) Warung pedagang kaki lima 12 buah;
- (5) Bank Kredit 2 buah;
- (6) Pasar tidak resmi 1 buah;
- (7) Industri kecil 10 buah;
- (8) Bar/diskotik 1 buah;
- (9) Photo presesing 1 buah;
- (10) Travel biro 1 buah;
- (11) Losmen/penginapan 1 buah;
- (12) Pasar tidak resmi yang berbentuk pasar obor (sebutan setempat) 26 buah. Berbagai macam jenis makanan malam hari di jual disepanjang jalan.

5. Lingkungan Alam.

Medan wilayah Kelurahan Remu Utara, berupa dataran dan bergelombang-gelombang bukit yang rendah. Panjangnya mengikuti arah timur jalan raya Sorong Klamono sampai berbatasan dengan Desa Malanu dengan Desa Klasaman.

Keadaan tanah di lokasi Kelurahan Remu Utara, termasuk jenis Allevium dan gambut atau *podzolik*. Selama musim hujan pada umumnya tergenang air sehingga basah. Pada musim panas kering dan amat berdebu. Pengirangan air kurang sempurna terdapat di daerah-daerah berawa-rawa aluvial. Areal bergelombang yang membentuk rangkaian bukit-bukit tinggi terdapat dibagian sebelah timur kelurahan.

Curah hujan di daerah penelitian itu keadaannya sama dengan Kota Sorong pada umumnya, yaitu tercatat curah hujan rata-rata sangat tinggi antara 2.256 - 2.850 mm/tahun, rata-rata suhu udara 28,4°C, suhu udara maximum 31,4°C, dan suhu udara minimum 25,4°C. Kecepatan angin 3,3/Sc, dan rata jam penyinaran matahari 163/bulan, dengan kelembaban udara rata-rata 72,8% / bulan.

6. Kependudukan.

Penduduk Kelurahan Remu Utara berjumlah 21.522 orang, dengan perincian laki-laki 11.412 orang dan perempuan 10.110 orang. Jumlah itu terdapat dalm 4.328 Kepala Keluarga (KK). Kemudian apabila dirinci lagi menurut kelompok umur terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

TABEL VII. 12
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK
UMUR TAHUN 1991

No.	Kelompok Umur	J u m l a h	Presentase (%)
1.	0 - 4 tahun	2.417 orang	11,23
2.	5 - 9 tahun	2.265 orang	10,52
3.	10 - 14 tahun	2.515 orang	11,68
4.	15 - 19 tahun	2.298 orang	10,67
5.	20 - 24 tahun	3.009 orang	13,98
6.	25 - 29 tahun	2.970 orang	13,79
7.	30 - 34 tahun	1.412 orang	6,56

8.	35 - 39 tahun	1.995 orang	9,26
9.	20 - 24 tahun	3.009 orang	13,98
10.	25 - 29 tahun	2.970 orang	13,79
11.	30 - 34 tahun	1.412 orang	6,56
12.	35 - 39 tahun	1.995 orang	9,26
13.	40 - 44 tahun	1.435 orang	6,66
14.	45 - 49 tahun	841 orang	3,90
15.	50 - ke atas	365 orang	1,69
J U M L A H		21.522 orang	100

Sumber : Kantor Kelurahan Remu Utara

Jumlah penduduk menurut agama (yang syah) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Agama Islam : 9.914 orang (46,06%)
- (2) Agama Protestan : 8.426 orang (39,15%)
- (3) Agama Katholik : 3.055 orang (14,19%)
- (4) Agama Hindu : 67 orang (0,31%)
- (5) Agama Budha : 66 orang (0,30%)

Jumlah penduduk menurut dinamika penduduk (lahir, mati, pindah, datang) tahun 1991 terlihat pada tabel sebagai berikut di bawah ini :

TABEL VII. 13
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DINAMIKA PENDUDUK
TAHUN 1991

Jenis Kelamin	Dinamika Penduduk			
	Lahir	Mati	Pindah	Datang
- Laki - Laki	141	63	36	98
- Perempuan	156	74	97	129
J U M L A H	297	137	133	227

Sumber : Kantor Kelurahan Remu Utara

Jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berjumlah 11.743 orang, namun yang hanya mematuhi ketentuan tersebut sehingga telah memiliki KTP berjumlah 5.157 orang. Mereka yang tidak memiliki KTP berjumlah 6.586 orang (56,08%)

7. Kehidupan Ekonomi.

Sistem mata pencaharian hidup warga Kelurahan Remu Utara menunjukkan adanya lapangan kerja yang bervariasi yang dilakukan oleh penduduk setempat. Menurut jenis-jenis lapangan kerja tersebut sebagai berikut :

- (1) Usaha-usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan,
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI,
- (3) Pekerja Jasa dan Buruh,
- (4) Karyawan Perusahaan Swasta,
- (5) Pengusaha Industri Kecil,
- (6) Penggali Pasir dan Batu,
- (7) Petani,
- (8) Tuna Karya / Pekerja Tidak Tetap,
- (9) Tuna Susila.

Berdasarkan tingkat pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari berbagai jenis lapangan kerja tersebut di atas, dihubungkan dengan harta pemilikan material maupun kondisi rumah dan lingkungan pemukiman, maka tingkat kehidupan warga penduduk di Kelurahan Remu Utara itu adalah sama dengan penggolongan warga Kota Sorong secara keseluruhan seperti telah di deskripsikan di atas, yaitu: (1) golongan sosial yang sangat kaya; (2) golongan sosial yang kaya; (3) golongan sosial yang cukup; (4) golongan sosial kurang; dan (5) golongan sosial yang lemah.

Penggolongan tingkat kehidupan ekonomi warga Kelurahan Remu Utara ke dalam lima golongan sosial tersebut itu didasarkan pada sistem pendekatan subyektif (sistem Kategorisasi yang dibuat dan berlaku dalam sistem sosial setempat) dan obyektif (diamati peneliti secara kongkrit atau obyektif) dilapangan diukur dari milik material (pemilikan kendaraan bermotor, meja-kursi tamu, perhiasan berharga, televisi berwarna, tape desk/radio cassette, perlengkapan rumah tangga yang bermutu); kondisi rumah, dan lingkungan pemukiman; pakaian yang dikenakan; sepatu dan sandal yang disandang. Kemudian dihubungkan dengan nilai mata uang ditanamkan untuk harta milik material itu; tempat-tempat pembelanjaan; jangka waktu pembelanjaan antara 1 - 12 bulan; dan mutu (kualitas) harga pemilikan tersebut.

Di saat penelitian dan pengkajian terdapat suatu penemuan yang menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat kehidupan ekonomi masyarakat warga penduduk di Kelurahan Remu Utara sebagai berikut :

- 1) Golongan yang sangat kaya dan kaya memiliki harta milik material yang berharga dan bermutu tinggi yaitu berdaya tahan lama antara 1 - 2 tahun; golongan sosial yang cukup cenderung memiliki harta benda material yang diperkirakan cukup berharga dan bertahan sedikit lama 1 tahun; sedangkan golongan sosial yang kurang dan lemah memiliki harta pemilikan material yang berharga murahan, kurang bermutu, dan berdaya tahan antara 5 - 6 bulan, bahkan 3 - 4 bulan.
- 2) Rumah tangga yang tergolong sangat kaya dan kaya cenderung berbelanja ke dealer, ke Supermarket, ke toko-toko besar. Rumah tangga yang tergolong cukupan cenderung berbelanja ke toko-toko dan ke pasar kelontongan (loak), serta meubel kayu. Sedangkan rumah tangga yang tergolong kurang dan lemah tingkat penghasilannya cenderung berbelanja ke pasar kelontongan dan kios-kios terdekat.
- 3) Rumah tangga yang tergolong sangat kaya, jarak waktu berbelanja antara 1 - 2 bulan; rumah tangga yang tergolong kaya, jarak waktu berbelanja antara 1 - 3 bulan; rumah tangga yang tergolong cukupan, jarak waktu berbelanja antara 3 - 4 bulan; dan rumah tangga yang tergolong kurang dan lemah tingkat penghasilannya, jarak waktu berbelanja antara 7 - 8 bulan, bahkan ada kalanya sekali dalam 1 tahun.
- 4) Suatu pengecualian bagi rumah tangga tergolong sangat kaya, kaya, termasuk cukupan keadaan pakaian mereka sehari-hari tergolong lebih baik. Dimaksudkan baik dalam kategori mutu (kualitas) bahan pakaian dan lebih lama dipertahankan yaitu satu sampai dua tahun; rumah tangga yang tergolong kurang dan lemah tingkat penghasilan mutu pakaian mereka rendah dan sangat murahan. Pemilikannya sangat singkat antara 5 - 6 bulan, bahkan bisa hanya bertahan 3 - 4 bulan saja. Demikian pula keadaan sepatu dan sandal yang disandang di kaki. Golongan sosial yang sangat kaya, kaya cenderung menggunakan sepatu dan sandal kulit yang bermutu dan lama dipertahankan antara 1 - 2 tahun. Golongan sosial yang cukupan keadaan sepatu cenderung menggunakan sepatu kulit yang diperkirakan bisa bertahan sampai 1 tahun, dan keadaan sandal itu bervariasi, yaitu ada menggunakan sandal Jepang merk Swallow, dan ada menggunakan sandal kulit. Sedangkan

golongan sosial yang kurang dan lemah umumnya cenderung menggunakan sandal Jepang, nilai yang ditanamkan antara Rp. 500,- sampai Rp. 750,- (prinsip asal alas kaki).

Keadaan sepatu yang dipakai, umumnya menggunakan sepatu kets (kulit karet), nilai yang ditanamkan antara Rp. 5.000,- - Rp. 7.500,-.

- 5) Kondisi rumah. Golongan sosial yang sangat kaya dan kaya, fasilitas rumah antara lain seperti kakus dan kamar mandi keadaannya bersatu dalam rumah tinggal dengan kondisi yang terbuat dari bahan porselin yang bermutu tinggi. Golongan sosial cukupan, fasilitas rumah berupa kakus dan kamar mandi bersatu dalam tinggal dengan kondisi pot kakus dan kamar mandi terbuat dari bahan semen, sedangkan golongan sosial yang kurang dan lemah tingkat penghasilannya, fasilitas kakus dan kamar mandi terpisah dari rumah tinggal, kondisinya darurat di alam terbuka. Keadaannya berlabuh di atas sungai, kolam, dan tempat-tempat gelap, serta bersifat kotor.

Kategori pertama dan kedua, yaitu mereka yang tergolong sangat kaya dan kaya adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor perdagangan dan perusahaan-perusahaan besar, pejabat-pejabat pemerintah/ABRI dan pejabat-pejabat perusahaan negara; kategori ketiga, yaitu mereka yang tergolong tingkat penghasilan cukup adalah Pegawai Negeri Sipil/ABRI, pegawai perusahaan swasta, pedagang dan pengusaha industri kecil; sedangkan kategori keempat dan kelima, yaitu mereka yang tergolong tingkat penghasilan kurang dan lemah adalah umumnya petani, nelayan, buruh/tenaga jasa, pekerja tidak tetap, penggali pasir dan batu, pedagang kaki lima, dan tuna karya.

8. Kehidupan Sosial Budaya.

8.1. *Latar Belakang Perkembangan Penduduk di Kelurahan Remu Utara*

Perkembangan dan pembangunan dalam 7 tahun terakhir ini mengalami banyak perubahan bagi penduduk dan lingkungan fisik di daerah itu. Sementara itu pertumbuhan penduduk terus meningkat bertambah banyak dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadatnya. Seperti dinyatakan oleh para informan yang telah tinggal lama di lokasi penelitian itu sejak tahun 1996, sebagai berikut :

"Dahulu sejak tahun 1955 Sorong Remu dibuka untuk pos Pemerintahan Sorong pertama kali, penduduk yang berdiam di sini Suku Mooi (penduduk asli Sorong). Orang-orang pemerintah, Polisi, Tentara, dan China membangun rumah, asrama (camp) dan toko-

toko mereka di Remu. Setelah Perusahaan Minyak NNGPM dibuka ramai orang-orang mulai banyak masuk. Beberapa orang Buton, Ambon, dan Ayamaru membangun perkampungan mereka masing-masing di Remu, yang disebut Malanu Kampung, Malanu Pasir, dan Malanu Abubakar. Orang Mooi pindah membangun kampung baru di Malanu pedalaman (sekarang Desa Malanu). Di sana-sini tanah masih kosong, bikin kebun bebas. Sekarang mana, seng dapat tanah lagi. Rumah-rumah padat. Rawa-rawa yang dulu orang tidak bisa lewat, dan orang tidak bisa membuat apa-apa, sekarang rumah beton di atas. Keadaan ini mulai berubah setelah Kapal UMSINI masuk tahun 1985. Dengan kapal itu orang-orang dari mana-mana di Indonesia datang dari kerja terus cari tempat bangun rumah di sini. Orang yang sudah lama di situ tersingkir keluar dengan cara menjual tanah mereka dengan harga murah-murah saja. Sementara itu orang-orang lain mulai merebut tanah-tanah kosong, tanpa bayar dan ganti rugi. Lama-lama akhirnya sudah tidak ada tanah kosong (penuh rumah-rumah). Di daerah HBM yang dulu hanya kuburan umum, sekarang penuh sesak manusia, bahkan sampai ada yang mendirikan rumah di atas kuburan orang mati".

Inilah jawaban spontan yang diperoleh dari para informan tersebut ketika menjawab pertanyaan yang diajukan tentang keadaan penduduk, asal dari daerah mana, suku bangsa apa saja, orang pertama siapa yang bermukim di Remu, dan suku-suku bangsa apa saja yang terakhir datang ke situ dan kapan mereka datang di Sorong ? Para informan benar-benar mengakui beberapa keadaan yang dihadapi sekarang, adalah (1) harus bekerja keras, (2) orang pendatang Bugis-Makassar, Jawa, Sumatera, dan lain-lain datang masuk dengan mereka punya keahlian/ketrampilan dan pengalaman mereka, jadi "**bagus**" bisa mampu buat apa saja, tetapi orang Irian yang lama-lama di sini atau dari kampung datang, "**susah**". Harus belajar banyak dari "**orang seberang itu**", supaya bisa hidup.

Jadi penduduk warga masyarakat Kelurahan Remu Utara terdiri dari suatu masyarakat yang beraneka ragam adat istiadat, bahasa, pengetahuan/ketrampilan, pengalaman serta latar belakang sikap dan tingkah laku yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan kebiasaan itu, mereka masing-masing mengatur dan mengendalikan kehidupan sosialnya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk itu, dan dipakai sebagai strategi adaptasi terhadap tantangan hidup yang dihadapi.

8.2. *Rumah Tangga*

Rumah tangga adalah kesatuan sosial terkecil dalam masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum mampu berdiri sendiri, ditambah anggota kerabat lain yang merupakan kesatuan makan (kelompok inti).

Rumah tangga di daerah penelitian itu kebanyakan (80%) terdiri atas lebih dari satu keluarga inti. Di sana terdapat keluarga-keluarga muda yang masih menumpang dengan orang tuanya, pamannya, iparnya, dan sepupunya. Dikatakan mereka belum mampu urus rumah tangga atau ekonomi rumah tangganya, belum mampu membuat rumah sendiri, belum mendapat pekerjaan yang tetap, dan masih sekolah.

Orang tua dan anak-anak yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan kurang dan lemah tinggal di lingkungan daerah kelurahan yang tinggal di pusat kota ini sebenarnya mempunyai banyak sekali keuntungan untuk memanfaatkan fasilitas kota yang disiapkan seperti penerangan dari pelayanan PLN Cabang Sorong, air dari PAM, televisi, pendidikan (sekolah-sekolah menengah), kesehatan, dan lain sarana olah raga. Namun pada kenyataannya hampir seluruhnya (90%) tidak menikmati sarana atau fasilitas kota tersebut. Anak-anak yang berasal dari rumah-rumah tangga kurang dan lemah (tidak mampu) tidak sempat menikmati (menduduki) Sekolah Taman Kanak-kanak (100%), mengikuti (menduduki) Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sebelum sampai ke kelas dua atau tiga sudah putus sekolah, akhirnya tetap menjadi beban yang ditanggung orang tua, terutama dari kalangan penduduk pribumi (70%).

Dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua dari rumah tangga yang tergolong kurang dan lemah tingkat penghasilan tersebut di atas rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar baik Sekolah Dasar 3 tahun (SD) maupun Sekolah Dasar 6 tahun (80%), sehingga belum sama sekali menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci kesuksesan dan suatu keberhasilan yang menentukan kemampuan seseorang.

Penggunaan waktu terluang terutama bagi anak-anak disetiap rumah tangga (dari segala lapisan masyarakat) untuk mengikuti kursus-kursus tambahan pelajaran maupun kegiatan sosial lainnya, keadaannya sangat kurang (75%).

Hubungan antara anak-anak dan orang tua dalam hal menggunakan bahasa ibu (bahasa daerahnya) sangat kurang. Anak-anak yang lahir di kota cenderung menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan orang tua lebih menekankan bahasa daerahnya.

8.3. *Pola Interaksi Sosial dan Kerukunan antar Warga*

Pola interaksi sosial dan tingkat kerukunan antar warga di Kelurahan Remu Utara diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pola interaksi sosial yang terjadi di daerah penelitian tampak sistem kekerabatan dan istilah kekerabatan masih dipakai secara dominan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pembauran fisik (perkawinan) dan budaya secara alami, belum ada. Keadaannya masih memperkuat identitas kelompok kekerabatan dan etnis di antara satu dengan lainnya, sehingga hubungan pergaulan antar warga secara terintegrasi masih bersifat negatif.
- 2) Perasaan **ingroup** dan **outgroup** masih tampak kuat dalam mengidentifikasi diri mereka untuk membedakan diri dengan orang lain. Keadaan ini diukur dari istilah-istilah yang disebut "**pribumi**" dan "**pendatang**" atau "**ember, amberi**" (orang pendatang). Integrasi fisik dan kebudayaan memperkuat kelompok sosial, seperti pada sebutan orang Bugis-Makassar (Makate), orang Jawa, orang Ambon, orang Irian, orang Kei, dan lain-lain etnis.
- 3) Pengendalian sosial antar warga dalam kelompok-kelompok etnis di sini masih tampak kuat pengaruhnya. Hal ini diukur dari adanya pandangan-pandangan stereotip baik antar orang pribumi (Irian) dengan orang Amber/pendatang maupun dikalangan orang Irian dengan orang Irian dan orang Amberi dengan orang Amberi sendiri. Misalnya, orang Amber (pendatang) terhadap orang Irian adalah "**orang malas, bodoh, kotor**", sebaliknya kebiasaan orang Irian terhadap golongan Amberi, adalah "**pencari makan dan pencari untung di Irian, pembawa hal-hal yang kotor (pelacur, pencuri, pengemis, dan lain-lain kebiasaan) yang belum dikenal dan dianggap "kotor" oleh orang Irian. Perkawinan wanita/gadis dengan laki-laki dari etnis dan golongan agama yang berbeda, dipandang merusak harkat dan martabat suku dan keturunan maupun agama yang dianut.**
- 4) Agama baik Islam, Protestan, Katholik, dan Hindu/Budha yang dianut sebagian besar orang Indonesia di Sorong adalah satu pola

yang menguntungkan di dalam proses kehidupan interaksi sosial antar warga maupun ikatan kerukunan antar warga anggota. Persamaan agama ini merupakan satu hal yang menguntungkan disegi pengendalian sosial.

- 5) Upaya-upaya pemerintah yang terwujud ke dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pembentukan pos-pos SISKAMLING, kerja bakti setiap hari Jumat di lingkungan RT/RW adalah media sosial yang memungkinkan terwujudnya pola interaksi sosial antar warga sehingga memungkinkan pembauran fisik dan kebudayaan. Demikian pula sistem kegiatan arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu dari RW V (ibu-ibu Kristen) adalah suatu media sosial yang mewujudkan ikatan kerukunan antar ibu-ibu yang seiman maupun menghilangkan atau memisahkan diri faktor-faktor yang kurang menguntungkan seperti nilai-nilai budaya, pengelompokkan diri dan sebagainya yang mendasar sehingga terjadi kesenjangan sosial. Hanya saja belum disadari sepenuhnya oleh keseluruhan warga RW/RT, warga jemaat, dan warga tetangga secara baik.
- 6) Beberapa kelompok etnis belum dapat menghilangkan sikap dan tingkah laku budaya-nya yang menganggap diri lebih tinggi derajat dan atau lebih kuat dari kelompok yang lain.

BAB VIII

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN REMU UTARA

A. Disiplin dalam Penanganan Limbah/Sampah Keluarga.

Menurut survei yang dilakukan dalam penelitian ini pada 45 rumah tangga di 15 wilayah Rukun Tetangga (RT) tentang jenis-jenis sampah keluarga dan cara-cara penanganannya, diperoleh jawaban secara berikut :

1. *Jenis-jenis Limbah/Sampah Keluarga*

Menurut klasifikasinya, adalah sebagai berikut pada tabel di bawah ini.

TABEL VIII. 1

**DAFTAR JENIS-JENIS SAMPAH KELUARGA
FREKWENSI (N) DAN PRESENTASE (%)
(N = 45)**

No.	Jenis - Jenis Sampah	Frekwensi (N)	Presentase (%)
1.	Sisa Makanan	45	100
2.	Kertas Kantong Plastik	45	100
3.	Bungkus Rokok	38	84,44
4.	Karton Bekas	15	33,33
5.	Kaleng Kosong	35	77,77
6.	Kaca / Beling	14	31,11
7.	Logam	8	17,77
8.	Kotoran Ternak	35	77,77
9.	Daun + Rerumputan	30	66,66
10.	Tekstil	23	51,11
11.	Kulit Sepatu	4	8,88

Sumber : Data Penelitian

2. *Cara-cara Penanganan Limbah/Sampah Keluarga*

Kegiatan penanganan limbah/sampah keluarga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut pada tabel di bawah ini.

TABEL VIII. 2
DAFTAR CARA PENANGANAN LIMBAH / SAMPAH
KELUARGA DI KELURAHAN REMU UTARA
(N = 45)

No.	Cara - Cara Penanganan	Frekwensi (N)	Presentase (%)
1.	Di Bakar.	37	82,22
2.	Dibuang ke tong sampah di depan rumah.	26	57,77
3.	Dibuang ke tempat pe - nampungan sampah umum.	18	40
4.	Dibuang ke sungai.	38	62,22
5.	Dibuang ke rumpun pi - sang/bambu dibelakang rumah.	25	55,55
6.	Dibuang ke hutan.	23	51,11
7.	Di kubur.	18	40

Sumber : Data Penelitian

Cara penanganan limbah/sampah keluarga di atas ini dilakukan dalam dua pola kegiatan, yaitu secara individual dan secara kolektif. Secara individual, dimaksudkan ditangani oleh keluarga atau rumah tangga yang bersangkutan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan secara kolektif dimaksudkan ialah penanganan yang dilakukan secara bersama-sama melalui kegiatan kerja bakti ditingkat RW/RT atas prakarsa Ketua RW/RT.

Mereka yang membuang sampah keluarga ke tong-tong sampah di depan rumah umumnya terjadi pada rumah-rumah keluarga yang berbentuk kompleks (kompleks pertokoan, perumahan pegawai) dan lain-lain pemukiman yang letaknya teratur. Kemudian untuk pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan atau pembuangannya ke tempat umum pembuangan sampah di Kilometer 10 dilakukan oleh petugas (karyawan) Kantor Kecamatan Sorong dengan menggunakan fasilitas mobil sampah yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun demikian di dalam kenyataannya juga sering kali mengalami hambatan untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan karena fasilitas mobil sampah dan tenaga yang kurang dikaitkan dengan penduduk yang banyak sampah-sampah/limbah keluarga itu bisa tetap tertimbun di wadah itu sampai berbulan-bulan lamanya (6 - 12 bulan ke atas). Apabila sudah menjadi penuh keadaannya menjadi busuk dan berserakan

keluar tong-tong sampah sehingga mengotorkan jalan-jalan raya yang dilewati kendaraan maupun pejalan kaki.

Sedang mereka yang tidak membuang sampah keluarga ke sungai adalah para rumah tangga yang membangun rumah/pemukiman mereka disepanjang Sungai Remu dan sungai-sungai kecil lainnya, mereka yang membuang sampah keluarga ke hutan dan ke rumpun-rumpun pisang atau bambu adalah mereka yang membangun pemukiman mereka dekat hutan dan rumpun-rumpun pisang atau bambu. Mereka ini kebanyakan golongan masyarakat berpenghasilan rendah (petani, buruh, pegawai golongan I dan II, pekerja jasa, penggali pasir dan batu).

Peraturan secara tertulis tentang cara-cara penanganan limbah/sampah keluarga belum ada. Demikian pula ketentuan yang tegas dari pemerintah tentang keadaan ini juga belum ada.

B. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Sosial.

Kegiatan-kegiatan sosial yang diidentifikasi dari 45 responden di Kelurahan Remu Utara terdiri dari : (1) kegiatan keagamaan, (2) kegiatan keamanan, (3) kegiatan kesehatan, (4) kegiatan kearisan, (5) kegiatan kerja bakti, (6) kegiatan olah raga dan (7) kegiatan sumbangan duka.

Ditanyakan tentang keaktifan dari tiap responden dalam jenis-jenis kegiatan sosial tersebut, maka menurut frekwensi (N) dan presentase keikutsertaannya sebagai berikut pada tabel di bawah ini.

TABEL VIII. 3
DAFTAR JENIS KEGIATAN RESPONDEN

No.	Jenis Kegiatan	Frekwensi (N)	Presentase (%)
1.	Keagamaan	45	100
2.	Keamanan (KAMLING)	45	100
3.	Kesehatan (POSYANDU)	37	82,22
4.	Kegiatan Arisan	23	51,11
5.	Kerja Bakti	45	100
6.	Kegiatan Olah Raga	10	22,22
7.	Kegiatan Sumbangan	39	86,66

Sumber : Data Penelitian

Partisipasi tiap warga masyarakat di Kelurahan Remu Utara dalam kegiatan keagamaan dilakukan secara 100%. Kegiatan keagamaan ini meliputi kegiatan kebaktian, pengajian, kegiatan bazaar dan kegiatan arisan.

Kegiatan kebaktian (untuk agama Kristen) dilakukan baik secara kolektif di gereja, juga secara kelompok-kelompok menurut jenis kelamin dan tingkatan usia. Partisipasi dari tiap warga masyarakat di Kelurahan Remu Utara terhadap kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan oleh orang lelaki secara 100%. Kegiatan ini dilakukan atas anjuran pemerintah tentang keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat di tingkat kelurahan sampai ke RW/RT. Ditanyakan tentang suka tidaknya responden terhadap jenis kegiatan itu, ternyata sebagian besar (84,44%) menjawab kurang suka, dan sebagian kecil (15,55%) menjawab biasa-biasa saja. Bagi responden yang menyatakan kurang suka terhadap jenis kegiatan keamanan (SISKAMLING) itu memberi alasan bahwa kegiatan itu terpaksa dilakukan dari pada dimarahi dan dibayar denda. Sedangkan mereka yang menyatakan biasa-biasa saja memberi alasan merupakan kewajiban dari setiap warga masyarakat untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungannya masing-masing. Kecuali sebagai kewajiban, juga mendapat teman yang banyak, dan pula bisa mendapat tambahan nilai (uang) dari mereka yang berhalangan tugas.

Ditanyakan tentang permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan itu, sebagian besar responden (84,54%) menyatakan "**ada masalah**", yaitu ketidak patuhan dan ketaatan dari para anggota masyarakat terhadap ketentuan waktu dan jadwal juga yang tidak bertanggung jawab, maupun meremehkan petugas malam (Hansip) dari masyarakat dan oknum-oknum tertentu dari anggota ABRI. Sikap tersebut terlihat ketika yang bersangkutan bersalah atau melanggar peraturan dan ditegur oleh petugas.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kesehatan, terutama kegiatan POSYANDU sebagian besar responden (82,22%) menyatakan senang, dan sebagian kecil responden (17,87%) menyatakan tidak ikut. Bagi responden yang menyatakan "**senang**" memberi alasan agar ibu dan anak-anak mereka sehat. Sedangkan bagi responden yang menyatakan tidak ikut kegiatan itu karena "**kesibukan**" keluarga yang tidak berada di tempat maupun kesulitan biaya, kalau anggota keluarga sakit, dibawa ke PUSKESMAS terdekat.

Kegiatan arisan, dapat dilakukan oleh kelompok ibu-ibu, dan presentase kecil (51,11%). Mereka memberi alasan bahwa kalau terlalu banyak anggota, sulit diatur. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan yang sudah menerima uang arisan dalam suatu undian tertentu tidak disiplin lagi dalam penyeteroran. Kecuali itu,

kebanyakan ibu-ibu berlatar belakang ekonomi lemah, sehingga sibuk dalam kegiatan rumah tangga masing-masing.

Kerja bakti, merupakan kewajiban dari setiap anggota warga RT/RW. Karena itu ketika ditanya, seluruh responden (100%) menjawab mengikuti kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal. Meskipun dikatakan bahwa jenis kegiatan itu dilakukan setiap hari Jumat, namun kenyataan yang diamati keadaan kerja bakti setiap hari Jumat itu tidak dilaksanakan secara konsekwen di lingkungan masing-masing RT/RW yang ada. Kegiatan itu dapat berlangsung apabila diperintah secara langsung dari Ketua RW atau instruksi dari kelurahan. Kesadaran warga penduduk masih rendah, karena kepentingan pribadi diutamakan dari pada kepentingan umum. Misalnya, pegawai negeri yang bertugas di kantor melakukan kerja bakti di kantornya, masyarakat sibuk menggali batu dan pasir, serta berjualan ke pasar.

Partisipasi warga terhadap kegiatan olah raga, merupakan kegiatan para remaja. Sedangkan orang tua kurang sekali melakukan kegiatan olah raga di lingkungan RT/RW masing-masing. Olah raga yang banyak diikuti oleh para pemuda/pemudi di lingkungan RT/RW dari Kelurahan Remu Utara ialah bola volly, oleh karena itu presentase kegiatan olah raga kecil (22,22%).

Kegiatan sumbangan yang dimaksudkan ialah sumbangan sukarela dari setiap warga penduduk bila ada sesama warga yang tertimpa nasib malang (musibah, kematian), menyelenggarakan pesta kawin, maupun untuk membangun gereja atau dan mesjid di lingkungan daerah setempat.

Ditanyakan tentang sanksi yang dikenakan kepada warga yang lalai atau tidak terlibatan dalam kegiatan tersebut, semua responden (100%) menyatakan ada sanksi, hanya berupa teguran saja. Kecuali tugas KAMLING, mereka yang tidak bertugas harus membayar denda berupa pembayaran uang sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.500,- per orang. Mengikuti sertakan semua warga masyarakat dalam kegiatan keamanan, terutama kegiatan Keamanan Lingkungan (KAMLING) di tingkat RW/RT adalah untuk menata lingkungan hidup yang aman dan tertib, bersih, dan indah serta menyenangkan. Kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) demi untuk kepentingan bersama, sehingga mewajibkan semua orang laki-laki menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan yang nyaman, sehat dan tentram.

Ditanyakan kepada Ketua Rukun Wilayah (RW) di Kelurahan Remu Utara, tentang sampai sejauh mana tingkat disiplin masyarakat di lingkungan terhadap jenis-jenis kegiatan tersebut di atas, maka diperoleh jawaban bahwa kesadaran

dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari jenis kegiatan itu bagi kepentingan bersama masih kurang (55%). Keinginan yang diharapkan agar menjadi suatu kebiasaan hidup yang dilaksanakan tanpa perintah siapapun di dalam kehidupan masyarakat, dikatakan keadaannya "**amat sulit**", mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berbeda-beda.

C. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan.

Ditanyakan tentang ketaatan warga penduduk, khususnya kepala Rumah Tangga di lingkungan wilayah RW/RT se - Kelurahan Remu Utara terhadap ketentuan melaporkan kelahiran, perkawinan, kematian, tamu dan atau orang yang baru datang, warga yang pindah, warga penduduk yang bepergian keluar ke kota lain karena sesuatu kepentingan, dan lain-lain kejadian kepada RW/RT setempat, diperoleh jawaban yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. *Ketaatan terhadap Ketentuan Melaporkan Kelahiran, Perkawinan dan Kematian.*

Jawaban yang diperoleh dari 15 orang pimpinan RT yang dihubungi sebagai informan, 8 orang (53,33%) memberi jawaban bahwa warga penduduk sudah mengetahui ketentuan tersebut, tetapi tidak pernah melaksanakan ketentuan itu; 4 orang (26,66%) memberi jawaban bahwa seringkali ada warga penduduk di lingkungan RT-nya melaporkan kejadian itu, tetapi ada pula yang belum sadar akan ketentuan itu; dan 3 orang pimpinan RT lainnya (20%) memberikan jawaban bahwa warga penduduk di lingkungan RT-nya melaporkan kejadian itu kepada RT, namun hal itu terjadi bukan karena kesadaran sendiri melainkan Ketua RT dan stafnya mendatangi setiap warga penduduk untuk mengkonfirmasikannya.

2. *Ketaatan terhadap Ketentuan Melaporkan Tamu dan atau Orang Baru Datang.*

Semua informan (100%) memberikan jawaban bahwa semua warga penduduk mengetahui ketentuan itu, tetapi belum pernah melaksanakan ketentuan tersebut. Mereka menganggap ketentuan itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja.

3. *Ketaatan terhadap Ketentuan Melaporkan Kepindahan.*

Jawaban tentang orang yang pindah, sebagian besar informan (85%) menyatakan bahwa kebanyakan orang dari lingkungan RT-nya yang sudah pindah tidak pernah melaporkan kepindahannya kepada RT setempat. Lebih

lanjut ditambahkan bahwa orang-orang itu pindah tidak melaporkan kepindahannya. Di tempat yang baru mereka menemukan kesulitan ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya, karena menurut ketentuan (persyaratan) mereka harus membawa dan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah dari kelurahan di mana mereka berasal. Karena mereka tidak memiliki Surat Keterangan Pindah tersebut, mereka mengirim berita lagi kembali kepada kerabat yang tinggal di sini, untuk tolong mengurusnya ke kelurahan melalui RT/RW, setempat. Ketua RT/RW tidak melayani, mereka marah, langsung mengurus ke kelurahan. Di Kelurahan, Pak Lurah menegur dan memarahi RT/RW, padahal yang bersalah adalah warga penduduk itu sendiri. Menurut ketentuan sebenarnya tidak dilayani dengan memberi Surat Keterangan Pindah, tetapi karena perasaan kemanusiaan akhirnya diberikan surat keterangan tersebut. Kesadaran penduduk kita tentang hak dan kewajiban ini sangat kurang sekali, kata informan.

4. *Ketaatan terhadap Ketentuan Melaporkan Rencana Kepergian Keluarga ke kota lain.*

Demikian pula keadaannya dengan orang-orang dari warga penduduk RT/RW yang merencanakan bepergian keluar mengunjungi kerabat ke kota lain lalu meninggalkan tempat, diperoleh jawaban dari semua informan (100%) bahwa tidak pernah melapor kepada RT/RW setempat tentang rencana bepergiannya. Dikatakan bahwa orang-orang itu secara langsung membeli ticket kapal kemudian berangkat. Mereka menganggap keadaan itu sebagai suatu kebiasaan saja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa bukan saja tidak melapor ke RW/RT setempat, tetapi juga kepada pihak Kepolisian Resort Sorong untuk mendapatkan Surat Jalan. Mereka berangkat dengan tidak mempunyai Surat Jalan, padahal menurut ketentuan yang berlaku setiap orang yang bepergian kemana-mana saja harus memiliki Surat Jalan, jadi warga penduduk yang bepergian tanpa Surat Jalan ini, sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditanyakan tentang sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran ini, diberi jawaban **"tidak ada tindakan hingga sekarang ini"**.

5. *Ketaatan terhadap Ketentuan Pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).*

Pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu persyaratan utama bagi warga penduduk yang syah, maka berdasarkan ketentuan itu kantor Kelurahan Remu Utara mengeluarkan suatu pengumuman yang bersifat pemberitahuan kepada warga penduduk di kelurahan tersebut.

Namun seperti diungkapkan oleh kepala kelurahannya bahwa ketentuan administrasi ini belum dipatuhi sebagian besar warga penduduk Kelurahan Remu Utara. Sebagai bukti, jumlah penduduk warga Kelurahan Remu Utara yang wajib memiliki KTP berjumlah 11.743 orang, terdiri dari laki-laki 5.872 orang, dan perempuan 5.871 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 5.157 orang, dengan perincian laki-laki 2.224 orang dan perempuan 2.933 orang, berarti sisa penduduk yang belum memiliki KTP berjumlah 6.588 orang (56,10%), hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar warga penduduk Kelurahan Remu Utara belum mematuhi ketentuan administrasi pemerintahan tersebut di atas. Mereka ini diwaktu yang tidak ada kepentingan, tidak sibuk mengurus KTP. Nanti diwaktu ada permintaan lowongan kerja, amat sibuk mengurus KTP. Akhirnya membuat kita ini sibuk melayani mereka sehingga pekerjaan atau kepentingan lain tertunda atau terhalangi oleh pengurusan KTP, dari warga penduduk yang tidak mematuhi peraturan. Ditanyakan tentang sanksi administrasi, dikatakan tidak ada, hanyalah bersifat teguran saja.

Informasi kedua : Ketua-Ketua RT. Dijelaskan bahwa sebagian besar (60%) dari warga penduduk di masing-masing RT belum mematuhi ketentuan persyaratan pemilikan KTP sebagai warga penduduk yang syah.

Mereka menganggap pemilikan KTP dan tidak memiliki KTP itu sebagai suatu hal yang sama saja, nanti setelah menyadari betapa pentingnya arti pemilikan KTP, barulah menjadi sibuk. Apabila kita menegur mereka dan tidak mau melayani, mereka jadi marah. Ini sikap yang jelek dari warga penduduk kita di RT ini. Mereka menganggap remeh RT/RW setempat, sehingga sering tidak melaporkan keadaannya kepada RT setempat. (Data dari hasil penelitian).

Kemudian itu, ketika dilakukan pendekatan obyektif yang menggunakan pengetahuan tersebut di atas untuk melihat dan memahami hal-hal yang kongkrit dalam masyarakat yang diteliti di Kelurahan Remu Utara untuk mengkonfirmasi informasi tersebut di atas, melalui 45 responden yang diambil dari 15 wilayah RT, diperoleh jawaban yang pada hakekatnya menunjukkan keadaan yang sama dengan informasi tersebut di atas, hal mana dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL VIII. 4
JENIS KEPERLUAN KE KANTOR KELURAHAN
(N = 45)

No.	Jenis Keperluan	Frekwensi (N)	Presentase (%)
1.	Mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).	5	11,11
2.	Mengurus Kartu Ke - luarga.	3	6,66
3.	Memperbaharui KTP.	5	11,11
4.	Mengurus Masalah Ta- nah.	12	26,66
5.	Menghadiri Ceramah.	6	13,33
6.	Belum pernah ber - urusan.	10	22,22
7.	Tidak diperinci.	4	
J U M L A H		N = 45	100,00

Sumber : Data Penelitian

Dari 45 responden, 26,66% (12 orang) menyatakan bahwa keperluan mereka ke Kantor Kelurahan ialah untuk mengurus masalah tanah, dan 22,22% (10 orang) belum pernah berurusan ke Kantor Kelurahan. Sedangkan responden yang memberikan jawaban pengurusan Kartu Keluarga dan KTP hanya 11,11% (5 orang).

Memperbaharui Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah melaksanakan suatu jenis keperluan yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang masa penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditetapkan masa berlakunya 2 tahun, setelah itu diganti atau diperbaharui KTP tersebut untuk 2 tahun selanjutnya. Ditanyakan tentang sanksi bagi mereka yang terlambat memperbaharui KTP-nya, diperoleh jawaban bahwa biasanya hanya berupa teguran saja.

Selanjutnya ketika ditanyakan tentang keperluan apa Bapak/Ibu pergi ke Rukun Wilayah dan Rukun Tetangga, para responden umumnya memberi jawaban bahwa mereka ke RW/RT untuk mengurus surat pengantar ke kelurahan dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Kecuali itu, juga menghadiri rapat-rapat umum yang diselenggarakan oleh RW/RT dalam menginformasikan sesuatu kepentingan

umum. Disamping itu, sebagian besar dari para responden (31,11%) menyatakan bahwa mereka belum pernah berkomunikasi dengan ketua RW/RT dalam suatu urusan. Semua kepentingan mereka, biasanya langsung ke Kantor Kelurahan dan atau ke Kantor Kecamatan. Keadaan ini menunjukkan ketidaksadaran warga penduduk terhadap fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW).

D. Disiplin dalam Hubungan Ketetangaan.

Menurut data yang diperoleh dari penelitian, hubungan pergaulan antar tetangga, menunjukkan adanya sikap yang toleran, akrab, dan rukun. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam hubungan antar tetangga, antara lain seperti digambarkan di bawah ini :

1. Masalah Kematian (Kedukaan)

Dari 45 responden yang diwawancarai, semuanya (100%) memberi jawaban bahwa menurut kebiasaan yang terjadi di lingkungan pemukiman mereka, jika ada warga anggota yang meninggal, mereka secara spontan memberi bantuan berupa material maupun moril kepada keluarga yang berduka. Berupa material, ialah misalnya memberi pinjaman kursi, terlibat secara bersama-sama membuat tenda, menyumbang uang lewat daftar sumbangan kedukaan/kematian yang diedarkan oleh ketua dan atau staf RT/RW setempat, para pemilik kios/warung memberikan gula, teh/kopi, dan beras, bantuan kendaraan, sopir, dan lain keperluan kepada keluarga yang berduka. Sedangkan berupa moril, ialah ikut menjaga dan memelihara ketenangan suasana lingkungan terhadap kebisingan arus lalu lintas jalan raya baik kendaraan bermotor maupun manusia, mengikuti upacara pemakaman jenazah, upacara syukuran (malam hiburan), dan lain kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga berduka.

2. Masalah Kesakitan

Dari 45 responden itu, 26 responden (57,77%) memberi jawaban bahwa menurut kasus yang kebanyakan terjadi di lingkungan mereka terhadap anggota warga yang sakit keras dalam kondisi yang kritis mereka membantu dengan kendaraan mobil untuk mengantarkan ke Rumah Sakit, 10 responden (22,22%) menyatakan bahwa mereka membantu dengan memberi pertolongan pertama seperti memberi obat kepada si pasien yang menderita, 6 responden menyatakan bahwa membantu dengan cara memanggil perawat untuk

memberi bantuan pengobatan, 3 responden memberikan jawaban bahwa mereka melayani dengan cara mendoakan kesembuhan dan memberikan pelayanan rohani.

3. *Masalah Konflik Sosial dan Cara Mengatasi*

Tentang masalah-masalah konflik sosial yang terjadi dalam hubungan antar tetangga seperti perselisihan yang bersifat *diadic*, sehingga menimbulkan kerugian di satu pihak dan bagaimana pihak yang merasa dirugikan itu bertindak untuk mengatasi ketidakpuasannya dan atau menyampaikan keluhannya, maka diperoleh jawabannya sebagai berikut :

Dari 45 responden yang diwawancarai, 16 responden (35,55%) memberi jawaban bahwa setelah kedua belah pihak menyadari adanya perselisihan di antara mereka, maka pihak yang merugikan menyelesaikan masalahnya dengan pihak yang merasa dirugikan melalui jalan perundingan secara damai dengan memohon maaf sambil berjabat tangan, 9 responden (20%) memberi jawaban bahwa mereda atau meningkat perselisihan bergantung bagaimana kedua belah pihak mengajukan tuntutan dan tawaran mereka satu sama lain. Apabila tingkat konflik itu berkembang menjadi masalah yang diketahui umum, maka pihak yang merasa dirugikan menyelesaikan masalahnya dengan melalui pihak ketiga, yaitu melapor ke RT/RW dan atau polisi untuk diselesaikan menurut proses hukum yang berlaku; 8 responden (17,77%) memberikan jawaban bahwa seperti 2 (dua) kasus yang pernah terjadi berawal dari perselisihan kedua belah pihak yang terlibat antara si A dengan si D menyebabkan si D membunuh si A yang berkembang menjadi masalah umum kelompok etnis. Kelompok etnis si A yang merasa dirugikan si D mengambil tindakan kekerasan dengan melakukan pembalasan pembunuhan dan penganiayaan terhadap kelompok etnis si D secara keseluruhan tanpa memikirkan orang itu bersalah atau tidak (prinsipnya asal dari daerah dan kelompok etnis yang sama dengan si D). Tingkat penyelesaiannya yang terakhir adalah melalui polisi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; sedangkan 11 responden (24,44%) memberikan jawaban bahwa mereka menjumpai kondisi konflik yang juga dipandang merugikan mereka dan membuat marah dan mengeluh, tetapi mereka sabar dan berdiam diri saja sementara itu menyerahkan saja kepada Tuhan untuk membalasnya sesuai dengan perbuatan yang tak terpuji itu.

4. Masalah Perkelahian anak-anak

Tentang perkelahian atau perselisihan yang terjadi ditingkat hubungan antar anak-anak, kemudian berkembang ke tingkat orang tua dan/atau keluarga dari anak-anak yang berkelahi atau berselisih, semua responden (100%) memberi jawaban bahwa masalahnya dianggap masalah anak-anak yang belum mengerti dan belum sadar baik-baik apa yang dibuatnya. Cara mengatasinya ialah membiarkannya saja, dan/atau kedua orang tua belah pihak saling bertemu, memberitahukan permasalahan itu, kemudian saling memohon maaf satu sama lain.

5. Sistem Pengelompokkan Sosial dan Alasan Pengelompokkan

Seperti disebutkan pada bagian kehidupan sosial dan budaya tentang pola interaksi sosial dan kerukunan antar warga di daerah penelitian, maka hubungan antar tetangga di daerah Kelurahan Remu Utara keadaannya sama, yaitu sistem kekerabatan masih mendominasi kuat dalam identitas diri. Hubungan pergaulan antara sesama tetangga yang merupakan dominasi kedua yang masih kuat, ialah berdasarkan satu daerah asal yang sama, dominasi ketiga ialah dengan yang sama tingkat ekonominya, dominasi keempat adalah dengan tetangga yang sama agama, dan dominasi kelima adalah dengan tetangga yang tinggal dekat saja.

Tentang alasannya, mereka pada umumnya (80%) memberi alasan bahwa hal itu memudahkan komunikasi dan kegiatan tolong menolong dalam sesuatu kekurangan dan atau kepentingan. Dikatakan bahwa sistem kekerabatan dan yang merupakan dominasi pertama karena menurut tradisi budaya "**merupakan pembantu utama di dalam segala kesulitan keluarga sebelum orang lain**".

Selain sistem kekerabatan sebagai dasar utama yang memperkuat identitas diri dari individu, juga perasaan *ingroup* dan *outgroup* masih tampak kuat dalam mengidentifikasi diri dan kelompok untuk membedakan diri dan atau kelompok dengan individu dan atau kelompok yang lain, keadaan ini diukur dari adanya istilah-istilah yang menyebut "**pribumi**" dan "**pendatang**" atau "**ambar/amberi**" (orang pendatang), istilah-istilah sebutan yang menekankan suku bangsa orang Manado, orang Bugis-Makassar (Makate), orang Jawa, orang Ayamaru, orang Biak, orang Serui, dan sebagainya untuk membedakan diri dan atau kelompok yang bukan identitas diri (kelompok luar).

Sebagai mekanisme pembentuk dan pengendali sikap dan tingkah laku individu dan kelompok sosial tersebut timbul pandangan-pandangan stereotip tentang sifat-sifat *outgroup* yang lain yang berada dalam lingkungan RT/RW yang sama atau berbeda, yang menjadi tetangga dengan istilah-istilah "**orang gunung**", orang udik, orang hutan (mengartikan orang gunung, pedalaman dipandang bersifat bodoh), pribumi terhadap pandangan dengan istilah "**makate**" sama dengan Bugis-Makassar dipandang bersifat licik, pedagang loak/kelontongan, selain itu dengan istilah lain "**pendatang**" sama dengan pencari makan, pencuri, pencari untung, pembawa hal-hal kotor (pelacur, pencuri, penipu, peminta dan lain-lain) sifat dan kebiasaan yang sebelumnya tidak dikenalkan dan dianggap "**kotor dan tidak baik**" oleh pribumi Irian. Sebaliknya anggapan pendatang dan/atau Amberi terhadap sifat-sifat pribumi Irian dengan istilah "**dasar Irian**" sama dengan memang dari Irian yang mengartikan sifat "**bodoh, malas, kotor, dan terbelakang dan atau orang tidak maju**".

Demikian beberapa jawaban yang diperoleh tentang dasar-dasar pengelompokkan sosial dan pandangan-pandangan bersifat stereotip terhadap diri individu dan/atau kelompok orang lain di lingkungan yang menjadi tetangganya.

BAB IX

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN REMU UTARA

Sarana dan fasilitas kota seperti dideskripsikan pada bagian pertama, gambaran umum Kota Sorong, baik tentang sarana perekonomian, tempat-tempat hiburan, sarana olah raga, kesehatan, pendidikan, terminal, maupun perkantoran dan fasilitas lainnya itu, tersebar di berbagai lingkungan kelurahan yang ada di Kota Sorong. Di lingkungan Kelurahan Remu Utara yang dijadikan daerah penelitian, sarana perekonomian hanya terbatas pada pertokoan; sedangkan pasar, terminal, dan tempat-tempat hiburan (bioskop, bar/discotik, *coffee house*, dan tempat bilyard) berada di lingkungan pemukiman kelurahan yang lain di Kota Sorong. Meskipun berada di lingkungan kelurahan yang lain, akan tetapi tidak jauh (jaraknya ± 1.500 meter) dan arus lalu lintas angkutan umum (taxi) sangat lancar.

Deskripsi tentang disiplin masyarakat di lingkungan tempat-tempat umum di Kelurahan Remu Utara, akan dibatasi pada disiplin di lingkungan pertokoan dan disiplin di jalan raya.

A. Disiplin di Lingkungan Pertokoan.

1. *Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Kebersihan Lingkungan*

Konsepsi masyarakat setempat tentang arti bersih, bagus, indah dan sehat pada dasarnya memang sudah ada pada tiap warga masyarakat setempat. Namun, hanya perwujudan sikap dan perilaku yang terbiasa secara sadar di dalam pelaksanaannya masih merupakan permasalahan yang menuntut pembenahan yang serius. Karena menurut data yang diberikan oleh beberapa pimpinan daerah yang terlibat dalam Tim Ketertiban Umum Kota Sorong tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap Program 5 K. (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, dan Kekeluargaan).

Dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang (baru 55%). Meskipun Program 5 K. itu dituliskan di papan-papan besar kemudian didirikan di tempat-tempat strategis, seperti di persimpangan jalan raya yang ramai arus lalu lintas kendaraan jalan raya dan manusia, di depan kantor-kantor kelurahan, kecamatan maupun di kantor-kantor kepala desa. Padahal itu dimaksudkan untuk menggerakkan hati warga masyarakat agar ikut menjaga dan memelihara keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Khususnya tentang azas kebersihan dan keindahan pada point kedua (kebersihan) dan keempat (keindahan) dari Program 5 K. benar-benar belum disadari dengan baik. Kenyataannya bisa dilihat. Di pinggir jalan raya, di depan pertokoan, di dalam parit, di Sungai Remu yang terdapat timbun sampah yang banyak dan berbau busuk, meskipun sudah dengan tegas, dihibau. Sanksinya baru hanya berupa teguran. Sampah yang dibuang di Sungai Remu dilakukan secara tersembunyi pada waktu malam sehingga petugas tidak tahu.

Orang duduk di mobil seenaknya membuang sampah ke jalan, ke halaman toko dan sebagainya. Demikian pula penjaja makanan dan minuman di depan toko-toko seenaknya membuang sisa-sisa makanan secara sembarangan ke parit dan lain tempat di pinggir tembok terdekat. Keadaannya sama dengan mereka yang berbelanja. Sampah belanjanya dibuang saja di depan toko atau sekitarnya tanpa menyadari bahwa di tempat itu bukan tempat pembuangan sampah. Pemerintah sudah menyiapkan bak-bak (tempat) sampah di berbagai tempat umum termasuk pertokoan. Namun umumnya masyarakat belum memanfaatkannya dengan baik.

2. *Ketaatan dan Kepatuhan terhadap hari Kerja Bakti*

Salah satu ketentuan umum di Kelurahan Remu Utara untuk warga masyarakat yang menjadi penduduk di kelurahan itu, ialah pelaksanaan kerja bakti secara rutin dilaksanakan pada setiap hari Jumat tiap minggu. Ketentuan ini mengharuskan tiap warga melibatkan diri untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan pemukiman sehingga menjadi tempat yang indah, sejuk, nyaman dan berkesan di pandangan umum maupun demi untuk kesehatan lingkungan. Melihat tingkat partisipasi warga masyarakat pemilik toko, masih ada yang belum sepenuhnya ikut bersama, bahkan sama sekali tidak pernah mematuhi ketentuan tersebut karena alasan sibuk dengan bisnis.

3. *Tanggung Jawab sebagai Warga Negara terhadap Kegiatan Hari-Hari Nasional*

Setiap kali ada kegiatan dalam rangka peringatan hari-hari nasional, seperti misalnya Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus), dan Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober) Bupati mengintruksikan mengibarkan bendera dalam rangka memperingati hari-hari nasional tersebut. Namun menurut penilaian penguasa setempat maupun dari para *marginalman* yang didekati dalam penelitian, bahwa menurut kenyataannya masih ada warga masyarakat pemilik toko yang belum

sepenuhnya mematuhi intruksi Bupati itu. Mereka tidak mengibarkan bendera di depan toko-toko mereka, meskipun mereka memang tidak melakukan kegiatan dengan tidak membuka toko-toko mereka sampai pada sore hari.

4. *Ketaatan terhadap Tata Aturan dan Kaidah-Kaidah Sosial di lingkungan Pertokoan*

Lingkungan pertokoan di sini dianggap sebagai tempat umum yang sangat ramai dan padat arus lalu lintas baik manusia maupun kendaraan-kendaraan bermotor yang bagi para penjaja makanan dan minuman dianggap sebagai suatu tempat strategis yang sangat menguntungkan, sehingga terdapat sejumlah penjaja makanan dan minuman yang berjualan di depan maupun di samping toko.

Situasi di lingkungan itu menunjukkan keadaan yang benar-benar memperlihatkan orang-orang sibuk dengan kepentingan dan keinginan masing-masing sehingga tentunya tidak jarang orang kurang memperhatikan orang lain maupun tidak memperdulikan kepentingan-kepentingan umum demi kepuasan pribadinya. Keadaannya di lingkungan ini sungguh menjadi tontonan yang sangat menarik karena memperlihatkan berbagai ragam corak sikap dan tingkah laku manusia yang berbeda-beda yang tentunya pula tidak jarang menyimpang dari tata aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku secara umum.

Beberapa sikap dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari tata aturan dan norma-norma sosial yang berlaku secara umum dapat diukur dari hal berikut :

1) Nilai Kesopanan terhadap Ketertiban Umum.

Untuk mengukur sikap dan tingkah laku ini, dilakukan suatu pengamatan dengan membuat perbandingan antar orang dewasa dengan pemuda remaja yang sedang berada di lingkungan pertokoan. Bagaimana sikap dan tingkah laku orang dewasa dan pemuda remaja di tempat-tempat umum seperti ini; apakah orang dewasa lebih bersikap sopan dari pada pemuda remaja.

Menurut hasil penelitian ketika mengamati sikap setiap orang yang masuk-keluar toko maupun mereka yang berada di luar toko, nampak bahwa orang dewasa atau orang tua lebih sopan dari pada pemuda remaja atau anak-anak muda. Orang dewasa/orang lebih tua bersikap tenang, ramah tamah, saling memberi salam, dan lebih bersifat menghormati

orang lain. Sebaliknya, pemuda remaja (anak-anak muda) yang masuk keluar toko maupun yang sedang berada di luar toko, bersikap kurang sopan. Keadaan ini dinilai dari beberapa gejala yang diperlihatkan sebagai berikut :

- a. Ribut-ribut dan berteriak-teriak yang tentunya mengganggu ketenangan umum;
- b. Ada pemuda yang mabuk, memecahkan botol-botol kosong ke dinding tembok pertokoan, ke parit, sementara itu mengganggu perempuan yang sedang lewat di depannya;
- c. Ada pemuda yang berkelahi karena mabuk. Mereka berteriak-teriak dan seringkali menghadang kendaraan yang lewat. Kejadian pada umumnya terjadi pada malam hari;
- d. Di malam hari, lingkungan pertokoan itu menjadi arena transaksi kegiatan prostitusi (pelacuran). Kebanyakan pemuda remaja wanita dengan para hidung belangnya;
- e. Tindakan-tindakan kriminalitas seperti disebutkan pada bagian permasalahan kota (pengeroyokan, penganiayaan, pencurian dan perkosaan) kebanyakan dilakukan oleh pemuda remaja. Kejadian-kejadian itu pada umumnya terjadi di tempat-tempat umum, termasuk lingkungan pertokoan.

2) Kepatuhan terhadap nilai-nilai dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku umum.

Di tempat-tempat umum termasuk lingkungan pertokoan ini, ada orang-orang yang benar-benar memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan konsepsi-konsepsi ajaran agama yang dianut, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku umum sebagai pedoman untuk bertindak.

Pergeseran nilai-nilai, norma-norma sosial, dan konsepsi-konsepsi umum yang baik itu, dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

- a. Ada orang yang duduk di atas pagar dan tembok-tembok yang bukan merupakan tempat duduk;
- b. Ada orang yang melompat pagar, yang sebenarnya bukan merupakan tempat (pintu) keluar;
- c. Sikap dan tingkah laku tidak peduli kepentingan umum, seperti membuang sampah secara sembarangan keluar jendela mobil, dan atau di atas kendaraan truk;

- d. Parkir kendaraan menghalangi pintu keluar, menghalangi tempat-tempat dari sisi pejalan kaki;
- e. Mencoret-coret tembok dinding toko-toko;
- f. Agama mengajarkan orang harus berkawan dengan orang lain, hormat menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri, hidup rukun dan damai, tidak boleh menipu sesama manusia, harga-menghargai orang lain, dan lain-lain sikap dan tingkah laku yang positif, keadaannya menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai norma-norma dan konsepsi-konsepsi ajaran agama itu. Misalnya, adanya terjadi perkelahian antar sesama, adanya sikap dan tingkah laku acuh terhadap sesama, tidak memperdulikan kepentingan umum, dan lain-lain tidak terpuji seperti disebutkan di atas di tempat umum seperti di lingkungan pertokoan itu;
- g. Kehidupan antar sesama pemilik toko, keadaannya harmonis, karena adanya saling ketergantungan meskipun adanya persaingan di dalam merebut prasarana dan sarana dalam upaya *bisnis*-nya. Tugas dan tanggung jawab pramuniaga terhadap majikan, keadaannya baik dan sangat sopan. Mereka taat dan patuh terhadap segala perintah majikan di dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian beberapa gejala yang diperoleh dalam penelitian tentang disiplin di lingkungan pertokoan yang berada di Kelurahan Remu Utara sebagai tempat umum yang selalu ramai dan padat dengan manusia dan kendaraan-kendaraan bermotor.

B. Disiplin di Jalan Raya.

Jalan raya di sini merupakan suatu tempat umum yang dapat digunakan oleh semua orang. Kebebasan manusia untuk menggunakan jasa jalan raya itu telah diatur menurut ketentuan-ketentuannya, sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketentuan-ketentuan yang bersikap hukum tersebut di antaranya :

1. Tanda-tanda yang disebut rambu-rambu lalu lintas jalan raya;
2. Bagi para pengemudi kendaraan diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Pemilik Kendaraan (SPK);
3. Bagi para pengemudi kendaraan sepeda motor, diwajibkan menggunakan pelindung kepala (helm);
4. Para pengemudi kendaraan beroda empat (mobil) diwajibkan memiliki tipe SIM yang sesuai dengan jenis dengan berat mobil yang dikemudikan;

5. Para pejalan kaki harus berjalan di sebelah kiri jalan raya;
6. Bagi pejalan kaki, tidak boleh menyeberang jalan di sembarangan tempat (menyeberang jalan di tempat-tempat yang diberi tanda khusus berupa garis-garis bercat putih hitam);
7. Pengaturan lalu lintas angkutan jalan raya, patroli, pengendali dan pengawasan lalu lintas jalan raya, adalah wewenang Departemen Perhubungan Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) dan Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sorong.

Tentang sampai sejauh tingkat disiplin masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut di jalan raya, maka diperoleh penjelasan dari Satlantas Kepolisian Resort Sorong, bahwa :

"Pelanggaran masyarakat di sini terhadap ketentuan-ketentuan hukum lalu lintas tersebut memang tidak bisa terelakan. Karena apa yang dinamakan manusia tidak akan terlepas dari kesalahan dan kehilapan. Maka dalam hal ini tentunya pula tidak terlepas dari pelanggaran lalu lintas jalan raya. Berbagai jenis dan pola pelanggaran lalu lintas yang telah disebutkan semua itu terjadi sebagai akibat dari pengaruh disiplin yang kurang dalam mentaati dan mematuhi segala peraturan yang ketentuan hukum lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Data terperinci tentang pelanggaran lalu lintas di jalan raya pada masing-masing kelurahan yang berada di jalur 9 Km (termasuk Kelurahan Remu Utara) tidak tercatat secara khusus. Namun diperkirakan 28% dari semua kasus pelanggaran (810 kasus di tahun 1992) terjadi pada jalan-jalan raya yang ada di Kelurahan Remu Utara.

Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan kebanyakan dari faktor manusia (75%). Sisanya dari faktor kendaraan dan faktor alam (cuaca). Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang ada di Kelurahan Remu Utara kebanyakan terdiri dari : langgar tanpa surat (SIM dan STNK), jalan tidak pada tempatnya, salah parkir, langgar rambu-rambu lantasi, tidak mengenakan helm (pelindung kepala), dan melampaui ketentuan skala waktu penggantian plat kendaraan (hasil penelitian)."

Berdasarkan penjelasan oleh pihak berwajib tersebut di atas tentang disiplin masyarakat di jalan raya, dapat disimpulkan bahwa tingkat disiplinnya masih kurang. Seperti pula dikatakan oleh Pejabat Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Sorong bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan pengemudi kendaraan bermotor masih kurang.

Demikian juga dapat terlihat pada orang yang berjalan kaki, mereka yang menyeberang jalan tidak di tempat penyeberangan. Menurut ketentuan lalu lintas, pejalan kaki harus berjalan di sebelah kiri jalan raya, akan tetapi pada kenyataan yang diamati ada pejalan kaki yang berjalan di sebelah kanan. Akibatnya, menimbulkan kecelakaan yang tidak bisa terelakan. Demikian pula parkir mobil yang tidak pada tempatnya.

Demikian beberapa gejala yang diamati berhubungan dengan disiplin di jalan raya, yang keadaannya menunjukkan adanya tingkat disiplin yang kurang dari masyarakat di jalan raya.

BAB X

UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA SORONG

A. Pembinaan oleh Pemerintah.

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat Kota Sorong agar dapat mematuhi dan mentaati peraturan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. *Pengembangan Kota Sorong*

Program pengembangan Kota Sorong ke arah timur tenggara dan selatan merupakan salah satu Rencana Induk Pembangunan Daerah. Program itu bertujuan untuk memperluas kota dan penyebaran penduduk. Di dalam hubungannya dengan disiplin di lingkungan masyarakat Kota Sorong, maka program pengembangan kota itu juga tercakup sebagai salah satu upaya perluasan kota dan jalan raya dalam rangka penertiban kota dari tingkat pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan dan pembangunan rumah-rumah yang tidak teratur dan kumuh.

Program pengembangan Kota Sorong itu telah diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan awal berupa :

1.1. Pada tahun 1991, Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong yang dipandang sebagai pusat pemerintah di pindahkan dari Remu Utara ke Kilometer 26 di Desa Klamalu, sehingga jarak mencapai 20 Kilometer.

1.2. Pembangunan kompleks-kompleks Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) di beberapa lokasi kosong di Desa Klasaman, Malanu, dan Desa Aimas.

Kompleks KPR-BTN itu menyebar di tiga pemukiman desa Kecamatan Sorong. Selain bertujuan untuk memperluas Kota Sorong, juga untuk memindahkan pendudukan kota yang padat; berarti juga berhubungan dengan mendistribusikan arus lalu lintas kendaraan yang hanya berpusat di jalur jalan 9 Kilometer tersebut, dan/atau hanya berpusat di jantung kota. Dengan demikian, maka program pengembangan kota yang berwujud pembangunan kompleks KPR-BTN itu juga tercakup upaya pemerintah daerah dalam rangka penataan pemukiman rumah-rumah yang teratur, bersih, indah tertib, dan berkesan sesuai program induk pemerintah tentang 5 K. (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan).

1.3. Pembangunan Lokasi Pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan Kota Sorong, maka perwujudannya dilakukan dengan menyebarkan pembangunan lokasi pendidikan berupa sekolah-sekolah, seperti halnya sudah diawali dengan pembangunan lokasi SMEA Negeri Sorong di Kilometer 10, Lokasi Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Kilometer 11, Lokasi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di Kilometer 12, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri II di Desa Klasaman, SMP Negeri di Desa Aimas, Kilometer 21.

Kegiatan pengembangan lokasi pendidikan ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam penyediaan sarana pendidikan yang merata, sehingga tidak saja berpusat di jantung Kota Sorong.

2. *Pembangunan Prasarana Jalan Raya*

Pembangunan prasarana jalan raya di dalam kota dilakukan dengan berbagai kegiatan berupa perbaikan dan pengaspalan permukaan jalan di daerah-daerah yang dianggap rusak maupun permukaan jalannya belum diaspal sedangkan upaya pembuatan trotoar dan pelebaran jalan belum dilakukan karena dana yang terbatas.

Pembangunan prasarana jalan raya yang dilakukan dengan cara perbaikan dan pengaspalan permukaannya, adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga dan memelihara ketertiban arus lalu lintas jalan raya yang teratur sehingga dapat berlangsung tertib dan aman.

3. *Meningkatkan Pelayanan Air Minum*

Meningkatkan pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air minum yang merata. Kegiatan pelayanan sarana air minum sedang dilakukan dengan penggalian dan pemasangan saluran pipa-pipa baru ke berbagai lokasi pemukiman yang berada di kota. Kecuali upaya itu, dilakukan juga perbaikan saluran-saluran yang telah rusak maupun yang tersumbat. Di daerah-daerah pemukiman yang tidak terpasang saluran air minum dilayani dengan tangki-tangki air ke para pelanggan.

4. *Meningkatkan Pelayanan Sarana Kesehatan Masyarakat*

Program Kesehatan ini dilakukan dengan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di tingkat RW/RT yang ada di Kota Sorong. Melalui

POSYANDU ini, dapat dilakukan penyuluhan di bidang kesehatan kepada masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi bagi kehidupan manusia (keluarga ibu dan anak-anak). Kegiatan penyuluhan itu sebagai suatu upaya memperbaiki kesadaran penduduk untuk menjaga dan memelihara kesehatan dan meningkatkan gizi keluarga.

5. *Pembentukan Tim Ketertiban Umum Kota Sorong*

Tim Ketertiban Umum Kota sebagai suatu tim terpadu dari berbagai dinas/jawatan terkait yang berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban, masalah kebersihan lingkungan, masalah lingkungan hidup, masalah kesehatan, dan masalah lalu lintas angkutan jalan raya. Koordinasinya di bawah pimpinan Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong. Tim Ketertiban Umum Kota itu bekerja dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong.

Tujuan khusus terbentuknya tim terpadu itu, adalah mensukseskan Program 5 K. (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Keluarga) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Program Induk untuk membina disiplin masyarakat terhadap kehidupan yang tertib, bersih, indah, aman dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan tujuan umum yang lebih dari pada itu, adalah tentunya sebagai suatu upaya pembinaan disiplin terutama di lingkungan masyarakat kota sesuai amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang Pembinaan Disiplin Nasional.

Kegiatan-kegiatan nyata yang telah diwujudkan sebagai upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota itu adalah sebagai berikut :

5.1. *Kegiatan Kebersihan Lingkungan.*

Tim itu bertanggung jawab terhadap kebersihan kota, karena sampah/limbah itu erat hubungannya soal baik buruknya wajah Kota Sorong yang indah mempesona. Tanggung jawab itu dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan pimpinan kelurahan dan RW/RT di lingkungan Kota Sorong, untuk kemudian disampaikan melalui pengumuman kepada masyarakat untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan pemukiman masing-masing. Sementara itu pula, Tim Ketertiban Umum Kota melakukan pengumuman dengan penerangan secara umum keliling kota.

Di dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan kota itu, semua sampah dihimpun di depan rumah dan ditepi jalan raya. Pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah di Pasar Sentral Remu Sorong dan pasar-pasar resmi lainnya dilakukan oleh petugas khusus dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.

Pejabat-pejabat Tim Ketertiban Umum Kota melakukan pengawasan terhadap tingkat kebersihannya maupun terhadap sikap dan perilaku penyimpangan yang muncul dari individu-individu tertentu yang tidak bertanggung jawab terhadap instruksi pemerintah tersebut.

Upaya pembinaan disiplin masyarakat melalui kegiatan kebersihan lingkungan kota itu, juga dilakukan terhadap kios-kios/warung dan pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan raya, di terminal, dan di tempat-tempat umum strategis lainnya di pusat kota. Kios-kios/warung yang bukan toko dan pedagang-pedagang kaki lima (gerobak) yang tidak memiliki ijin pemerintah dan dinilai mengotori pemandangan serta mengotori lingkungan diinstruksikan untuk dibongkar dan di pindahkan ke tempat khusus yang telah disiapkan pemerintah (untuk sementara di jalan baru $\pm$ 10 meter dari Sungai Remu). Pemilik kios/warung dan pedagang kaki lima (gerobak) yang tidak mengindahkan instruksi itu ditindak dengan cara kios/warung dan gerobak itu dibongkar dan dimusnahkan oleh Badan Koordinasi Ketertiban Umum. Kerugian tidak ditanggung oleh tim tersebut.

6. *Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup*

Upaya peningkatan pemeliharaan lingkungan hidup terhadap penebangan hutan dari peladang liar, penggali batu dan pasir di lingkungan Sungai Remu, dan pembuangan sampah di sungai dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dilakukan dengan cara :

- 6.1. Membuat tanda-tanda larangan berupa menulis papan pengumuman kemudian didirikan di tempat-tempat terlarang. Seperti misalnya :
 - *Dilarang menebang kayu di kawasan hutan lindung.* (Dinas Pemangku Kehutanan Kabupaten Sorong).
 - *Dilarang menggali batu dan pasir maupun membuang sampah di sepanjang tepi Sungai Remu.*

- *Dilarang membuang sampah di sini kecuali anjing.*

6.2. Melakukan kegiatan patroli dan pengawasan hutan oleh POLSUS (Polisi Khusus/Kehutanan). Bila terdapat orang yang menebang kayu, biasanya ditindak dengan melapor ke Polisi untuk diproses ke Pengadilan Negeri Sorong untuk mendapat hukuman penjara.

7. *Membina Sikap Mental Penduduk Kota*

Upaya pemerintah dalam rangka membina sikap mental penduduk kota dengan membuat tanda-tanda lalu lintas dan pamflet-pamflet berupa papan-papan yang didirikan di sepanjang jalan tempat-tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca oleh halayak ramai.

Papan-papan bacaan bertuliskan kata-kata :

7.1. Untuk para Pengemudi Kendaraan Bermotor.

- *Rambu-rambu lalu lintas jalan raya.*
- *Kurangi kecepatan banyak orang menyeberang di sini.*
- *Membuat rintangan di jalan raya berbentuk timbunan semen dan atau aspal ("Polisi tidur").*
- *Kendaraan Anda Memasuki Daerah Areal Wajib Bayar Retribusi Parkir. PERDA No. 13 Tahun 1978.*
Tulisan ini mengartikan, harus membayar pajak parkir.
- dan sebagainya.

7.2. Untuk Menjaga dan Memelihara Kebersihan Kota.

- *Kebersihan adalah sebagian dari Iman.*
- *Masyarakat Sehat selalu Memperhatikan Keindahan.*
- *Masyarakat Sehat selalu Memperhatikan Lingkungan yang Bersih.*
- *Kebersihan adalah Pangkal Kesehatan.*

Upaya pemerintah tersebut di atas dimaksudkan agar warga masyarakat kota dapat melihat, membaca dan menghayati makna dari pada tulisan dan tanda tersebut untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan warga sebagai suatu kebiasaan hidup tertib, bersih, sehat. Kecuali itu, juga bertujuan membentuk dan mengendalikan sikap dan mental warga masyarakat agar dapat mengerti dan sadar akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga kota dan warga negara berkewajiban mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

8. *Kegiatan Pendidikan*

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat oleh pemerintah selain melalui kegiatan penyuluhan pada warga masyarakat, juga dilakukan melalui pendidikan di sekolah-sekolah.

9. *Sangsi - Sangsi Hukum*

Tindakan sangsi-sangsi hukum sebagai upaya pembinaan disiplin pada masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, dikenakan hukuman penjara dan membayar denda. Tindakan sangsi hukum merupakan suatu upaya pemerintah yang terakhir terhadap sikap dan perilaku dari masyarakat yang tidak disiplin menjadi masyarakat yang disiplin terhadap hukum yang berlaku.

10. *Kegiatan terhadap Disiplin Administrasi Pemerintah*

Kegiatan terhadap disiplin administrasi dimaksudkan di sini ialah penertiban terhadap ketentuan administrasi pemerintah, upaya-upaya yang sudah mulai diterbitkan di sini sesuai data yang diperoleh dan dinilai sudah nampak adalah :

10.1. *Penertiban Rumah - Rumah Dinas.*

Rumah-rumah dinas milik pemerintah yang dibangun dengan uang rakyat dihuni oleh para pegawai, ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Menurut ketentuan peraturan yang berlaku, rumah-rumah dinas tidak boleh dijadikan sebagai tempat kost (sewaan), dibuat kios-kios/warung jualan yang mencari keuntungan pribadi, dan atau direhab tanpa ijin Dinas Perumahan. Akan tetapi pada kenyataannya kebanyakan pegawai yang menghuni rumah-rumah dinas pemerintah itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Mereka itu, di antaranya ada yang menyambung bangunan tambahan di tanah pemerintah itu untuk dijadikan tempat sewaan, ada yang menjadikan sebagai kios/warung jualan barang-barang toko, dan ada pula yang menyewakan halaman/pekarangan rumah dinas tersebut kepada pedagang untuk membangun kios/warung jualan mereka di tempat itu, maupun ada pula yang merehab atau menyambung sendiri untuk menampung keluarga-keluarganya (kerabat) tanpa seijin Dinas Perumahan pemerintah.

Upaya pemerintah (Tim Ketertiban Umum Kota) terhadap para pegawai yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan

administrasi itu dengan cara memberi edaran pengumuman kepada semua penghuni rumah-rumah dinas/pemerintah supaya memperhatikan ketentuan administrasi terhadap rumah dinas. Tindakan kedua, ialah langsung melakukan teguran berupa surat peringatan kepada pelaku pelanggaran ketentuan administrasi tersebut. Tindakan ketiga, seperti disaksikan sendiri oleh peneliti di lapangan, yaitu sambungan bangunan-bangunan yang berada di tanah pemerintah (pekarangan rumah dinas) yang dengan sengaja dibuat oleh penghuni rumah dinas itu untuk membuat kost (tempat sewaan) kios/warung jualan, dan atau disewakan kepada orang lain membangun kios/warung tanpa ijin dan pemberitahuan kepada penghuni; dibongkar. Pembongkaran itu dilakukan oleh Tim Ketertiban Umum di bawah instruksi dan pimpinan langsung Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong. Tujuan menegakkan ketentuan hukum administrasi pemerintah yang berlaku, sebagai upaya pembinaan disiplin para pemakai rumah dinas.

10.2. Penertiban Administrasi terhadap Pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Warga masyarakat yang menjadi penduduk tetap, diwajibkan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Prosedur pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, diwajibkan harus membawa Surat Keterangan dari RT dan diketahui oleh Ketua RW setempat, kemudian dibawa untuk diperlihatkan kepada Kantor Kelurahan untuk diproses lebih lanjut. Prosedur itu merupakan ketentuan yang dipertegas sebagai upaya pembinaan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi.

Keadaan menunjukkan bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah menjadi suatu prasyarat (ketentuan) utama di dalam suatu urusan kepentingan. Misalnya melamar kerja, harus melampirkan KTP; mengurus SIM dan SPK (Surat Ijin Mengemudi dan Surat Pemilikan Kendaraan), harus melampirkan KTP; pengambilan uang di Bank dan Kantor Pos, harus memperlihatkan KTP; mengurus Surat Ijin, Surat Kelakuan Baik, Surat Jalan, dan sebagainya harus melampirkan KTP.

Persyaratan (ketentuan) melampirkan KTP dan atau memperlihatkan KTP sebagai identitas diri adalah suatu upaya pembinaan disiplin pada warga masyarakat kota di Sorong.

B. Pembinaan oleh Tokoh Masyarakat.

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota oleh tokoh masyarakat, yang menganut suatu keyakinan agama tertentu mempunyai upaya yang besar dan lebih kuat peranan terhadap warga masyarakat yang menjadi umatNya. Oleh karena itu, maka tulisan dalam bagian ini dibatasi pada pembinaan oleh rohaniawan yang bertindak sebagai pemuka agama (*hamba Tuhan*) yang terpanggil untuk memimpin dan mengajar umat Tuhan.

Pemuka agama itu tahu dan menyadari sungguh-sungguh bahwa keselamatan umat manusia di sorga, berada di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Demikian, maka upaya yang dilakukan selamanya ditekankan pada pembinaan rohani. Memiliki rohani yang percaya dan takut pada Tuhan, akan berpengaruh kuat pada sikap dan perbuatannya pada manusia (menghormati, menghargai, dan bersatu dengan orang lain). Upaya pembinaan rohani itu dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan kebaktian dan pengajian. Kegiatan itu dilakukan bukan saja di dalam gereja dan mesjid, tetapi juga dilakukan keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga itu bukan saja terbatas kepada orang berumah tangga tetapi juga secara khusus pada anak-anak, pada pemuda, pada orang laki-laki, maupun juga secara khusus pada ibu-ibu rumah tangga. Misalnya, menurut data yang diperoleh dan dijelaskan oleh dua rohaniawan Kristen sebagai pemuka agama Protestan di kota itu yang dijadikan sebagai informan, merinci acara-acara kegiatan kebaktian ini sebagai berikut :

Kebaktian yang dilakukan di dalam gereja pada setiap hari Minggu disebut kebaktian Jema'at, kebaktian itu diadakan untuk seluruh Jema'at, kebaktian yang dilakukan khusus untuk anak-anak ($\pm$ 3 - 17 tahun) disebut kebaktian tunas. Tempatnya di lingkungan rumah keluarga-keluarga. Acaranya secara bergiliran pada setiap anak, dipimpin oleh para unsur pimpinan Sekolah Minggu. Sementara itu juga setiap minggu pagi diadakan pelajaran Sekolah Minggu untuk anak-anak tersebut. Mereka mendapat pendidikan dan pengajaran agama dari unsur pimpinan Sekolah Minggu, yang disebut Guru Pengasuh Sekolah Minggu; kebaktian yang dilakukan untuk para pemuda, disebut kebaktian pemuda, tempat pelaksanaan di rumah keluarga dari setiap anggota yang menjadi Persekutuan Angkatan Muda Gereja yang bersangkutan. Acara itu dilaksanakan di setiap minggu satu kali, sementara itu dilaksanakan juga pendidikan dan pengajaran agama di dalam gereja, disebut Ketasasi. Acara kegiatan pembinaan ini dilakukan bagi para pemuda yang sudah mencapai usia dewasa (anggota jemaat).

Selain acara kegiatan kebaktian dilakukan menurut usia, juga ada pembinaan kaum bapak dan untuk kaum ibu-ibu rumah tangga secara tersendiri menurut

jenis kelamin. Kebaktian kaum bapak disebut Kebaktian Persekutuan Kaum Bapak; dan kebaktian kaum ibu-ibu rumah tangga disebut Kebaktian Persekutuan Wanita (PW). Para pelayanan firman Tuhan adalah unsur rohaniawan gereja yang disebut Majelis Jemaat. Tempat pembinaan rohani ibu-ibu dilakukan di rumah-rumah para ibu yang tergabung dalam Persekutuan Ibu-ibu Gereja secara bergiliran.

Kebaktian gabungan ibu bapak yang menjadi satu pasangan yang berbentuk rumah tangga (suami isteri dan anak-anak) disebut kebaktian keluarga atau kebaktian rumah tangga, biasanya dilakukan secara bergiliran pada setiap anggota Jemaat.

Acara kebaktian dilakukan melalui kegiatan ibadah dengan tata caranya adalah : berdoa, menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kudus (derma) untuk pelayanan firman Tuhan, penutup. Pada acara penutupan disuguhkan kue dan minuman teh sebagai tanda persekutuan dan damai di antara satu sama lain. Pendeta memimpin kebaktian-kebaktian Jemaat maupun Ibadah Jemaat lainnya yang dilakukan secara keseluruhan. Jadi anggota-anggota Jemaat diorganisir dalam kelompok-kelompok binaan, yang disebut kelompok-kelompok persekutuan sesuai amanat Tuhan "**Serikat Persaudaraan, berdirilah teguh**", Tuhan datang ke dunia agar semuanya bersatu. Di dalam acara-acara itu, pembinaan rohani warga Jema'at dapat dilaksanakan.

Demikian penjelasan terperinci yang diperoleh dari dua pemuka agama Kristen Protestan terkemuka di kota tersebut, tentang upaya pembinaan rohani pada warga Jemaat, agar dapat menata hidup yang "**baik**" sebagai warga Jema'at-warga gereja - warga masyarakat - warga negara.

Upaya-upaya pembinaan rohani seperti tersebut di atas pada agama Kristen Protestan, keadaan yang demikian pula terjadi pada agama Islam, Hindu. Para pemuka-pemuka agama juga melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membina iman dan akhlak (rohani) pada umatNya.

Gejala yang menjolok di sini, adalah bahwa sikap spontanitas dan loyalitas warga masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat "**religius**" (keagamaan) sangat besar dari pada anjuran pemerintah, ataupun tokoh lainnya. Hal ini merupakan suatu unsur potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah secara kerja sama dalam upaya pembinaan sikap mental dan tingkah laku warga masyarakat agar dapat melakukan apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan, supaya jangan dilakukan. Demikian, beberapa upaya pembinaan disiplin pada masyarakat yang diperoleh dari pemuka (tokoh) agama di Kota Sorong.

BAB XI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian di lingkungan masyarakat Kota Sorong yang terletak pada posisi 00° 53' LS dan 131° 16' BT sebelah barat Propinsi Irian Jaya seperti telah diuraikan panjang lebar pada bab-bab terdahulu menunjukkan bahwa timbulnya permasalahan kota sama dengan masalah kriminalitas yang tinggi; masalah pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda; masalah sampah; masalah kerusakan lingkungan hidup; masalah kesempatan kerja, yaitu pengangguran-pengangguran kota; masalah tuna susila; dan kenakalan remaja yang terjadi di Kota Sorong tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota yang masih rendah terhadap ketentuan peraturan, hukum, keputusan, dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku.

Ketaatan dan kepatuhan warga Kota Sorong terhadap upaya-upaya pemerintah dan tokoh masyarakat seperti diuraikan pada Bab V, bukan saja dipengaruhi oleh tingkat kesadaran penduduk yang rendah tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari sejumlah warga kota yang masih memperlihatkan kebiasaan tradisi seperti di daerah asalnya. Demikian pula dipengaruhi oleh prasarana jalan yang kurang lebar, tidak ada trotoar, jalan rusak, maupun sarana personil keamanan yang terbatas, sistem keamanan lingkungan yang tidak diatur secara tegas dan teratur, dan kurangnya sistem pemahaman sejumlah warga kota terhadap pola hidup di lingkungan dimana mereka tinggal. Mereka masih mempertahankan aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial, konsepsi-konsepsi daerah asalnya, dan sistem pengendalian sosial lainnya dalam memelihara kelangsungan hidupnya Kota Sorong. Akibatnya mereka "**bersikap malas tahu**" terhadap kepentingan umum.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kota Sorong dalam posisi strategisnya sebagai kota pelabuhan terbesar di Irian Jaya dan juga sebagai pintu utama masuk keluar berbagai jenis kapal laut dari Irian Jaya secara mudah merupakan daya tarik tersendiri yang menyebabkan derasnya arus pendatang baik yang datang dari desa belakang dan sekitarnya maupun pendatang dari daerah lainnya di Indonesia ke kota itu menimbulkan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan pembangunan perluasan dan peningkatan fasilitas kota. Akibatnya beban yang harus dipikul oleh sistem sosial, ekonomi dan fisik kota menjadi semakin besar. Beban itu dalam banyak hal berada di luar kemampuan kota untuk mendukungnya, seperti telah digambarkan pada bab II bagian ketiga

sebelumnya, antara lain :

- Penyediaan lapangan kerja yang terbatas, sehingga menimbulkan pengangguran;
- Sistem pelayanan sosial dan fisik sangat sulit untuk dapat menampung tuntutan pelayanan terhadap masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- Ketatnya persaingan hebat di dalam merebut sarana dan fasilitas yang tersedia demi untuk kebutuhan dan kepuasan pribadinya, keadaannya sangat mempengaruhi kualitas kehidupan dilihat secara sosial nampaknya adanya kesenjangan antara yang kaya dan kecukupan : kecukupan dengan yang lemah (miskin); yang kaya dan miskin; yang tinggi dan yang rendah; serta antara yang berupaya dengan tidak berupaya.

Dari segi fisik kota, keadaannya menimbulkan masalah-masalah perkotaan di Sorong, seperti telah diuraikan lebih dahulu tentang :

- Timbulnya pola pemukiman dan tata bangunan yang tidak teratur, perumahan liar;
- Kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
- Terjadinya pengotoran dan rusaknya lingkungan kota;
- Terjadinya pencemaran air Sungai Remu.

Hasil lain yang juga diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa masalah kriminalitas yang tinggi, terutama jenis kejahatan penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan, dan kejahatan susila yang terjadi di Kota Sorong berawal (bersumber) pemabukan dan minuman alkohol (berbagai macam minuman keras) yang banyak terjual di toko dan kios. Tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi dan menyebabkan kecelakaan, keadaannya diakibatkan oleh faktor manusia yang tingkat disiplinnya rendah (97%).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketaatan kepatuhan aparat Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pasal 2 ayat (11) tentang ketaatan jam kerja, dan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. 13/Instr-GIJ/1980 tentang jam kerja dan pulang belum dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab oleh sejumlah besar Pegawai Negeri Sipil di Kota Sorong. Keadaannya menyimpang dari ketentuan peraturan tersebut bukan saja mengurangi kedisiplinan kerja tetapi juga mengurangi rasa kerja sama dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Demikian pula ditingkat kelurahan yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan adanya ketidak patuhan sejumlah warga kelurahan tersebut terhadap ketentuan

administrasi pemerintahan baik di kelurahan maupun di RW/RT tentang kewajiban lapor bagi setiap pendatang baru, pemilik Surat Keterangan Pindah dari daerah asal, kewajiban pemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain ketentuan administrasi pemerintah di kelurahan. Keadaan itu bukan saja dipengaruhi oleh kedisiplinan warga masyarakat yang kurang tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap mental dan perilaku sejumlah warga kelurahan yang kurang menghormati status kepemimpinan aparat kelurahan dan RW/RT sebagai orang bawahan. Sebaliknya pula dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pimpinan yang tidak berwibawa, jujur, ramah tamah, dan menghormati warga.

B. Saran - Saran.

Disadari bahwa membiasakan diri wajib melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, dan apa yang tidak boleh dilaksanakan, jangan dilaksanakan, memang tidak mungkin dilakukan secara 100%. Karena manusia pada hakekatnya tidak sempurna dalam melakukan kesalahan, kehilafan, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku sebagai suatu sistem nilai budaya bersama. Namun demikian, sebagai manusia harus diupayakan supaya bisa dapat melakukan kebiasaan wajib mematuhi ketentuan yang menjadi pedoman hidup bersama tersebut. Oleh karena itu pembinaan kebiasaan disiplin pada masyarakat harus dilaksanakan. Untuk itu disarankan :

1. Berbagai pola pembinaan disiplin pada masyarakat yang telah diupayakan berupa ketentuan hukum, peraturan, keputusan, dan lain instruksi yang bertujuan menata kehidupan manusia yang baik, aman, tertib, bersih, indah, dan kekeluargaan supaya lebih dipertegas.
2. Aparat pemerintah yang bertugas sebagai agen pembinaan dan penegak hukum dan peraturan yang berlaku diperlukan sikap dan tingkah laku yang berwibawa, jujur, setia, ramah-tamah, dan menghargai orang lain. Sikap disiplin yang dimulai dalam lingkungan diri sendiri dari aparat pemerintah yang bertugas membina dan menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, sangat berpengaruh positif terhadap kedisiplinan masyarakat (kota) sebagai lingkungan yang luas.
3. Prasarana ialah harus diperlebar, dibuatkan trotoar, dan memperbaiki pemukiman jalan yang rusak demi ketertiban lalu lintas jalan raya.
4. Meningkatkan koordinasi Badan Komisi Pemberian Membangun (IBM) yang telah ada supaya dikaitkan dengan Rencana Induk Perluasan dan

Pengembangan Kota Sorong agar supaya dapat menata lingkungan pemukiman dan tata letak rumah yang tidak teratur.

5. Untuk dapat mengatasi masalah sampah yang merusak wajah Kota Sorong, maka armada (fasilitas) angkutan sampah supaya ditingkatkan. Kecuali itu, koordinasi Badan Ketertiban Umum kota Sorong lebih diarahkan lagi ke tingkat RW/RT dengan melibatkan personilnya ke dalam Tim Ketertiban Umum Kota. Karena mereka itu adalah tokoh masyarakat yang bertanggung jawab langsung dalam hal kebersihan kota di lingkungan pemukiman masing-masing.
6. Demi keamanan, ketertiban dan keindahan kota, agar supaya daerah-daerah yang masih gelap dapat dipasangkan penerangan lampu-lampu jalan.
7. Usaha pembinaan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia (termasuk Kota Sorong) yang diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980, dan lain-lain; yang pada dasarnya berpedoman pada *Stadsgemeents* pada zaman Belanda tentang tugas dan wewenang pemerintah kota dalam menata lingkungan hidup masyarakat kota yang disiplin, serasi dan harmonis supaya dilaksanakan secara konsekwen sebagai suatu upaya yang sangat berpengaruh positif terhadap upaya pembinaan disiplin pada masyarakat Kota Sorong.
8. Pendidikan kesadaran masyarakat kota melalui penataran P4, dan penyuluhan-penyuluhan kesadaran hukum, ceramah-ceramah kerukunan dan keutuhan kesatuan hidup masyarakat, maupun melalui pembinaan rohani di dalam gereja dan mesjid, kegiatan berbagai kebaktian persekutuan Jema'at Tuhan dibidang agama oleh pemuka agama supaya ditingkatkan.

Demikian beberapa saran upaya pembinaan disiplin dilingkungan masyarakat kota yang menjadi thema dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bintarto** *Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya.* Jakarta : Balai Aksara dan Pustaka Sadiyah, 1983.
- Evers, Hans Dieter** *Sosiologi Perkotaan.* Jakarta : LP3S, 1979.
- Inkeles, Alex** *What is Sociology : an Introduction to the Dicipline and Profession.* Prentice of India (Privend) LTD, 1965.
- INDONESIA, Departemen Dalam Negeri** *Himpunan Peraturan, Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.* Jakarta : Departemen Dalam Negeri, 1989.
- Jonnon, H. M.** *Sociology : a Systematic Introduction.* New York : Hocart, Brace and World Inc, 1960.
- Kastono, Kartini** *Patologi Sosial, Jilid I.* Jakarta : Rajawali, 1981.
- Koentjaraningrat** *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta : Dian Rakyat, 1974.
- Kebudayaan Mentalitet Pembangunan.* Jakarta : Gramedia, 1974.
- Moenir A. S.** *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian.* Jakarta : Gunung Agung, 1989.
- Mulyanto, Sumardi dan Evers, Hans Dieter** *Organisasi Masalah Kota Jakarta.* Jakarta : PPBM, 1979.
- Soekanto, Soejono** *Sosiologi : Suatu Pengantar.* Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas, 1978.

Perpustakaan
Jenderal